



T. 11848



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN  
INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL DALAM NEGERI  
SERTA PREFERENSI KONSUMEN  
TERHADAP PRODUK TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL DALAM NEGERI  
(KAJIAN DILIHAT DARI SUDUT KETAHANAN EKONOMI NASIONAL )**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar  
Magister Sains pada Program Studi Pengkajian Stratejik Ketahanan Nasional  
Pasca Sarjana Universitas Indonesia**

**Oleh :**

**P. Remedy Silalahi  
NIM. 7101010066**

**PENGAJIAN STRATEJIK KETAHANAN NASIONAL  
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS INDONESIA**

**TAHUN 2003**

11326

UNIVERSITAS INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PENGKAJIAN STRATEGIK KETAHANAN NASIONAL



PERPUSTAKAAN PUSAT  
UNIVERSITAS INDONESIA

Pembelian/Mediah dari

Pasca

Diterima tgl: 25 SEP 2004

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

N a m a : P. Remedy Silalahi  
N P M : 7101010066  
Judul Tesis : Kebijaksanaan Pembangunan Industri Tekstil Dan Produk Tekstil  
Dalam Negeri Serta Preferensi Konsumen Terhadap Produk Tekstil Dan  
Produk Tekstil Dalam Negeri (Kajian Dilihat Dari Sudut Ketahanan  
Ekonomi Nasional)

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan sidang Ujian Tesis pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Desember 2003

Pukul : 12.<sup>00</sup> - 14.<sup>00</sup> BBWI

Tempat : Ruang Kuliah PKN PPS UI, Jl. Salemba Raya 4 Jakarta

dan dinyatakan LULUS

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua merangkap  
Pembimbing I : Prof. Dr. Wan Usman, MA.

Pembimbing II : Laksda TNI (Purn) F.M. Parapat, Ph.D

Penguji : Prof. Dr. Deliar Noer

Penguji : Prof. Dr. Budhisantoso

Penguji : Letjen TNI (Purn) Purbo Suwondo

Sekretaris : Amirsyah Sahil, SE, M.Si

*Wan Usman*

*F.M. Parapat*

*Deliar Noer*

*Budhisantoso*

*Purbo Suwondo*

*Amirsyah Sahil*

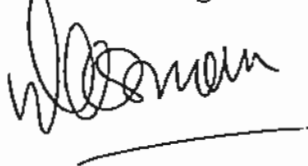
PERPUSTAKAAN PUSAT  
UNIVERSITAS INDONESIA

UNIVERSITAS INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PENGAJIAN STRATEGIS KETAHANAN NASIONAL

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS**

N a m a : P.Remedy Silalahi  
N P M : 7101010066  
Judul Tesis : KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI TPT  
DALAM NEGERI SERTA PREFERENSI KONSUMEN  
TERHADAP PRODUK TPT DALAM NEGERI (KAJIAN  
DILIHAT DARI SUDUT KETAHANAN EKONOMI  
NASIONAL )

Dosen Pembimbing I



(Prof. DR. Wan Usman, MA)

Dosen Pembimbing II



( F.M. Parapat, PhD)

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan ke Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis, sebagai tugas akhir yang merupakan salah satu syarat kelulusan, guna memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) dengan judul “KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI TPT DALAM NEGERI SERTA PREFERENSI KONSUMEN TERHADAP PRODUK DALAM NEGERI (KAJIAN DILIHAT DARI SUDUT KETAHANAN EKONOMI NASIONAL)” pada Program Pasca Sarjana Pengkajian Strategik Ketahanan Nasional Universitas Indonesia.

Banyak pihak yang memberi bantuan dan dukungannya selama penulis mengikuti pendidikan, sampai dengan menyelesaikan tesis ini. Rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya ingin penulis kepada :

1. Bapak. Prof. Dr. Wan Usman, MA sebagai Ketua Program Studi Pengkajian Strategik Ketahanan Nasional dan selaku Pembimbing I Tesis ini, yang telah memberikan petunjuk, arahan dan saran yang sangat berharga dalam penyusunan tesis ini.
2. Bapak Laksda TNI (Pur) F.M. Parapat, Ph. D, selaku Pembimbing II, yang telah memberikan petunjuk, pengarahan dan saran yang sangat berharga dalam penyusunan Tesis ini
3. Para Guru Besar dan Dosen Program Pascasarjana Pengkajian Strategik Ketahanan Nasional Universitas Indonesia serta Bapak Amirsyah Sahil, SE, M.Si selaku

Sekretaris Program Studi, serta seluruh staf dan karyawan Program Pascasarjana Pengkajian Strategik Ketahanan Nasional Universitas Indonesia yang telah membantu kelancaran perkuliahan dan penyelesaian tesis ini.

4. Pimpinan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, khususnya Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa tempat penulis bekerja, Direktur Bina Pasar dan Distribusi, Direktur Ekspor Hasil Industri dan Direktur Tekstil dan Produk tekstil atas informasi dan ikut serta mengisi kuesioner untuk model AHP guna mendukung penyelesaian penyusunan Tesis.
5. Dalam kesempatan ini penulis ingin pula menyampaikan rasa hormat dan terimakasih atas bantuannya dalam pengisian Kuesioner untuk model AHP, serta berbagai informasi yang berkaitan dengan Judul Tesis, kepada  
Bapak Ermaya, Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional  
Bapak Vincent Goan dari PT. Golden Metro Anggota API  
Bapak Sujatmiko dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia  
Bapak Hary Sungkono, Ketua PARFI Pusat  
Bapak Sagi Silalahi, Kepala Sekolah SMPN 40, beserta Ibu Guru BP  
Bapak Anwar Fuadi, Ketua Umum PARSI  
Bapak DR. Tulus Tambunan, Sekretaris LP3I KADIN  
Bapak Ismet Nur, Pemimpin Redaksi Indonesian Garment

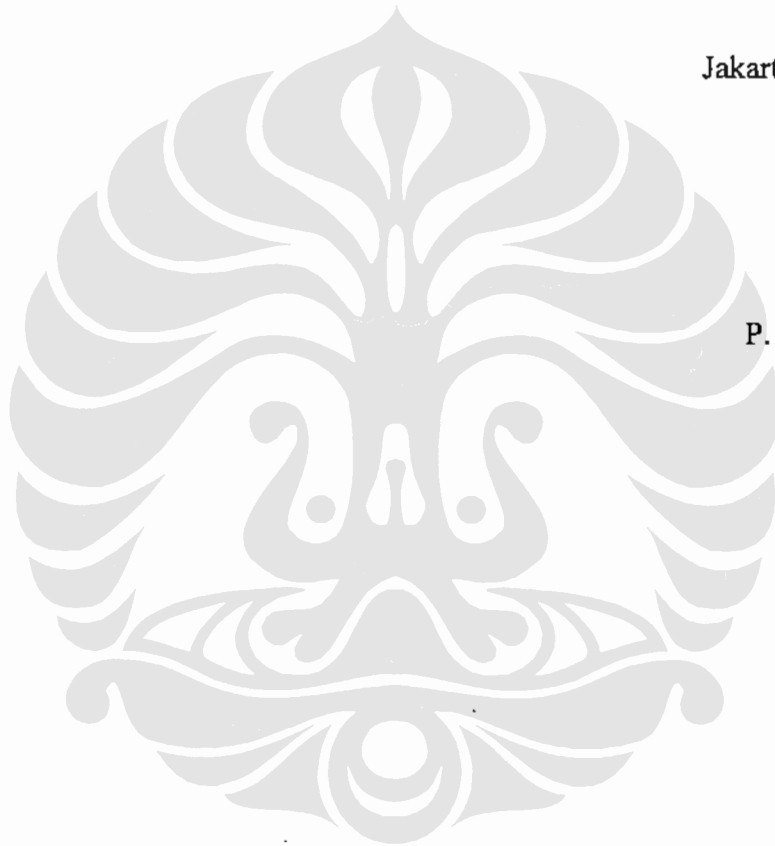
6. Rekan-rekan peserta kuliah Program Pascasarjana Pengkajian Strategik Ketahanan Nasional Universitas Indonesia khususnya Angkatan XIX, yang bersama-sama saling memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan pendidikan.

Akhirnya penulis menyampaikan ucapan terimakasih setinggi-tingginya atas doa dan restu, bantuan moril kepada berbagai pihak sehingga tesis ini dapat terselesaikan, terutama Isteri dan anak kami.

Jakarta, Desember 2003

Penulis

P. Remedy Silalahi



PERPUSTAKAAN PUSAT  
UNIVERSITAS INDONESIA

**ABSTRAK**

P. REMEDY SILALAH, 7101010066

KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL DALAM NEGERI SERTA PREFERENSI KONSUMEN TERHADAP PRODUK TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL DALAM NEGERI (KAJIAN DILIHAT DARI SUDUT KETAHANAN EKONOMI NASIONAL)

Xiv, 137 halaman, 20 tabel, 1 gambar, 1 bagan, 9 lampiran, Bibliografi : 36 buku (tahun 1986 s.d 200), 4 artikel, 20 dokumen.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui potensi/peluang pemberdayaan industri TPT, mengingat kelangsungan industri TPT terkait erat dengan lingkungan strategis global, faktor eksternal dan internal pemerintahan serta manajemen TPT nasional. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor pengaruh pilihan konsumen, kebijakan pemerintah, besarnya devisa yang hilang dan relevansi industri TPT terhadap ketahanan ekonomi nasional. Teori untuk mengidentifikasi permasalahan, konsepsi ketahanan nasional, tugas pokok dan fungsi leading sector sebagai pengendali kebijakan dan instansi terkait lainnya. Metode analisis, digunakan AHP dengan melibatkan 30 (tigapuluh) orang expert (responden). Adapun hasil temuan menunjukkan, faktor dominan dalam preferensi konsumen adalah desain, harga, motif, merk dan kualitas. Besarnya konsumsi masyarakat terhadap produk TPT impor (baru, illegal dan bekas), sangat merugikan. Upaya pemerintah untuk mengamankan industri TPT belum optimal, mengingat hadirnya pesaing baru didukung pemerintahnya untuk mendapatkan devisa. Relevansi industri TPT dengan ketahanan ekonomi nasional sangat signifikan mengingat besarnya angkatan kerja dan devisa yang dihasilkan, peran produktivitas dan konsumsi di dalam negeri.

Solusi bersama untuk menumbuhkembangkan industri TPT sebagai perkuatan ketahanan ekonomi nasional, adalah kesadaran berbangsa dan bernegara dalam membentuk nasionalisme baru. Kebijakan yang sinkron dengan dinamika usaha, dan diikuti pendekatan dengan multi disiplin ilmu pengetahuan. Transparansi, kepastian hukum dan berusaha, dapat menstimuli lapangan usaha dan pekerjaan, sebagai dasar lahirnya produktivitas dan kreativitas dengan memfasilitasi bidang perbankan dan Iptek guna meningkatkan kemampuan industri lokal dalam penyediaan bahan baku, restrukturisasi mesin guna memenangkan persaingan.

Jakarta, Desember 2003

**P.R.S**

**ABSTRACT**

P. REMEDY SILALAH, 7101010066

DEVELOPMENT POLICY OF TEXTILE AND PRODUCT TEXTILE INDUSTRY WITH DOMESTIC CUSTOMER PREFERENCES TOWARD ITS (A STUDY OF ECONOMIC NATIONAL TENACITY POINT OF VIEW)

KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL DALAM NEGERI SERTA PREFERENSI KONSUMEN TERHADAP PRODUK TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL DALAM NEGERI (KAJIAN DILIHAT DARI SUDUT KETAHANAN EKONOMI NASIONAL)

Xiv, 137 halaman, 20 tabel, 1 gambar, 1 bagan, 9 lampiran, Bibliografi : 36 buku (tahun 1986 s.d 200), 4 artikel, 20 dokumen.

This research purpose is to know opportunities of TPT industry empowerment, consider with TPT's industry persistence (high-related by global strategic environment, internal dan external factors of governmental and national's TPT management. Also to know influence of customer preference, government policy, amount of foreign exchange and relevancy of TPT industry toward national tenacity. The theory to identify problems, national tenacity conception, and other agencies related. Analytical methods use of AHP involved 30 (thirty) respondent (who expert). There coming out shown, dominant factor in customer preference is design, price, motive, merk and quality. Have a lot of public refreshment toward import textile-product (newest, illegal and former), quiet suffer financial lost. Government efforts' to safe TPT industry not optimal yet, remain arose of new competitor which support by government to gain the foreign exchange. Significancy between TPT industry and national economic tenacity is interrelated, consider with field of endeavor and foreign exchange outcome, productivity role and domestic consumption.

A collective solution to flourish TPT industry as strengthen of national economic tenacity is awareness of new nationalism in sense of having a nationality and state-owned. Policy which synchronized with business in dynamic, follow by multi-discipline of science approaches. Transparency, law enforcement and good business condition, can stimulate business field and job opportunities as ground of increase productivity and creativity by facilitate it banking sector and technology in order to extent local industrial capability to provide raw material, machine restructurisation to win competition

Jakarta, Desember 2003

**P.R.S**





## DAFTAR ISI

	Hal
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR dan BAGAN .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Metodologi Penelitian dan Analisa data .....	9
E. Metode Analisa Data .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II LANDASAN TEORI .....	15
A. Konsep Kebijakan Publik .....	15
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumen .....	18
C. Kebijakan Penggunaan Produk Dalam Negeri Landasan Perkuatan Perekonomian Nasional .....	24
D. Meningkatkan Daya Saing Kemitraan .....	43
E. Pembangunan Tekstil dan Produk Tekstil .....	49
F. Pembinaan Sumber Daya Manusia .....	52

BAB III	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SEBAGAI PENGENDALI KEBIJAKAN .....	55
	A. Analisis Kebijakan Perdagangan Industri TPT .....	55
	B. Analisis Kinerja Produk TPT Dalam Negeri .....	60
	C. Kondisi Industri TPT di Indonesia .....	68
BAB IV	ANALISA DAN PEMECAHAN MASALAH	
	A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pilihan Konsumen .....	77
	B. Usaha Pemerintah Untuk Memberdayakan TPT Dalam Negeri .....	79
	C. Besarnya Devisa yang Digunakan Untuk produk TPT Import .....	91
	D. Relevansi Industri TPT dan Ketahanan Ekonomi Nasional .....	94
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN .....	129
	A. Kesimpulan .....	129
	B. Saran .....	132
DAFTAR	KEPUSTAKAAN .....	134
LAMPIRAN-	LAMPIRAN .....	138

**PERPUSTAKAAN PUSAT  
UNIVERSITAS INDONESIA**

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel No. 1 : Tingkat pendidikan Pegawai ditjen PDN	61
Tabel No. 2 : Pangkat/Golongan Pegawai Ditjen PDN	62
Tabel No. 3 : Eselonering Pegawai Ditjen PDN	63
Tabel No. 4 : Persebaran Industri TPT di Indonesia	69
Tabel No. 5 : Perkembangan Investasi TPT Tahun 1998-2002	70
Tabel No. 6 : Perkembangan IPT periode 1998 – 2002	71
Tabel No. 7 : Perkembangan Tenaga Kerja 1995 – 2002	72
Tabel No. 8 : Perkembangan Investasi Tahun 1995 – 2002	74
Tabel No. 9 : Perkembangan Kapasitas dan Produksi	75
Tabel No. 10: Perkembangan Nilai TPT Tahun 1996 – 2002	76
Tabel No. 11 : Perbandingan Jawaban responden terhadap Kriteria	78
Tabel No. 12 : Tanggapan Responden terhadap Statement TPT	84
Tabel No. 13 : Media Cetak yang sering Dibaca	85
Tabel No. 14 : Faktor-faktor pendukung Pembelian TPT	86
Tabel No. 15 : Faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian	87
Tabel No. 16 : Barang-barang yang menggunakan produk TPT	92
Tabel No. 17 : Rata-rata Suku Bunga Bank di Indonesia	97
Tabel No. 18 : Persebarann Jumlah Kemiskinan	108
Tabel No. 19 : Kontribusi Ekspor TPT terhadap non migas	122
Tabel No. 20 : Perkiraan Potensi Pengguna Produk Dalam Negeri	123

## DAFTAR GAMBAR DAN BAGAN

	<b>Hal</b>
Bagan No. 1 : Matrix Berpasangan .....	10
Gambar No. 1 : Focus .....	12



## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
1. Kuesioner Untuk AHP	138
2. Jawaban Responden untuk Kuesioner AHP	144
3. Kuesioner untuk kebijaksanaan industri TPT	151
4. Struktur Organisasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan	152
5. Bank Taiwan danai Industri Tekstil	153
6. Perkembangan Nilai Tukar dan faktor Sentiment	154
7. Skandal KKN Kuota TPT Ratusan Miliar Mulai Terkuak	155
8. Transparansi Manajemen Kuota Harus	156
9. Manajemen Kuota TPT Harus Transparan Melalui Verifikasi	157
10. Daftar Riwayat Hidup	158
11. Persetujuan Pembimbing Tesis	159

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kemajuan teknologi di bidang komunikasi, transportasi dan informasi membuat kegiatan perekonomian khususnya sektor perdagangan, semakin lancar dan terbuka. Persaingan semakin ketat, arus barang dan jasa semakin lancar, dan harga semakin kompetitif. Produsen berupaya meningkatkan nilai tambah setiap produk yang dihasilkan, sehingga memperoleh keuntungan. Relevansinya signifikan dengan pembangunan di bidang ideologi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan serta mempengaruhi pengembangan bidang pembangunan lainnya. Fenomena krisis moneter dan perekonomian medio 1997an, menunjukkan arti strategisnya setiap indikator, sehingga menyikapinya tidak saja sebagai masalah perekonomian.

Ketergantungan bahan baku impor sebagai komponen ekspor sangat rentan dengan berbagai gejolak, selain varian ekonomi, termasuk eskalasi politik. Adanya gangguan keamanan di sentra usaha, dapat melumpuhkan kegiatan perekonomian, khususnya yang memiliki ketergantungan bahan baku impor. Kondisi ini sangat berbeda dengan daerah/wilayah yang produk unggulannya hasil pertanian, kehutanan, dan kelautan yang didominasi komponen lokal dan tidak tergantung pada bahan baku impor untuk pemenuhan pasokan dalam negeri maupun kegiatan ekspor. Perubahan

nilai kurs terhadap rupiah (devaluasi), membawa keuntungan atau peningkatan penghasilan.

Penggunaan produk dalam negeri (PPDN) langkah strategis untuk mewujudkan bangsa yang berketahanan, kilas baliknya program BERDIKARI, yang sarat dengan dimensi politik dan idiologi setelah Presiden Soekarno mengatakan *go to hell with your aid* dan menguatnya gerakan anti kapitalisme/imperialisme (AS dan Inggris), yang mencampuri penyelenggaraan pemerintahan (politik dalam negeri). Pada Kabinet DWIKORA Tahun 1964–1966, dibentuk Menteri Perindustrian Tekstil, merupakan landasan terwujudnya pemenuhan kebutuhan masyarakat, dengan mempertimbangkan populasi penduduk dan kemampuan pasokan bahan baku.

Pada Kabinet Pembangunan IV Tahun 1983-1988, Presiden Soeharto, menerbitkan Kantor Menteri Negara Urusan Peningkatan Produk Dalam Negeri, dengan sasaran peningkatan kegiatan perekonomian nasional dengan memanfaatkan keunggulan komparatif, guna mendukung keunggulan kompetitif. Hal ini berkaitan dengan trend penggunaan atau mengkonsumsi produk-produk impor untuk kebutuhan rumah tangga, alat-alat dan hasil produk pertanian, produk-produk elektronika, tekstil dan produk tekstil (TPT) sebagai symbol/status kemapanan, maupun untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang pada dasarnya telah di produksi di dalam negeri.

Mewujudkan PPDN secara optimal khususnya komoditi TPT, kebijakan pemerintah berhadapan dengan produk impor yang memiliki keunggulan harga, motif, model dan sistem distribusi guna memenuhi kepuasan konsumen. Memahami kepuasan konsumen sangat dimensional, selain sikap dan perilakunya, upaya-upaya ekonomis dari produsen (promosi, discount), dsbnya. Menghindarkan konsumen agar tidak konsumtif terhadap produk-produk impor, memanfaatkan sistem regulasi dan proteksionisme sebagai pengaman kebijakan PPDN, tidak dapat dilakukan setelah Indonesia meratifikasi UU No. 7 Tahun 1994 tentang GATT dan WTO (transparansi, non diskriminasi dan timbalbalik). Dengan demikian, semangat kesadaran lebih efektif dibandingkan dengan pembatasan pilihan konsumen. Hal ini merupakan gambaran dari cinta bangsa dan karyanya sekaligus manifestasi semangat kebangsaan.

Paradigma baru PPDN adalah implikasinya dan esensinya berdimensi kebangsaan. Artinya seluruh persoalan bangsa melekat didalamnya (ASTA GATRA), dan bermuara pada ketahanan nasional. Sejalan dengan situasi dan kondisi riil bangsa, pembangunan perekonomian nasional upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, struktur dan infra strukturnya masih dalam proses re-covery, sementara ancaman terhadap penguatan perekonomian nasional bermunculan, dari dalam dan luar negeri. Kebijaksanaannya bermuara pada strategi kepentingan nasional melalui pemberdayaan dunia usaha nasional secara komprehensif dan integral (jujur, sehat dan dinamis), diikuti penghematan dan berorientasi pada PPDN. Imbauannya seluruh



komponen bangsa khususnya Pejabat Negara untuk tidak menggunakan produk impor (Panutan).

Mensosialisasikan PPDN guna meningkatkan ketahanan nasional di bidang perekonomian, masyarakat dan pemerintah harus menyadari bersama, bahwa PPDN dalam arti sesungguhnya (100 %) tidak pernah ada, karena tidak ada suatu negara yang memiliki sumber daya alam secara lengkap untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Disamping keterbatasan penguasaan IPTEK, interdependensi menjadi pilihan guna meningkatkan efisiensi. Dengan demikian, penetapan tolok ukurnya masing-masing negara berbeda, dan sebagian negara menetapkan  $\pm 25\%$  penggunaan komponen lokal, dinyatakan sebagai produk buatan suatu negara (dalam negerinya). Kriteria produk dalam negeri bagi Pemerintah Indonesia sementara ini dikaitkan dengan penggunaan komponen lokal, dibuat di Indonesia, menggunakan tenaga kerja lokal dan tunduk pada perundang-undangan yang berlaku.

Upaya meminimalisir ketergantungan, memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah serta meningkatkan daya saing produk-produk dalam negeri. Disamping itu memberdayakan seluruh kemampuan komponen dunia usaha dalam negeri, dengan melakukan rekayasa dan rancangbangun IPTEK yang signifikan dengan pengembangan PPDN. Selain desain, kualitas, harga dan kontinuitas diperlukan sistem pengupahan yang memadai, kepastian usaha dan kepastian hukum,

sehingga dunia usaha (lokal) dapat mengembangkan kreativitasnya. Kemandirian sebagai tujuan di era global, adalah kemampuan menghadapi dan menyelesaikan berbagai tantangan bangsa, didukung partisipasi aktif rakyat secara semesta disegala bidang pembangunan.

Kendala utama PPDN khususnya produk TPT, masyarakat terobsesi kualitas impor dengan merk-merk tertentu, disamping kebijaksanaan yang diterbitkan selama ini, berorientasi singkat dengan waktu relatif pendek, sehingga tidak menyentuh emosional masyarakat. Fenomena kegagalan atau tidak mendapat respons berbagai program pemerintah, disebabkan kurang mengikuti kaidah-kaidah penerbitan kebijakan publik. Merealisasikannya, selain kebijakan yang diterbitkan, institusi yang mengemban amanat sehingga dapat mengakomodir berbagai permasalahan dan memotivisir produsen. Sesuai dengan peran industri TPT dan kaitannya dengan pemasyarakatan PPDN, kemampuannya memenuhi selera atau kepuasan konsumen, maka industri TPT menstimuli dunia usaha bersama elemen perekonomian bangsa .

Secara teknis, mengembangkan potensi tekstil dan produk tekstil (TPT) sebagai komponen ketahanan nasional di bidang perekonomian, terkait erat dengan :

1. Pengelolaan manajemen Kuota, seperti distribusi, besarannya, lambatnya perizinan sehingga mempengaruhi kepastian berusaha
2. Masalah BBM, volume untuk wilayah/kawasan dan fluktuasi harga

3. Pajak, terhadap bahan baku utama sebesar 10 %, sehingga membebani produsen dan akhirnya mengurangi daya saing
4. Adanya impor ilegal (penyelundupan), dan diperkirakan akan tetap tumbuh dikaitkan dengan kesenjangan pendapatan serta harga produk TPT dalam negeri dirasakan masih relatif mahal
5. Transportasi atau infrastruktur, yaitu jalan menuju kawasan/sentra industri kurang baik/rusak sehingga menghambat transportasi
6. Moneter dan keuangan, dibandingkan anggota ASEAN lainnya suku bunga tinggi, sehingga membebani produsen
7. Keamanan, situasi dan kondisi politik baik di tingkat pusat maupun daerah kurang kondusif serta kurang sinkronnya kebijakan pemerintah pusat dan daerah, mengakibatkan daerah bergejolak (mis-interpretasi)
8. Otonomi daerah, yang semula diharapkan sebagai pendorong efisien dan pengembangan kreatif, kini menjadi bumerang dengan banyaknya retribusi dan biaya-biaya tak terduga dengan orientasi pendapatan asli daerah (PAD)
9. Restrukturisasi mesin, sebagai alat utama produksi masih diimpor, maka ketergantungan mesin sangat tinggi sementara peralihan teknologi masih terbatas.

Kendala lainnya adalah, kepercayaan pembeli asing, munculnya pesaing, hambatan yang bersifat non tarif barrier, pembebasan kategori kuota (Tahun 2005) dan semakin berkembangnya perjanjian-perjanjian Bilateral maupun Multilateral untuk mengamankan kepentingan nasional masing-masing. Bersamaan dengan pengembangan usaha TPT, Indonesia diliputi issue-issue ekonomi internasional seperti persaingan tidak sehat, perlindungan konsumen dan lingkungan, HAM, upah buruh dan demokrasi.

Kegiatan industri TPT menjadi strategis dengan perannya sebagai pilar utama devisa non migas, selain jumlah angkatan kerja, investasi, dan menjadi kebutuhan primair. Kegagalan dalam menyelesaikan masalahnya ditandai dengan meningkatnya PHK, penutupan perusahaan yang diikuti dengan keresahan sosial. Kondisi yang berkepanjangan menyebabkan bangsa Indonesia kembali menjadi negara konsumen. Hal ini dapat dihindari, mengingat kekayaan sumber daya alam (bahan baku), meningkatnya rata-rata pendidikan, ragamnya fasilitas pendidikan kejuruan serta kemampuan rekayasa dan rancangbangun industri pengolahan bahan baku TPT.

## **B. PERUMUSAN MASALAH dan PERTANYAAN PENELITIAN**

### ***Perumusan Masalah***

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan, dalam merumuskan permasalahan serta relevansinya dengan kepentingan nasional guna mewujudkan ketahanan ekonomi nasional melalui industri TPT, serta mengetahui preferensi konsumen, terutama sebab, akibat dan pengaruhnya bagi eksistensi negara, *maka rumusan permasalahannya adalah : Pemberdayaan Produk TPT Dalam Negeri dan dampaknya terhadap ketahanan ekonomi nasional*

### ***Pertanyaan Penelitian***

*Dari rumusan masalah tersebut, pertanyaan penelitian sebagai berikut*

- 1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi/menyebabkan pilihan konsumen terhadap produk dalam negeri;*
- 2. Sampai seberapa jauh usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pemberdayaan produk TPT dalam negeri ;*
- 3. Berapa besar devisa yang hilang akibat penggunaan produk impor dan dampaknya terhadap industri TPT dalam negeri.*
- 4. Relevansi TPT dan Ketahanan Ekonomi Nasional*

### **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

*Tujuan Penelitian,* ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pengembangan produk TPT dalam negeri
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pilihan konsumen terhadap produk dalam negeri
3. Mengestimasi keluarnya devisa akibat penggunaan produk impor

*Manfaat penelitian*, antara lain :

1. Bagi unit kerja (Departemen Perindustrian dan Perdagangan), terutama para perumus kebijaksanaan dalam menentukan strategi peningkatan kualitas, produk, produktivitas SDM dan daya saing pasar, setelah mengidentifikasi permasalahan.
2. Bagi Perusahaan TPT menjadi masukan untuk melihat apa yang menjadi preferensi konsumen dalam membeli produk TPT.

#### **D. METODOLOGI PENELITIAN DAN ANALISA DATA**

Tesis ini menggambarkan permasalahan asosiatif antara variabel bebas dengan variabel terikat, yang didukung dengan metode penelitian survei untuk mencari hubungan antar variabel. Metode analisisnya, kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mengkaji catatan-catatan kebijakan-kebijakan pemerintah dibidang TPT. Metode kuantitatif digunakan dalam hal menentukan preferensi konsumen .

## E. METODE ANALISA DATA

1. Untuk mencapai tujuan penelitian No. 1 digunakan data sekundair yang didapatkan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Biro Pusat Statistik dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia serta media informasi lainnya. Variabel yang diobservasi antara lain, digunakan jawaban responden dengan sampling error 5% besarnya (investasi, angkatan kerja, bahan baku, produksi baik untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor), kapasitas produksi, jumlah produsen (pabrik).
2. Untuk mencapai tujuan penelitian No. 2 digunakan AHP, dengan mempertimbangkan yang strukturnya dikonstruksikan seperti pada bagan No. 1 dibawah ini. Data yang digunakan adalah data primair, dan untuk menyaring data serta kemudian menganalisisnya, diawali dengan mengisi matriks berpasangan.

### Bagan No. 1

#### MATRIX BERPASANGAN

#### PREFERENSI KONSUMEN TERHADAP PRODUK TPT

Kriteria	Harga	Design	Model	Merek	Kualitas	Eigenc Vector
Harga						
Design						
Model						
Merek						
Kualitas						

Analytic Hierarchi process (Proses Hierarki Analitik), digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi dasar utama konsumen dalam menentukan pilihan terhadap produk dalam negeri. Metode analisa data ini digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang kompleks, dengan menstrukturkan suatu hierarkhi criteria. Berkaitan dengan kuesioner yang diberikan pada expert sebagai alat analisis AHP, digunakan sisteni ranking yang menilai pengaruh antara satu elemen faktor dengan yang lainnya. Setiap expert dapat memilih jawaban yang berada di sisi kanan, ataupun di sisi kiri menurut bobot kepentingannya dengan membandingkan tingkat prioritas kepentingan (antara 1 s.d 9) dari kedua elemen factor. Misalnya dengan :

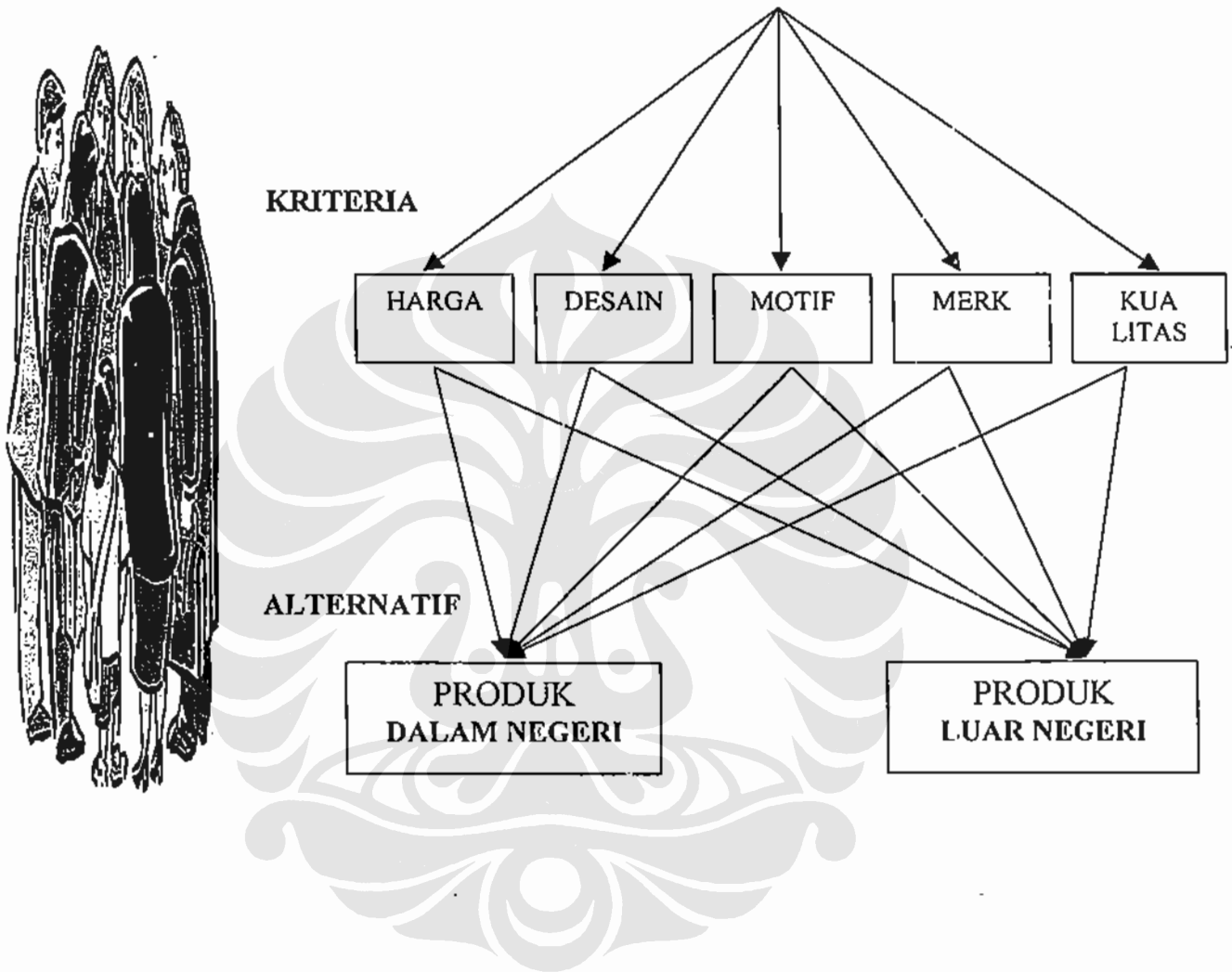
- a. Sama penting dengan skor = 1
- b. Sedikit lebih penting dengan skor = 3
- c. Lebih penting dengan skor = 5
- d. Sangat ebih penting dengan skor = 7
- e. Paling penting dengan skor = 9

Prioritas pilihan konsumen ditentukan dengan cara menghitung eigen vector dari matriks berpasangan jawaban expert adalah konsumen atau responden sebanyak 30 orang yang biasa membeli produk TPT dalam negeri dan luar negeri dengan strata social yang berbeda dan dilakukan secara acak atau insidental, gambarnya nampak pada halaman berikut. Adapun kuesioner secara lengkap ada pada lampiran.



Gambar No. 1

FOCUS : Penggunaan Produk Dalam Negeri



3. Untuk mencapai tujuan penelitian No. 3 yakni mengukur devisa yang hilang akibat menggunakan produk TPT impor, dilakukan dengan menganalisis data sekunder yang didapat dari jawaban responden dan media informasi lainnya.

## **F. SISTIMATIKA PENULISAN**

Penulisan tesis dikelompokkan dalam lima Bab dengan sistematika sbb :

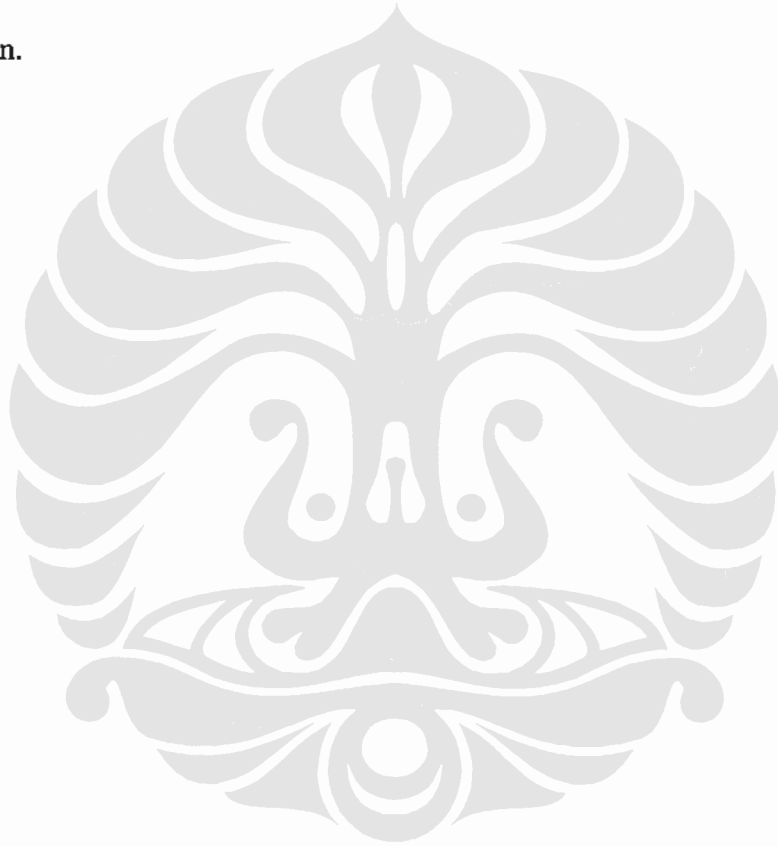
Pada bagian Pertama atau PENDAHULUAN, akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, Hipotesis dan Sistematika Penulisan.

Pada bagian Kedua atau LANDASAN TEORI, akan menguraikan pemikiran ke arah perkuatan perekonomian nasional, peranan Sikap dan Perilaku Konsumen dalam menentukan pilihan, peranan dunia usaha dalam menawarkan produk, Pilihan konsumen dan Pemasyarakatan Penggunaan Produk dalam Negeri, Penggunaan produk dalam Negeri dan Perekonomian Nasional

Pada bagian Ketiga atau DISKRIPSI ORGANISASI, yang menguraikan Sejarah Organisasi, struktur Organisasi, tugas dan fungsi Manajemen, Sumber Daya Manusia/Pembinaan Pegawai

Pada bagian Keempat atau HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN, yang menguraikan Karakteristik Responden, Pengukuran Sikap dan Perilaku, serta dampaknya terhadap ketahanan ekonomi nasional.

Pada bagian Kelima atau KESIMPULAN DAN SARAN, yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. KONSEP KEBIJAKSANAAN PUBLIK

Menurut idiologi, strategi dan perencanaan pembangunan Indonesia mengacu pada tiga tingkat nilai dasar yang harus dipedomani, yaitu Pancasila, UUD 1945 dan Garis-garis Besar haluan Negara (GBHN). Untuk mengakomodir keseluruhan sistem nilai dimaksud, penyelenggaraan tugas pemerintahan menjadi kebijaksanaan publik (substantial) sesuai dengan pokok masalahnya masing-masing. Kebijaksanaan publik dalam proses pembangunan memiliki berbagai dimensi, namun pada umumnya nilai-nilai kesejahteraan (ekonomi), transformasi sosial, pembangunan bangsa, keseimbangan manusia dengan lingkungannya dan manusia sebagai obyek, merupakan dimensi terakhir.

Secara teoritis, kebijaksanaan publik identik dengan kebijaksanaan negara seperti dikemukakan oleh Solichin Abdul Wahab dalam bukunya Analisis Kebijaksanaan Publik, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (2001:1) walaupun secara definisi tidak dapat dibakukan. Pakar lain Irfan M. Islamy dalam bukunya Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara (1997), mengemukakan definisi kebijaksanaan publik antara lain :

- a. suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah (Carl J. Friedrich)
- b. adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijaksanaan negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintahan (George C. Edward III dan Ira Sharkansky)
- c. kebijaksanaan negara adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah ( James E. Anderson)
- d. Pengalokasian nilai-nilai secara paksa (syah) kepada seluruh anggota masyarakat ( David Easton)

Kemudian Solichin Abdul Wahab mengemukakan, untuk memahami kebijaksanaan negara, kebijaksanaan dimaksud dipilah-pilah atau dikategorikan sebagai tuntutan kebijaksanaan, keputusan kebijaksanaan, pernyataan kebijaksanaan, keluaran kebijaksanaan dan hasil akhir kebijaksanaan. Adapun implikasi tertentu terhadap konsep kebijaksanaan negara, menurut Solichin Abdul Wahab (2001:6-7) seperti :

- a. Kebijaksanaan negara lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan
- b. Kebijaksanaan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri
- c. Kebijaksanaan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu
- d. Kebijaksanaan negara mungkin berbentuk positif, mungkin pula berbentuk negatif.

Rangkuman definisi, hakikat dan implikasi kebijaksanaan publik dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan korelasinya dengan judul tesis dapat disimpulkan, bahwa kebijaksanaan publik harus didukung oleh data dan informasi,

mencari, mengkaji, memberi alternatif dalam hal pemberian solusi, dan dilakukan secara multidisiplin. Pelaksanaan kebijaksanaan, diawali dengan pengkajian persoalan, penentuan tujuan, perumusan alternatif, penyusunan model, penentuan criteria, penilaian alternatif dan terakhir perumusan rekomendasi. Dalam pelaksanaan kebijaksanaan publik, dilakukan evaluasi meneruskan atau mengakhiri program, memperbaiki praktek dan prosedur administrasi (system), mengubah strategi dan teknik implementasi, mengalokasikan sumber daya ke program lain, mencrima atau menolak pendekatan/teori yang dipakai sebagai asumsi dari program.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi negara seperti dalam Pembukaan UUD 1945, kebijaksanaan dimplementasikan kepada tugas pokok dan fungsi setiap lembaga/institusi pemerintahan. Untuk itu, setiap produk hukum di Indonesia merupakan pengamalan Pancasila, dan secara utuh dapat mendukung tercapainya ulitamate goal dan strategi nasional (F.M. Parapat Catatan Kuliah 2002-2003). Keseluruhannya seperti tercantum didalam pembukaan UUD 1945, masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, serta Pemerintah yang :

- Melindungi seluruh tanah air, bangsa dan rakyat
- Memajukan kesejahteraan umum seluruh rakyat
- Meningkatkan kecerdasan bangsa dan seluruh rakyat
- Meningkatkan peran dalam penertiban dunia

Berkaitan dengan Pembukaan UUD 1945 dimaksud, pada batang tubuh diatur hak dan kewajiban masyarakat seperti Pasal 27 UUD 1945 (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 30 (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara, dan kemudian Pasal 33 ayat (3) : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran.

Memperhatikan definisi, hakikat dan tujuan kebijaksanaan negara, implementasinya di negara-negara berkembang menurut Grindle (F..M. Parapat Catatan Kuliah 2002-2003), lebih banyak menemui kegagalan, karena dinamika politik yang terpusat, dan tingkat partisipasi masyarakat peluangnya rendah. Disamping itu, kelompok atau golongan masyarakat yang bersifat/bersikap oposisi kurang efektif dalam mengikuti/mencermati setiap proses kebijakan, sehingga peran pemerintah sangat dominan, dan lembaga DPR subyektivitasnya belum signifikan dengan fungsinya sebagai wakil rakyat karena masih menjadi wakil partai.

## **B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PREFERENSI KONSUMEN**

Dalam konteks preferensi konsumen terhadap produk TPT, secara konseptual perlu diketahui keinginan konsumen dalam proses menentukan pilihan, berupa sikap dan perilakunya. Pembentukan sikap dibentuk oleh affective (perasaan), behavior

(perilaku) dan cognitive (kesadaran), dan definisi perilaku konsumen menurut James Engel (dkk) dalam bukunya Perilaku Konsumen (1995:47) adalah sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini. Menurut Wan Usman (Synopsis Pemasaran ttp) adalah suatu tingkat perasaan seseorang terhadap suatu barang/jasa sebagai hasil dari membandingkan kinerja suatu produk/jasa tadi terhadap harapannya terhadap produk/jasa itu.

Perilaku konsumen terwujud dalam proses budaya yang menggambarkan pemahaman terhadap fenomena dan bagaimana proses interaksinya, sekaligus cara pandangnya dan mentransformasikannya dengan nilai-nilai yang terkandung pada produk dimaksud . Perilaku konsumen sesungguhnya dapat berubah, bila produk atau jasa yang ditawarkan didesain untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Metode untuk mengukur kepuasan konsumen menurut Wan Usman (Synopsis Pemasaran ttp) dapat dilakukan melalui informasi Sistem keluhan dan saran yang diminta pada pelanggan, melalui survey, ghost shopping dan lost customer analysis

Kepuasan, sebagai sikap seseorang terhadap pilihan, merupakan selisih antara banyaknya manfaat yang diterima seseorang dari yang seharusnya. Abraham Maslow dalam menyusun teorinya mengenai hierarchy of needs, menunjukkan relevansi dari kebutuhan fisiologis sampai self actualization, dan pada self actualization factor sikap dan perilaku serta kepuasan akan nampak. Pilihannya



terhadap produk TPT, dikaitkan dengan Merk dan harga sebagai jatidirinya dan menjadi gaya hidup (menghabiskan waktu/uang untuk kepuasannya).

Dalam konteks perilaku konsumen, Philip dan Carolyn Watkins seperti dikutip James Engel (1994: 52-53) mendefinisikan sikap (attitude) sebagai evaluasi menyeluruh yang memungkinkan orang berespons dengan cara menguntungkan atau tidak menguntungkan secara konsisten berkenaan dengan obyek atau alternatif yang diberikan. Sidney Levy menyatakan, benda yang dibeli : mempunyai makna pribadi dan sosial selain fungsinya. Copeland (1994:50) menyatakan adanya sifat simbolis terhadap suatu benda yang berada diluar pertimbangan rasional atau ekonomi. Barang modern dikenali sebagai benda psikologis, sekaligus symbol dari sifat utama dan tujuan pribadi maupun symbol perjuangan social seperti penggunaan produk-produk TPT impor (E.Eigner, Versace, Christien Dior, Pier Cardin, Kenzo, Armani, Mark & Spencer), menjadi konsumsi golongan masyarakat menengah atas.

Dari pemikiran Pakar di atas, preferensi konsumen memiliki nilai yang mengikat manusia dengan lingkungannya yang ditandai dengan eksistensi pribadi, sebagai wujud dari perbedaan pribadi. Secara umum, perbedaan individu yang melahirkan sikap dan perilaku dipengaruhi faktor-faktor sumber daya konsumen (ekonomi), motivasi dan keterlibatan, gaya hidup, pendidikan dan pengetahuan dan factor demografi, asal pembentukan sikap dan perilaku. Dari perbedaan individu dengan komunitasnya, melahirkan kelas sosial (konsumtif). Faktor-faktor determinan dalam pembentukan kelas social antara lain *ekonomi* (pendapatan, pengeluaran,

pekerjaan dan investasi), *interaksi sosial* (prestise pribadi, asosiasi dan sosialisasi) *dan politik* (kekuasaan, jabatan, aksesibilitas).

Disamping faktor – faktor di atas, Wan Usman (Synopsis Pemasaran ttp) menggambarkan sesuatu benda yang dikonsumsi (beli) dikaitkan dengan karakter dari benda dimaksud sesuai dengan perannya (needs, wants dan demand) sebagai kebutuhan pokok. Rangkuman pemikiran di atas dan korelasinya dengan preferensi konsumen produk TPT, keterkaitan antara nilai, biaya dan kepuasan merupakan jawaban konsumen terhadap produk TPT sejenis yang diperolehnya di Pasar. Proses dimaksud, menjadi bagian dari marketing atau manajemen pemasaran.

Preferensi konsumen produk TPT, dasar utamanya system nilai konsumen, dan menurut Wan Usman (Synopsis Pemasaran ttp) adalah akumulasi total nilai yang diperoleh konsumen (produk, service, personal dan image), serta total nilai ekonomi yang dikeluarkannya (monetary, time, energy dan psycsic cost). Tanggungjawab produsen semakin kuat dengan tuntutan standarisasi dan perlindungan konsumen. Paradigma pemasaran, kepuasan menjadi utama dan produk bersifat emosional, masih relevan, pangsa pasarnya semakin berkurang terkecuali status symbol. social.

## **2. Peranan Dunia Usaha Dalam Menentukan Pilihan**

Kemampuan Pelaku usaha memanfaatkan kebutuhan TPT untuk meraih keuntungan, dipengaruhi berbagai aspek yang berinteraksi dengan konsumen.

Pertumbuhan perekonomian suatu negara, distribusi pendapatan dan pendidikan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat terhadap suatu produk. disamping kualitas dan teknologi produk serta akulturasi budaya untuk memenangkan persaingan. Keunggulannya, menghilangkan hambatan transportasi (distribusi) dan ketergantungan sumber daya alam. Faktor lainnya, kepastian dan konsistensi hukum dalam hal pasokan barang (impor), mengingat adanya ketimpangan antar negara.

Bagi produsen produk-produk TPT dalam perluasan pasarnya, relevansinya signifikan dengan pemikiran M. Todaro dalam bukunya Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (1995:128), yakni secara kondisional harus memahami segment market, proses pembangunan dan prospeknya, dengan memperhatikan :

- a. Kekayaan sumber daya manusia dan fisik
- b. Pendapata per kapita dan tingkat GNP dibandingkan dengan negara-negara lainnya
- c. Iklim
- d. Jumlah penduduk, distribusi dan pertumbuhannya
- e. Peranan sejarah migrasi internasional
- f. Keuntungan perdagangan internasional
- g. Kemampuan melakukan penelitian dan pengembangan dalam bidang ilmiah dan teknologi dasar
- h. Stabilitas dan fleksibilitas lembaga-lembaga politik

Disamping faktor-faktor sosiologis dan psikologis, pembentukan pilihan konsumen terhadap PPDN khususnya Produk TPT, ditentukan kemampuan dunia usaha memasarkan produknya dengan variabel psycograpie, demography dan geograpie dan perilaku konsumen. Focus kajiannya, informasi rata-rata kebutuhan pemakaian, tingkat kesediaan, loyalitas pada merk, harga sekaligus penyusunan

model pelayanan dan promosinya. Mengidentifikasi kebutuhan konsumen, merupakan hal yang strategis, dengan memusatkan usaha-usaha pemasarannya melalui berbagai media yang tersedia sesuai dengan karakteristik konsumen.

Untuk itu produsen tidak pernah berhenti, dan menjadikan pilihan konsumen sebagai prioritas guna mewujudkan kepuasannya. Pendekatan ekonomi dengan mengadopsi pendekatan physo-social membuat ketergantungan konsumen terhadap produsen. Faktor internal perusahaan menurut Wan Usman (Synopsis Pemasaran ttp) dapat diidentifikasi dari :

- a. What is our business ?
- b. Who is the customer ?
- c. What is the value to the customer ?
- d. What will our business be ?
- e. What Sould our business be ?

Disamping indicator di atas, misi suatu perusahaan selain upaya profit motif, menurut Wan Usman (Synopsis Pemasaran ttp), antara lain dipengaruhi :

- a. History
- b. Current preferences of the owners
- c. The market environment
- d. Organization's resources
- e. Distintive competences

Berkaitan dengan misi dan tujuan perusahaan yang bergerak di bidang industri TPT serta kuatnya model penawaran atau promosi dari pelaku usaha, maka kepada konsumen dianjurkan dalam setiap pembelian untuk :

- a. Konsumen mengetahui/mempelajari akan kebutuhannya
- b. Semakin tumbuh pemenuhan kebutuhan, baik yang logis maupun emosional
- c. Semakin menguatnya sistem branding, sebagai symbol suatu produk (kepercayaan dan kebanggaan)
- d. Menyadari hak-haknya sebagai konsumen
- e. Mengetahui komposisi bahan-bahan yang digunakan agar sesuai atau sebanding dengan biaya yang dikeluarkan

### **C. KEBIJAKSANAAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI LANDASAN PERKUATAN PEREKONOMIAN NASIONAL**

Kurang kuatnya landasan fundamental perekonomian, pengelolaan moneter, fiskal, R&D dan fluktuatifnya harga migas, menstimuli pemerintah untuk mencanangkan ekspor non migas untuk perkuatan perekonomian nasional. Pengurangan proteksi dan penguatan kebijakan ekspor, diikuti dengan meningkatkan peran institusi perindustrian dan perdagangan dengan program pengembangan industri dan mesin, penguasaan teknologi dan SDM untuk menyusun keunggulan kompetitif dan komparatif.

Berhasilnya pemerintah menarik investor asing didukung UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) serta adanya orientasi pertumbuhan dalam pembangunan perekonomian nasional (economic centris). Pemikiran-pemikiran baru yang relevan dengan essensi bantuan atau PMA, yaitu dimensi filosofis atau ideologis yang dilandasi perkuatan perekonomian nasional melalui

penggunaan produk dalam negeri. Menurut M. Todaro dalam bukunya *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Jilid II* (1995:125) antara lain :

- a. Walaupun dampak pertama dari penanaman modal perusahaan multinasional ialah memperbaiki posisi cadangan devisa negara yang menerima mereka, namun dalam jangka panjang dampaknya justru dapat mengurangi penghasilan/cadangan devisa baik dari sisi perkiraan transaksi berjalan maupun perkiraan modal. Neraca perdagangan bisa bertambah buruk karena adanya impor besar-besaran barang setengah jadi dan barang modal dan akan semakin parah karena adanya pengiriman kembali keuntungan hasil bunga, royalty, dan biaya jasa-jasa manajemen ke luar negeri.
- b. Keterampilan manajemen, kewiraswastaan, teknologi dan hubungan dagang luar negeri yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan multinasional mungkin mempunyai dampak yang kecil saja bagi pengembangan sumber daya dan keterampilan yang langka di dalam negeri. Bahkan mungkin mereka akan menghambat perkembangannya dengan melemahkan tumbuhnya semangat kewiraswastaan di dalam negeri karena begitu kuatnya pengaruh perusahaan multinasional di pasaran dalam negeri.

## **1. Pemikiran ke Arah Penggunaan Produk Dalam Negeri**

Melalui Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN, Pemerintah mewajibkan seluruh Lembaga atau institusi Pemerintah (Departemen/ Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD) agar menggunakan produk dalam negeri, sepanjang telah dapat diproduksi di dalam negeri. Berdasarkan Keputusan Presiden dimaksud, dalam penggunaan produk dalam negeri perlu memperhatikan :

- a. dalam syarat pengadaan barang dan jasa dimuat secara jelas ketentuan-ketentuan penggunaan hasil produksi dalam negeri
- b. dalam menggunakan pengadaan barang dan jasa diteliti sebaik-baiknya agar benar-benar merupakan hasil produksi dalam negeri dan bukan barang impor yang dijual di dalam negeri
- c. dalam hal sebagian bahan untuk menghasilkan barang produksi dalam negeri berasal dari impor, diutamakan barang yang komponen impornya paling kecil
- d. dalam mempersiapkan pengadaan barang dan jasa, sejauh mungkin harus digunakan standar nasional dan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.

Dukungan pemerintah dalam rangka memperkuat dunia usaha nasional belum dapat optimal, dikaitkan dengan kemampuannya yang terbatas (teknis dan cultural), dan masih berorientasi pada pola-pola tradisional. Kegiatan usaha yang dilakukan hanya untuk memenuhi sandang dan papan, dan tidak merupakan bagian dari pengembangan kreativitas dan inovasi dari setiap produk yang dihasilkan. Untuk itu, dunia usaha nasional tidak dapat menghindari masuknya bahanbaku/produk impor dalam memproses produk dalam negeri. Menghadapi kondisi dimaksud, produk impor dapat digunakan jika :

- a. barang tersebut belum diproduksi di dalam negeri, dan/atau
- b. spesifikasi teknis barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan atau waktu penyerahannya tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, dan atau;
- c. harga penawaran produksi dalam negeri melebihi preferensi harga yang telah ditetapkan di atas harga barang impor.

Disisi lain negara maju memanfaatkan ketidakseimbangan faktor-faktor determinan dengan kekuatan/instrumen permodalan, kekayaan alam, R&D, dan SDMnya. Produsen membuat produk yang bermutu, sehingga mampu mengorganisir selera konsumen sehingga melewati batas-batas rasionalnya untuk memasuki kelas

sosial tertentu. Disamping itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan timbul berbagai perbedaan dalam hal menafsirkan aturan, akibat perubahan tatanan politik dunia.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. Kep 27/MK-3/8/1994 dan No.166/Ket/8/1994 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No.16 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Telah ditetapkan kebijakan dan pengertian umum mengenai penggunaan produk dalam negeri. Penjelasan adalah,

- a. *segala jenis barang* yang dibuat/dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan industri di dalam negeri; barang yang terdiri atas
  - barang jadi, barang setengah jadi, peralatan, suku cadang, komponen utama, dan komponen pembantu
  - bahan baku, bahan pelengkap, dan bahan pembantu
- b. *segala jenis jasa* yang dibuat/dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan jasa di dalam negeri.
  - jasa konstruksi yang meliputi segala kegiatan konstruksi sipil, mesin (mekanikal), listrik dan sebagainya
  - jasa konsultasi ( segala kegiatan) penyediaan jasa sebelum konstruksi, seperti pekerjaan persiapan (survei), perencanaan (feasibility study, master plan) perancangan (design), perekayasa (engineering), penyediaan jasa pada saat konstruksi (pemasangan, pengelolaan proyek dan pengawasan), penyediaan jasa tahap operasional (pengujian, perawatan, manajemen, akuntansi, pembinaan, pendidikan dan pelatihan), termasuk jasa-jasa tidaklangsung yang berhubungan dengan proyek konstruksi seperti analisis dan evaluasi. Disamping itu jasa rekayasa dan



rancangbangunindustri, jasa penelitian dan jasa angkutan, jasa pengurusan, jasa asuransi.

Untuk memperkuat kemampuan usaha nasional dan menjadi Tuan di negeri sendiri, diperlukan penambahan kandungan lokal agar tidak ketergantungan dengan produk impor. Kandungan lokal dalam Surat Keputusan Bersama dimaksud adalah :

- a. Kandungan lokal barang adalah nilai isian lokal barang yang pembuatannya dilakukan di Indonesia dengan menggunakan bahan baku dan rancangbangun Indonesia
- b. Kandungan lokal jasa adalah nilai isian lokal jasa yang dilakukan di Indonesia dengan menggunakan tenaga ahli dan buah pikiran/perangkat lunak Indonesia
- c. Kandungan lokal proyek adalah jumlah atau gabungan dari kandungan lokal barang dan kandungan lokal jasa dalam suatu proyek.

Untuk itu, berbagai upaya dilakukan Pemerintah untuk mempertinggi kandungan lokal (bahan baku) yang dapat dibuat/diproses atau direkayasa di dalam negeri. Kapas sebagai bahan baku utama TPT dan sebagian besar impor, pada prinsipnya menambah beban ekonomi pelaku usaha, dan pada akhirnya menjadi biaya konsumen. Kemampuan dan kemajuan teknologi utamanya rekayasa genetika telah ditemukan untuk memperkuat species komoditi (kapas), sehingga memiliki tingkat kekebalan terhadap jenis penyakit, hasilnya di atas produk rata-rata jenis sebelumnya termasuk nilai ekonomisnya, namun masih menjadi polemik .

Dalam rangka memperkuat struktur industri TPT serta meningkatkan nilai tambah dan kesempatan kerja, diupayakan peningkatan jaringan industri TPT nasional, yang meliputi penyediaan bahan baku, penguasaan IPTEK dan perluasan

akses pasar, serta rekayasa dan rancangbangun industri permesinan. Lokasi industri tekstil kemudian diarahkan ke daerah-daerah di luar P. Jawa dengan berorientasi pada bahan baku, penyerapan angkatan kerja, alih teknologi melalui pemintalan di daerah Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi (Tenggara dan Selatan), serta Sumatera Selatan yang mempunyai potensi pengembangan bahan baku baik untuk serat polynestic maupun sintetis.

Untuk mencapai sasaran kemandirian, kebijaksanaannya : bertahap mengurangi ketergantungan bahan baku, bahan penolong, permesinan dan suku cadang (impor). Keperluan tersebut akan dipenuhi dari dalam negeri dengan pemanfaatan kapasitas terpasang yang ada, peningkatan penggunaan hasil industri permesinan dan hasil industri suku cadang, peningkatan mutu hasil produksi, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Kondisi ini berkaitan dengan kemampuan daya saing Indonesia yang berdasarkan World Competitiveness Yearbook, pada tahun 1997-2001 berada pada posisi 38,40,47,44 dan 49. Sementara Singapura pada Tahun yang sama pada No. 2 dibawah USA. Pesaing Indonesia seperti Malaysia (14,19,28,27,29) dan Thailand (31,41,36,35,38).

Dampak yang diharapkan, produksi dalam negeri mampu bersaing di pasar dalam dan di luar negeri, sehingga meningkatkan penerimaan devisa negara melalui usaha kemitraan guna meningkatkan keterkaitan antara industri besar, menengah dan kecil. Untuk mengoptimalkan dunia industri nasional, secara bertahap peningkatan keterampilan melalui kegiatan pendidikan formal dan informal terus dikembangkan

untuk peningkatan penyediaan lapangan kerja, dengan penambahan investasi secara selektif pada sektor yang mampu menyerap tenaga kerja relatif banyak. Sasaran ini berkaitan dengan kondisi perekonomian masyarakat, serta besaran kemiskinan yang disebabkan rendahnya peluang usaha, kesempatan dan serta distribusi pendapatan.

Untuk itu pada Tahun 1978-1983, pemerintah mengenalkan Program Trilogi Pembangunan dengan memasukkan unsur pemerataan sebagai solusi atas adanya kesenjangan pendapatan, walaupun secara nasional pendapatan meningkat. Dengan demikian, indikator utama keberhasilan pembangunan adalah bagaimana pendapatan didistribusikan kepada penduduk dalam arti yang menerima sesuai klasifikasi sosialnya. Indonesia sebagai negara berkembang, menurut M. Todaro dalam bukunya *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (1995:28), ditandai dengan :

- a. Standar hidup yang rendah
- b. Produktivitas yang rendah
- c. Tingkat pertumbuhan penduduk dan beban ketergantungan yang tinggi
- d. Tingkat pengangguran yang tinggi dan meningkat terus serta kekurangan pekerjaan
- e. Sangat tergantung pada produksi pertanian dan barang ekspor primair
- f. Dominasi ketergantungan dan kepekaan yang besar dalam hubungan internasional.

Berdasarkan kajian organisasi Tekstil Internasional, bahwa perdagangan TPT (serat, benang, kain, garment dan tekstil lainnya) dunia meningkat secara berarti sejak Tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, dan kemudian menurun secara tajam pada tahun 1998 dan 1999 sehingga membawa perubahan berarti Indonesia dalam menyusun instrumen perekonomian nasional. Total perdagangan TPT dunia Tahun

1999 sebesar US\$ 334 Milyar dengan komposisi untuk tekstil US\$148 Milyar dan garmen sebesar US\$ 186 Milyar, persebarannya ikut mempengaruhi tumbuhnya perekonomian suatu negara. Berdasarkan Indonesian textile magazine Periode Mei-June 2002, posisi Indonesia sebagai negara pengekspor produk tekstil No. 12 di dunia dengan nilai ekspor 3,86 US\$ Milyar, sementara asset untuk mendukung industri TPT pada Tahun 1999 – 2001 sebesar 7,2 – 8,2 US\$ Milyar.

Kondisi ini sejalan dengan pemikiran bahwa perdagangan luar negeri dapat menjadi stimulan bagi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Pada umumnya dunia ketiga tidak mendapat perolehan yang seimbang diakibatkan sistem perdagangan (perpajakan, produktivitas dan efisiensi). Sebagai pilar utama ekspor non migas, turunnya ekspor TPT Indonesia ke Pasar Amerika, antara lain kemajuan industri sejenis di Kawasan Amerika Latin dan peristiwa serangan ke WTC 2001, dan Bali 12 Oktober 2002. Kulminasinya, menjadi gangguan sosial yang dapat berubah menjadi chaos. Asumsi ini sangat signifikan dengan laporan Indonesian Textile magazine periode June-July 2002, bahwa 40 Pabrik TPT merugi dan 70 Pabrik lainnya diragukan aktivitasnya.

Sejalan dengan pemikiran M. Todaro dalam bukunya Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (1995:91), bahwa suatu fungsi dasar dari semua kegiatan ekonomi adalah, untuk melengkapi sebanyak mungkin orang dengan alat-alat yang dapat mengatasi keputusasaan dan kesengsaraan dari kurangnya pangan, papan, kesehatan dan perlindungan. Berdasarkan uraian di atas, industri TPT nasional a.l. memiliki :

1. Pasar yang semakin meluas (manca negara)
2. Beberapa produk nasional telah memiliki mage atau brand name yang dapat distandarkan dengan merek-merek terkenal
3. Tersedianya tenaga kerja (kuantitas) yang dapat didayagunakan setelah melalui alih teknologi melalui lembaga-lembaga pendidikan tinggi serta lembaga-lembaga keterampilan (designer, art grapics)
4. Tersedianya bahan baku
5. Jumlah penduduk yang relatif besar yang sekaligus menjadi pasar domestik

## **2. Pemasyarakatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**

Seperti dikemukakan sebelumnya, upaya PPDN telah dilakukan Pemerintah walaupun tidak berkesinambungan dalam arti adanya institusi yang secara khusus melaksanakan tugas dan fungsi PPDN. Upaya dimaksud diawali dengan penetapan Peraturan terhadap produk-produk barang-barang impor, dengan menetapkan tarif biaya masuk beberapa komoditi, proteksi dan subsitusi impor. Secara institusional, amanat dimaksud dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen untuk mencanangkan PPDN dalam skala nasional.

Keberhasilan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal, bahkan penggunaan produk impor TPT (bekas) semakin marak yang ditandai dengan tumbuhnya Pasar-pasar Produk TPT impor (bekas) melalui Singapura dan Kepulauan Riau. Dampaknya (tekstil impor

ilegal) mempengaruhi segment produk TPT dalam negeri a.l, mematikan produsen, perdagangan tidak adil. Untuk itu Menteri Perindustrian dan Perdagangan telah menerbitkan SK Nomor 732/MPP/Kep/10/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang melarang kegiatan sejenis, walaupun harga dan kualitasnya lebih memadai. Dalam konteks national and character building serta meningkatkan ketahanan ekonomi nasional, model usaha produk TPT impor bekas harus dihilangkan.

Diterbitkannya kebijaksanaan nasional guna mendukung PPDN pada berbagai produk, dilakukan dengan pendekatan hukum dan sosial agar iklim usaha tetap kondusif. Masalah atau kendala yang dihadapi adalah, kebijakan tersebut tidak mendapat respons positif dari masyarakat, walaupun masyarakat mengetahui manfaat yang akan diperolehnya. Adanya mis-komunikasi antara Pemerintah dengan Masyarakat disebabkan beberapa faktor, a.l:

- a. Kebijakannya langsung pada skala nasional, sedangkan instrumennya kurang memadai
- b. Kurangnya sosialisasi, sehingga masyarakat tidak mendapat informasi yang cukup
- c. Media yang digunakan tidak sesuai dengan sosiokultural masyarakat
- d. Kebijakannya diterbitkan tidak pada waktu yang tepat, sehingga target institusi dan fasilitatornya kurang tepat
- e. Tahapan kebijakan, sehingga tidak jelas siapa yang membutuhkan

Untuk mengubah sikap dan perilaku seperti yang diinginkan, pemerintah dapat merujuk pada pemikiran Pakar manajemen James Rigg dengan model AIM (awarness, improvement dan maintenance). Dalam konsep AIM, yang perlu diketahui adalah pada **tahapan A** (awarness) adalah sosialisasi dengan tujuan untuk

merangsang dan menyadarkan perilakunya sehingga ada auditing dalam dirinya. Pada **tahapan I** (improvement), merupakan tindak lanjut dari awareness, tentang hal-hal yang perlu diketahui terhadap produk seperti total quality control dan quality control circuit. Dengan demikian dapat dilanjutkan dengan **tahapan M** (maintenance) berupa monitoring dan measurement (pengukuran) terhadap produk dan kebijakan yang diterbitkan.

Langkah strategisnya ialah mengidentifikasi berbagai peristiwa/masalah/problem yang berkembang di masyarakat serta kepentingan pemerintah terhadap kebijakan yang akan diterbitkan. Banyaknya peristiwa/masalah/problem yang tumbuh dan berkembang, serta melibatkan masyarakat, dan memberikan dampak ekonomis bagi semua lapisan, ternyata tidak mengkrystal. Disisi lain, kebijakan yang kurang memberi manfaat bagi masyarakat justru dipaksakan untuk menjadi acuan, sehingga masyarakat berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Terbitnya kebijakan PPDN, dapat berasal dari peristiwa/masalah/problem pribadi, kemudian menjadi peristiwa/masalah/problem masyarakat, yang diawali oleh peristiwa/masalah/problem umum. Kemudian menjadi issues, dan agenda pemerintah.

Untuk itu, perubahan yang mendasar dan menyeluruh agar dapat lebih efektif guna menyinkronkan PPDN, dan merujuk pada pemikiran Yehezkel Dror, penganut kebijakan model rasional komprehensif, bahwa untuk setiap perumusan kebijakan didalamnya harus terkandung muatan :

1. Memilih alternatif kebijaksanaan yang paling efisien. Mengetahui semua nilai-nilai utama yang ada pada masyarakat
2. Mengetahui semua alternatif-alternatif kebijaksanaan yang tersedia
3. Mengetahui semua konsekuensi-konsekuensi dari setiap alternatif kebijaksanaan
4. Menghitung rasio antara tujuan dan nilai-nilai sosial yang dikorbankan bagi setiap alternatif kebijaksanaan
5. Memilih alternatif kebijaksanaan yang paling efisien.

Fenomena kebijaksanaan PPDN bukan menjadi masalah-masalah negara berkembang, namun menjadi masalah utama negara-negara besar seperti Jepang dan Amerika, sehingga Amerika Serikat menetapkan model imbal beli bagi setiap produk Jepang yang dikonsumsi masyarakatnya. Keberhasilannya model PPDN nampak di Kawasan Asia Timur seperti Jepang, Korea dan Taiwan yang terkenal sebagai negara New Industrial Countries (NIC's). Strateginya dikaitkan dengan hal-hal yang spesifik dalam berbangsa dan bernegara, dengan sistem nilai yang berkembang pada masyarakatnya dan kemudian berkembang menjadi doktrin.

Kajian Robert N. Bellah (1992) di Jepang, psycososial masyarakatnya dapat diimplementasikan di Indonesia. Robert N. Bellah melihat keberhasilan kegiatan (kebijakan) perekonomian Jepang diawali dengan kuatnya ikatan emosional (interaksi) pemerintah dengan masyarakatnya, berkaitan merekatnya nilai-nilai agama terhadap etika ekonomi, pranata politik dan pranata keluarga, sehingga setiap aktivitas SDMnya melekat dengan nilai-nilai dimaksud. Hal ini dapat diadopsi sesuai dengan kultural Indonesia dengan nilai-nilai relijiusnya, maupun nilai-nilai lokal seperti adat istiadat melalui media Pimpinannya dengan pola Paternalistik (lokal).



Dengan demikian, perlu penyusunan agenda pemerintah agar kebijakan PPDN secara nasional menjadi optimal sejalan dengan Tahun 2003 sebagai Tahun PPDN.

Melihat ragamnya produk TPT yang beredar di pasar terutama produk-produk impor untuk memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat tertentu, memberi ruang dalam pendekatan teoritis seperti yang dikemukakan James F Engel (dkk). Perilaku konsumen nampak dalam benda-benda yang dibeli, umumnya dipandang mempunyai makna pribadi dan sosial selain fungsi mereka. Barang modern dikenali sebagai benda psikologis, sebagai simbol dari sifat dan tujuan pribadi, sebagai simbol dari pola dan perjuangan sosial. Selanjutnya dikemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi dan membentuk perilaku dalam proses keputusan antara lain :

- a. Pengaruh lingkungan ( budaya, kelas sosial, pengaruh pribadi, sikap dan situasi)
- b. Perbedaan individu ( sumber daya konsumen, motivasi dan keterlibatan, pengetahuan, sikap dan kepribadian, gaya hidup dan demografi)
- c. Pengaruh Psikologis ( pengolahan informasi, pembelajaran dan perubahan sikap dan perilaku).

### **3. PPDN dan Ketahanan Perekonomian Nasional**

Pertumbuhan dan dinamika perekonomian dunia pasca persetujuan GATT dan WTO khususnya bagi Indonesia, maka seluruh potensi bangsa yang dimiliki, diberdayakan seperti sistem perdagangan, pangsa pasar yang dimiliki, hubungan

internasional, keanggotaan dalam kawasan maupun organisasi-organisasi tingkat dunia (OKI, GNB). Potensinya terus dikembangkan untuk mendapatkan efisiensi guna memenangkan persaingan, seperti dilakukan pesaing lainnya. Hal ini menjadi strategis dengan hasil kajian berbagai institusi pengkajian internasional (PERC), yang menunjukkan daya saing bangsa, berada di bawah anggota negara-negara ASEAN (Malaysia, Singapura, Brunai, Thailand, Philipina, Kamboja dan Vietnam), sebagai wujud meningkatkan ketahanan nasional negara dan bangsanya.

Seperti bangsa-bangsa lainnya, Indonesia memiliki konsepsi Ketahanan Nasional sebagai pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara secara utuh. Disamping itu, tujuan negara menuntut ketahanan nasional yang memiliki daya tangkal, untuk menghadapi berbagai masalah yang berkembang, dan digunakan secara ilmiah dengan menggunakan metode yang tersistematis.

Pemikiran pakar lain dan menjadi rujukan bagi negara untuk mengukur ketahanan nasional menurut F.M Parapat (CatatanKuliah 2002-2003) antara lain Ray S. Cline ( Cr+M+E) (St +W) yang melibatkan sinergi antara Demographi, Militer, Ekonomi, Strategi dan Kemauan nasional atau tekad rakyat). Pakar lain Morgenthau dalam rumusannya menuntut kemampuan Geographi, Sumber daya alami, Industri, Militer, Demographi, Karakter Nasional, Moral Nasional dan Kualitas Diplomasi. Sedangkan Berzezinski , kekuatan militer yang siap, Ekonomi, Teknologi dan

Budaya Bangsa. Untuk mewujudkan ketahanan nasional diperlukan strategy, dan menurut F.M. Parapat (Catatan Kuliah 2002-2003) dalam pelaksanaan strategy rumusannya adalah **Strategy = Ways + Means + Ends** -

Dengan demikian strategi pemberdayaan industri TPT dengan produk tanaman pertanian, harus diprioritaskan sesuai dengan karakteristik lahan yang dapat digunakan bagi pemenuhan pasokan bahan baku. Keuntungannya, perekonomian petani menjadi siklus, karena masyarakatnya telah melakukannya (kebiasaan) dan produknya memiliki nilai tambah. Pencapaiannya ditentukan sinerjitas kebijakan (Pemerintah Pusat dan Daerah), sehingga memberi dampak ekonomis bagi masyarakatan PPDN. Lebih strategis, masyarakat berperan luas dalam berbagai kebijakan pemerintah, jika kegiatan itu merupakan bagian utama dari peningkatan kesejahteraannya. diawali perhitungan potensi pasar dalam negeri, pengembangan IPTEK dan R & D, untuk mendukung perkiraan kebutuhan.

Ketergantungan selama ini akibat kurang terpadunya teknologi dan sumber daya alam dalam merefleksikan konsepsi BERDIKARI, agar sejajar dengan bangsa lain. Hal ini dapat dicapai, jika pembangunan sesuai dengan karakteristik bangsa. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berimbang pada ketahanan ekonomi nasional, menurut Bambang Sudibjo (1995:131) dalam buku Sumbangan Ilmu-Ilmu Sosial terhadap ketahanan Nasional, perlu tercipta kondisi seperti, adanya :

- a. Stabilitas ekonomi
- b. Kohesivitas atau tingkat integrasi ekonomi
- c. Ketahanan sistem ekonomi terhadap guncangan dari luar sistem ekonomi

- d. Margin of safety dari garis kemiskinan
- e. Keunggulan kompetitif produk-produk ekonomi nasional
- f. Pertumbuhan
- g. Kemantapan ekonomi dari segi besarnya (size) perekonomian
- h. Tingkat integrasi ekonomi nasional dengan ekonomi global

Dalam hal teknologi, perlu disiapkan ketersediaan SDM yang berkualitas dan searah dengan tujuan pembangunan (tahapannya), pengelolaan SDA yang sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan, serta anggaran yang diperlukan. Manfaatnya, eksploitasi maupun eksplorasinya terkontrol, dan berkesinambungan, sehingga hasil pembangunan mampu menjadi landasan pembangunan berikutnya.

Untuk itu, bangsa yang mandiri dan maju ditandai dengan makin tingginya tingkat pendidikan, kesehatan dan pertumbuhan serta diikuti semakin meratanya distribusi pendapatan. Hal ini memiliki relevansi dengan varian atau indikator yang digunakan Lembaga Pertahanan Nasional (1999) untuk mengukur ketahanan nasional di bidang perekonomian. Adapun variannya adalah : Tenaga kerja dan lapangan kerja, Modal, Iptek, Manajemen, Pertanian dan Pangan, Perindustrian dan Perdagangan, Prasarana dan Sarana (komunikasi dan transportasi), Moneter dan Neraca pembayaran.

Keunggulan yang dimiliki untuk mengolah TPT sebagian besar merupakan produk impor (utama dan pendukung) dan menjadi bagian terbesar adalah impor mesin dan bahan baku. Kondisi ketergantungan ini berkaitan dengan kemampuan IPTEK yang dimiliki serta R&D yang dikembangkan. Memperhatikan kontribusi

TPT terhadap ekspor non migas pada periode Tahun 2000an yang rata-rata di atas 12,5 % menunjukkan kemajuan berarti dibandingkan dengan sektor lainnya.

Merujuk pada perkembangan industri TPT Indonesia, kilas baliknya kerajinan rakyat pada zaman Hindu baik untuk kebutuhan busana maupun ritual seperti kain-kain tradisional Batik, Songket, Kain Tapis, Ulos dan Sasirangan. Dalam bentuk industri berkembang melalui alat tenun bukan mesin (ATBM) dan kemudian alat tenun mesin (ATM), dengan adanya daerah industri TPT pada zamannya (Madjalaya - Jawa Barat). Dengan pemberlakuan UU No. 1 tahun 1967 tentang PMA dan PMDN (1968) industri tekstil nasional mengalami peningkatan yang sangat berarti, terutama produk TPT untuk dieskpor. Strategisnya produk TPT membawa perkuatan, dan menjadikan produk non migas sebagai penyangga utama APBN, menggeser migas. Peran dunia usaha untuk meningkatkan produktivitas terutama devisa bagi negara, dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas produk (daya saing) seperti dikemukakan Ginandjar Kartasasmita (1996:101) untuk jangka panjang yang pada gilirannya memperkuat ketahanan perekonomian nasional ialah:

1. Dengan memberikan perhatian pada penguasaan teknologi serta upaya penelitian dan pengembangan (R&D)
2. Melakukan pelatihan-pelatihan agar sumber daya manusia dapat digunakan secara optimal
3. Memberi perhatian khusus terhadap pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, karena ini juga merupakan faktor keunggulan, dan didalamnya upaya untuk melestarikannya
4. Meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan usaha

Sejalan dengan varian ekonomi dalam pengembangan produk TPT untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengimplementasikan rekayasa teknologi ke masyarakat memerlukan dukungan psikologi sosial dan komunikasi politik, sehingga terjadi interaksi positif antara Pemerintah dan Masyarakat. Penanaman Kapas di Yogyakarta dan Sulawesi Selatan pada awalnya, ada benturan/imbis dari perubahan. Peluang otonomi daerah dan model bottom up (lokal), memotivisir masyarakat dan memberi hasil nyata. Bila hal ini tidak dilakukan, sinyalemen M. Todaro (1995:127), bahwa dominasi negara maju dalam hal mentranfer nilai-nilai ekonomi, sosial, politik dan budaya akan menghambat negara-negara penerima bantuan dimaksud. Kondisi yang akan timbul adalah :

1. Transfer segala jenis produk cenderung menyebabkan dominasi dan ketergantungan yang langgeng antara negara kaya dan negara miskin, yang mengakibatkan negara-negara miskin tersebut tidak mengembangkan sikap mandiri.
2. Transfer itu sendiri pada umumnya tidak bertentangan dengan aspirasi pembangunan di sebagian besar Dunia Ketiga.
3. Ditinjau dari kepentingan politik dan ekonomi angka panjang,seperempat penduduk dunia yang menguasai tiga perempat produksi dunia tidak tertarik untuk memberikan atau membagi teknologinya kepada tigaperempat penduduk dunia.

Munculnya symbol-symbol pembangunan (seremonial) dalam mengemban kebijakan pemerintah, menyebabkan masyarakat asing dan tergusur dari konsepsi pembangunan. Transfer teknologi dari negara-negara maju dan memiliki *sense of nasionalism* yang tinggi diperlukan, melalui pendekatan kultural (sosial budaya lokal) untuk mengubah masyarakat, terutama potensi destruktif masyarakat pedesaan yang konsumtif pasca panen. Untuk itu, strategi meraih *feed back* diperlukan melalui

partisipasi masyarakat, dengan mengidentifikasi kebutuhan teknologi yang signifikan dengan peluang pasar, dengan mengkaji/mengevaluasi program dan kegiatan yang diperlukan. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran perubahan, bahwa manusia modern memiliki karakter : percaya ilmu pengetahuan dan kemampuannya untuk menaklukkan alam semesta.

Berkaitan dengan alinea di atas, sasaran yang lebih strategis dalam mewujudkan masyarakat PPDN adalah komunitas masyarakat pendidikan, pekerja (KORPRI), serta TNI dan POLRI. Sasaran masyarakat pendidikan, untuk menumbuhkan sikap produktif, inovatif dan kreatif sehingga mampu berkarya dengan mengutamakan kualitas serta menunjukkan sikap percaya diri terhadap hasil produk sendiri. Cara ini menyentuh dua sisi dari sifat manusia, yaitu produsen dan konsumen. Sebagai produsen, mereka berupaya menciptakan hasil terbaik dengan tingkat efisiensi yang tinggi, sehingga semua produk yang dihasilkan memberikan kepuasan konsumen. Sebagai konsumen, menghargai produk yang dihasilkan dan terbentuk sikap menghargai produk sendiri, setelah memahami proses produksi yang dilalui. Dengan demikian, masyarakat sadar dan akan menetapkan pilihannya untuk PPDN.

Khususnya bagi masyarakat pendidikan, upaya PPDN diperlukan sejak dini dan dijadikan doktrin dalam kurikulum dan silabusnya, sehingga menyadari arti penting dan strategisnya mencintai PPDN. Manfaatnya untuk anak didik pada usia dini, tersirat konsepsi nasionalisme yang semakin dibutuhkan dalam melanjutkan

pembangunan di era global. Sejarah penjajahan menunjukkan, kuatnya warisan feodal hingga saat ini menjadi bukti arti penting dan strategisnya penanaman nilai-nilai pada kelompok atau golongan masyarakat tertentu

#### **D. MENINGKATKAN DAYA SAING DAN KEMITRAAN**

##### **1. Pendekatan model**

Merujuk PPDN untuk mewujudkan masyarakat yang berketahanan, manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan, harus diberi ruang untuk mengartikulasikannya. Pembangunan ekonomi, merupakan prasyarat bagi tercapainya pembangunan manusia, melalui kesempatan kerja, produktivitas dan peningkatan pendapatan. Sebagai kekuatan nasional, pertumbuhan perekonomian harus dilandasi indikator yang disepakati dan transparan, sehingga fundamental perekonomiannya kuat dan mantap khususnya sektor pertanian. Demikian pula halnya untuk bidang sosial dan budaya dan pendidikan, seperti pemahaman fertilitas dan mortalitas baik dikalangan anak-anak, remaja dan dewasa.

Agar seluruhnya saling mengunci dan menyatu, bidang politik didukung demokrasi dan peranserta masyarakat ekonomi. Jika hubungan ini berjalan asimetris mengalami pertumbuhan yang tinggi tanpa diikuti oleh pembangunan manusia yang seimbang, dapat menyebabkan kegagalan pembangunan. Bentuk kebijakan yang



mantap ialah, memberikan prioritas dan alokasi sumber daya pembangunan yang cukup untuk pembangunan manusianya.

Penciptaan lapangan kerja merupakan penghubung pembangunan ekonomi dengan pembangunan manusia melalui keterampilan pengusaha, dan adanya masyarakat ekonomi. Kuatnya interrelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia dalam satu rangkaian kebijakan publik, akan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, melalui :

*Produktivitas*, Keunggulan sumber daya manusia melalui produktivitas seperti Negara Singapura, menunjukkan peran etos kerja dan sistem perencanaan pembangunan yang sinkron dengan sosiokulturalnya. Meningkatnya produktivitas disegala bidang, diikuti penciptaan lapangan pekerjaan dan distribusi pendapatan yang signifikan dengan kesejahteraan. Untuk itu budaya-budaya lokal yang positif dan masuknya budaya asing, dimodifikasi bagi pembentukan mental masyarakat agar timbul budaya hemat, kerja keras dan semangat pengembangan Iptek.

*Peningkatan daya saing*, Memperhatikan trend konsumen dan keunggulan produk TPT impor, untuk meningkatkan daya saingnya produk TPT dalam negeri perlu perencanaan. Upaya yang dilakukan antara lain, mengidentifikasi kebutuhan konsumen dan pasar, sehingga diketahui marketnya. Disamping itu, pengembangan konsep produk diikuti seleksi konsep produk yang akan dipasarkan. dengan memahami klasifikasi konsumen serta karakteristiknya.

*Pemerataan*, Faktor geografi dan demografi yang membentuk kesenjangan, disikapi dengan azas pemerataan, sehingga setiap masyarakat menjadi bagian dari masyarakat lainnya. Terobsesinya masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dirinya, serta mempertahankan eksistensi kelompoknya, menyebabkan investor asing (lokal) sulit untuk mengembangkan usahanya, disamping konflik dan pertikaian di tataran lokal maupun nasional, menjadikan banyak program kehilangan momentum seperti industri TPT.

*Kesinambungan*, Pemikiran James Riggs dalam strategi AIM, bahwa setiap program harus memiliki kesinambungan dan secara terstruktur harus dievaluasi agar dapat diketahui analisa SWOTnya. Upaya peningkatan kesejahteraan dengan model proyek yang sifatnya sementara (insidental), dapat mengacaukan upaya pembinaan. Kesinambungan program harus didukung law inforcement dan sosialisasi yang sejalan dengan sosiokulturalnya agar program dimaksud tetap eksis di masyarakat khususnya berorientasi strategis di masa mendatang.

*Pemberdayaan*, Menyatukan masyarakat dengan program, masyarakat harus menjadi bagian dari kegiatan itu sendiri, dan diberi ruang untuk melakukan kreatif dan inovatif untuk menentukan masa depannya. Berpartisipasi dan mengambil manfaat dari setiap kegiatan yang dilakukan masyarakat, harus seimbang dengan pengorbanannya. Adanya kesenjangan Iptek, bukan merupakan alat melegitimasi adanya perbedaan ketimpangan. Perubahan yang dilakukan diharapkan membawa hasil yang signifikan bagi masyarakat, dan sebaiknya dengan model incremental.

*Perubahan sifat dan sikap*, Mewujudkan manusia Indonesia baru yang kemampuan, diawali dengan mendeteksi kehidupan masyarakat, baik masyarakat dominan (populasi, politis dan ekonomis) terhadap image peningkatan PPDN secara simultan. Sebagai Tugas Pokok dan Fungsi Depperindag, aparatnya perlu memiliki kemampuan multi dan lintas disiplin untuk membentuk opini masyarakat, agar mau mengorbankan hak-hak kemanusiannya (kepuasaan). Untuk itu diperlukan mediasi yang tepat, dan diawali oleh Pejabat Publik dan masyarakat. Restorasi Meiji, sebagai roh pembangunan di Jepang, hasilnya dua abad kemudian.

*Pendekatan lintas disiplin*, Proses pembangunan tidak menarik partisipasi masyarakat karena minimnya pendekatan multi dan lintas disiplin ilmu pengetahuan. Pembangunan dengan pendukung utama disiplin ekonomi, tidak mampu mencapai target karena melupakan masalah budaya yang merupakan inti dari kehidupan. Tujuan dan muatan pembangunan adalah keputusan politik. Varian ekonominya ditentukan berbagai fenomena politik (demonstrasi, keamanan, pemberontakan). Keberhasilan meningkatkan pendapatan dengan memanfaatkan sumber daya alam, manfaat multi dan lintas disiplin dalam arti mengelola, dan kontinuitasnya. Hal ini dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan teknologi dan kepastian hukum.

## **2. Inovasi Teknologi**

Tujuan utama teknologi ialah efektifitas dan efisiensi sekaligus menunjukkan, IPTEK dapat didayagunakan untuk berbagai kepentingan. Dalam konteks PPDN

dengan dimensi kebangsaannya, penetapan Iptek sebagai landasan merupakan kekuatan utama bagi kelangsungan hidup dan jatidiri bangsa. Potensi PPDN dapat menjaga keteraturan, stabilitas dan mengantisipasi terjadinya perubahan yang dapat melahirkan gejolak.

Penggunaan Iptek diberbagai sektor pembangunan, untuk optimalisasi tataruangnya. Kemampuan rancangbangun dan rekayasa guna mempertahankan pasokan bahan baku dengan pemanfaatan teknologi tepat guna dan padat karya (TTG & TPK), perluasan lahan (kering), diversifikasi, pasca panen yang efisien dan efektif, kebijakan publik (harga) yang berorientasi pada rakyat, perkuatan solusi yang diterbitkan. Implikasinya, teknologi menjadi awal untuk mengakomodir berbagai masalah yang timbul. Kerjasama terpadu (interdep), formulasinya mensinerjikan Visi, Interpretasi dan Persepsi dalam penyiapan/pengelolaan obyek sasaran atau target. Program pertanian yang berkaitan dengan industri TPT bermanfaat bagi petani di perdesaan model pendekatan permodalan/perkreditan (KMKP, KIK, KUK, KUD), serta fasilitasi (informasi) belum mengantar Petani menuju era agribisnis maupun agroindustri fundamen industrialisasi dan jatidiri bangsa.

#### **a) Kelembagaan Pemasaran**

Pengembangan produk-produk TPT agar menjadi tuan di negeri sendiri, memerlukan penataan jaringan dengan pemberdayaan Sistem Informasi Pasar baik di DN maupun LN. Terwujudnya struktur pasar produk TPT yang bersaing dan mantap,

terintegrasinya pasar lokal, antar daerah/pulau dengan pasar nasional membuat penyebaran produk TPT dengan harga yang layak di pasar. Disisi lain, terwujudnya iklim usaha yang sehat, mendorong pengembangan dan perluasan usaha, dan sejalan dengan tantangan global memerlukan standarisasi (sistem dan fasilitas). Kesiapan data yang akurat dan aktual guna penyusunan distribusinya, perlu mengidentifikasi : pergerakan komoditi antar daerah/propinsi, potensi sentra produksi dan konsumsi, perkembangan harga dan potensi daerah (peta distribusi) yang berkaitan dengan :

- Kelembagaan (Dinas Daerah, BPEN, Atase Perdagangan dan Instansi terkait)
- Partisipasi dalam Promosi di LN maupun penjualan di DN
- Kerjasama di DN dan LN melalui badan-badan Internasional komoditi yang diperdagangkan dengan memberdayakan institusi usaha dalam negeri.

#### **b) Informasi dan Iklim Usaha**

Peran strategis lainnya, Institusi di jajaran Mekon Ekuin guna memantapkan produk-produk lokal dengan koordinasi fungsional agar terwujud produk yang memiliki daya saing. Daerah harus dimanfaatkan, dengan memberi informasi yang akurat kepada dunia usaha dan memfasilitasinya agar kreatif dan inovatif untuk melahirkan produk unggulan daerah seperti lurik di Yogyakarta, Ulos di Tapanuli, Sasirangan di Kalimantan dan tenun ikat di Nusa Tenggara. Secara khusus dalam konteks PPDN, penggunaan law inforcement dan membuat struktur yang sesuai

dengan grand strategy PPDN, mengingat PPDN menjadi issue dan program nasional, serta menyangkut hajat hidup orang banyak dan eksistensi suatu bangsa.

Terbitnya Undang-Undang Persaingan Usaha atau Anti Monopoli dan berbagai produk hukum diharapkan dapat mewujudkan sistem ekonomi atau iklim usaha yang kondusif. Monopoli, persaingan yang tidak sehat, intervensi (kekuasaan) yang mengakibatkan distorsi, harus dihilangkan untuk kehidupan hajat hidup orang banyak dan menunda terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa.

#### **E. PEMBANGUNAN TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL**

Sejalan dengan kontribusi industri TPT melalui devisa bagi pembangunan nasional, maka industri ini perlu diperkuat dengan memperhatikan lingkungan strategis internasional serta permasalahan eksternal, seperti : perubahan teknologi informasi yang cepat, perluasan pemanfaatan berbagai sumber daya alam, perkembangan free trade area, hambatan non tarif, isu lingkungan dan HAM serta masuknya China dan Taiwan ke WTO, pertumbuhan ekonomi global yang menurun, persaingan tidak sehat, perubahan perilaku konsumen telah mempengaruhi daya saing produk TPT nasional ke pasar dunia. Disamping hal dimaksud, permasalahan internalnya adalah : gangguan keamanan, perburuhan, masalah pembiayaan dan moneter dan lemahnya penegakan hukum serta pungutan tidak resmi menyebabkan menurunnya minat investasi di dalam negeri.

Mandegnya industri TPT nasional dipastikan akan mempengaruhi tingkat penggunaan produk TPT (busana) dikaitkan dengan terbatasnya daya beli untuk produk impor. Penggunaan atau pemanfaatan produk TPT perannya bergeser, dan kini sebagai identitas sosial kemasyarakatan yang beradab. Meningkatnya kebutuhan terhadap produk TPT (busana) dan menjadi komoditas primair, dapat dijadikan sebagai indikasi tingkat kesejahteraan suatu bangsa. Pada negara-negara maju atau yang memiliki iklim sub tropis, seperti di Kawasan Amerika, Eropa dan sebagian Asia kebutuhan busana untuk setiap musim, menjadi pangsa pasar bagi negara-negara produsen TPT. Pemenuhan kebutuhan terhadap musim, ditandai dengan spesifikasi busana, menyebabkan negara-negara pemasok terus meningkatkan kualitas bahan, desain dan motif.

Pemanfaatan musim dan perluasan pasar ke negara-negara di kawasan Afrika dan Amerika Latin disamping pasar tetap, merupakan pasar potensial bagi industri TPT.nasional, karena memiliki daya saing yang kuat, terutama pada faktor harga dan bahan baku. Besaran ekspor dimaksud, diikuti dengan penyerapan angkatan kerja yang terus meningkat, walaupun pada periode krisis moneter dan perekonomian (1997-1999) menurun secara tajam diakibatkan PHK. Peluang dari industri TPT bagi masyarakat, adalah wacana untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui distribusi pendapatan, alih teknologi dan interaksi sosial masyarakat perdesaan pada pusat-pusat perdagangan/pasar dan peluang pengembangan kemampuan pribadi. .

Terbukanya peluang kerja dan kesempatan berusaha bagi industri TPT nasional khususnya pelaku usaha dalam kategori usaha kecil dan menengah (UKM), melahirkan pelaku-pelaku usaha baru (pionir) yang lebih dinamis dan disertai dengan pemahaman bisnis. Hal ini berbeda dengan pendahulunya, yang merupakan simbol sosial atau keluarga. Penguasaan iptek disertai kemampuan pribadi menjadikan dunia usaha sebagai bagian dari pengembangan diri dan sekaligus upaya peningkatan kesejahteraannya sekaligus memberi efek ekonomi bagi lingkungannya. Tumbuh dan berkembangnya pelaku-pelaku usaha lokal sebagai bagian dari proses budaya nasional, akan melahirkan wirausaha-wirausaha nasional yang memiliki semangat dan nilai juang kebangsaan. Penguasaan informasi yang utuh terhadap seluruh wilayah nusantara, merupakan peluang untuk membuka jenis usaha baru atau menjadi matarantai usaha. Komunitas pelaku usaha yang terkoordinir dan bersinerji, dapat mendukung pengembangan usaha nasional dalam skala lokal atau regional, seperti pelaku usaha pada sentra-sentra produk TPT di Tasikmalaya dan Pekalongan.

Dukungan yang kuat dari pelaku usaha atau pimpinan daerah tempat berusaha, merupakan bagian dari mempertahankan eksistensi suatu bangsa. Hal ini nampak pada beberapa negara yang tidak memiliki sumber daya alam. Kemampuan mengelola dan memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif, kini semakin nyata untuk memperkuat perekonomian atau ketahanan nasional suatu bangsa, terutama dengan pemanfaatan bahan baku dalam negeri. Sejalan dengan karakteristik geografi, maka dalam rangka pemanfaatan dan peningkatan nilai tambah komoditas yang ada baik bahana baku, setengah jadi atau produk industri



sangat ditentukan oleh kreativitas dan inovasi dari penyelenggara pemerintahan dan pelaku usaha.

Tumbuh dan berkembangnya budaya yang dilandasi kreativitas dan memberikan efek ekonomis dengan skala nasional, sangat ditentukan oleh kemauan politik pimpinan pemerintahan. Usaha pembinaan yang terpadu disegala bidang atau sektor akan menjadi stimuli bagi dunia usaha untuk memanfaatkan potensi yang ada. Disamping hal dimaksud, kepastian hukum, sistem perbankan, keamanan dan akses distribusi atau transportasi akan menentukan kelangsungan usaha yang dijalankan, terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan utama masyarakatnya.

#### **F. PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Keluaran (produk) SDM adalah jasa dalam bentuk pelayanan (perencanaan, pengawasan dan penindakan). Pelayanan prima dapat dicapai jika SDM bekerja sesuai norma yang ditetapkan, disertai peran aktif pimpinan, melalui pengawasan dan operasionalisasinya dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Sesuai dengan peran pemerintah sebagai pengendali kebijakan dibidang industri TPT, seluruh SDMnya harus memiliki kontribusi terhadap keberhasilan pembangunan industri TPT. Peran manajemen kuota misalnya, sangat menentukan kualitas, volume dan distribusi produk TPT bagi eksportir dan pengadaan TPT di dalam negeri. Penyimpangan manajemen kuota, terkait erat dengan manajemen

para produsen untuk mengembangkan kreativitasnya, karena terkait dengan kepastian berusaha.

Dengan demikian SDM, mempunyai makna operatif dan konseptual untuk memberi nilai tambah atas setiap pekerjaannya, baik barang/jasa, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan SDM menjadi stimulan, menumbuhkan etika kerja yang terkait erat dengan moral, dan terwujud dalam : etos kerja, produktivitas dan corporate culture. Meningkatkan kemampuan kualitas perencanaan SDM pada industri TPT, perlu dukungan konsep-konsep manajemen sehingga pembinaan organisasi/lembaga pemerintah efisien dan efektif. Pelayanan kepentingan umum di lembaga Pemerintah, merujuk pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993, yaitu mengacu pada kualitas dan kepuasan total pengguna jasa publik. Pelayanan yang didambakan pengguna jasa publik adalah :

1. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan yang cepat dalam arti tanpa hambatan
2. Memperoleh pelayanan yang wajar
3. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap kepentingan yang sama, tertib dan tidak pandang bulu
4. Pelayanan yang jujur dan terus terang

Heterogenitas sumber daya manusia dalam lembaga/instansi, mempengaruhi pembentukan sikap dan perilakunya, disamping gaji dan upah, peluang mengikuti pendidikan guna meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1994, dalam Pasal 1 mengemukakan tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil,

dan di Pasal 2 tujuan Pendidikan dan Latihan. Adapun esensinya adalah meningkatkan kesetiaan dan ketaatan, kesamaan pola pikir yang dilandasi nalar dan wawasan yang komprehensif, sehingga memantapkan semangat pengabdian dan berorientasi pada pelayanan. Selain konsep dimaksud, hal lain yang signifikan ialah motivasi dan kepemimpinan. Motivasi secara umum adalah pemberian sistem nilai dan dapat dalam berbagai bentuk (material dan im-material) yang diberikan oleh Pimpinan. Sedangkan kepemimpinan adalah daya atau kemampuan menggerakkan personalia dalam pelaksanaan tugasnya, dan mampu menginterpretasikan makna "human relation".

Abraham Maslow mengenai Hierarchy of needs dari kebutuhan fisiologis sampai self actualization dan Douglas Mc. Gregor tentang Teori X dan Y (faktor genetika) maupun Sigmund Freud tentang cara bagaimana SDM ingin mendapatkan kebutuhannya (id, ego dan super ego) nampak dalam perilaku SDM di jajaran unit terkait. Pakar lain David C. McClelland relevan dengan konteks pelayanan tugas unit terkait, yaitu need for achievement (n-Ach), yaitu sikap dan perilaku SDM yang menyenangkan situasi kerja dan mengambil tanggungjawab dalam pemecahan masalah.

**BAB III**  
**DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**SEBAGAI PENGENDALI KEBIJAKAN**

**A. ANALISIS KEBIJAKAN PERDAGANGAN INDUSTRI TPT**

Keputusan Presiden yang terakhir Nomor 234/M/Tahun 2000, merupakan dasar bagi penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Tugas Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Depperindag) dengan tugas menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang industri dan perdagangan, serta menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Pelancaran pelaksanaan di bidang perindustrian dan perdagangan;
2. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi departemen;
3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;
4. Pelaksanaan pengawasan Fungsional

Berdasarkan fungsi yang dimiliki, Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengimplementasikan keempat fungsi di atas ke dalam bentuk kewenangan, seperti :

1. Penetapan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan, untuk mendukung pembangunan secara makro;
2. Penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidang perindustrian dan perdagangan;
3. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang perindustrian dan perdagangan;
4. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidang perindustrian dan perdagangan;
5. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi di bidang perindustrian dan perdagangan;
6. Penetapan pedoman pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di bidang perindustrian dan perdagangan;
7. Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidang perindustrian dan perdagangan;
8. Penetapan standar pemberian ijin oleh daerah di bidang perindustrian dan perdagangan;
9. Pengaturan ekspor dan impor;
10. Penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidang perindustrian dan perdagangan;
11. Penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang perindustrian dan perdagangan;
12. Penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidang perindustrian dan perdagangan;
13. Pengaturan sistem lembaga perekonomian negara di bidang perindustrian dan perdagangan;
14. Penetapan standar industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan, lingkungan dan moral;
15. Penetapan standar nasional barang dan jasa di bidang industri dan perdagangan;
16. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah di bidang pembangunan industri TPT yang melibatkan institusi pemerintah, swasta dan masyarakat, maka peran dimaksud ditandai dengan keberadaan institusi atau kelembagaan seperti :

- a. Asosiasi produsen Syntetic Fiber Indonesia (APSyFI)
- b. Federasi industri Tekstil Indonesia (FITI)
- c. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)
- d. Sektoral Kebersamaan Permintalan (SEKBERTAL)
- e. Asosiasi Apparel Manufacture Indonesia (AMI)
- f. Asosiasi Gaun Pengantin Indonesia (APGAPINDO)
- g. KADIN (Kamar Dagang dan Industri Nasional)

### **1. Peran Pemerintah**

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah, maka peran pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan industri TPT (input) antara lain adalah :

- a. Meningkatkan kemampuan manufacturing perusahaan-perusahaan nasional untuk meningkatkan rantai nilai (value chain);
- b. Membuat program-program pendidikan dan pelatihan khusus mengenai pertekstilan melalui kerjasama dan koordinasi terpadu antara lembaga pendidikan (Swasta), Balai Litbang Tekstil, Lembaga R & D, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Bappenas dan Departemen Pendidikan Nasional
- c. Mengupayakan pengadaan sumber daya finansial dengan bunga yang kompetitif, baik yang bersumber dari kerjasama internasional maupun dari sumber dalam negeri
- d. Meningkatkan promosi investasi termasuk untuk peningkatan teknologi
- e. Mendorong pengembangan program pendidikan dan pelatihan di bidang desain produk TPT
- f. Meningkatkan kemampuan tenaga kerja di bidang rancangbangun perekayasaan dan proses fabrikasi produk TPT
- g. Mendorong kegiatan Litbang khususnya dalam bidang teknologi bahan baku tekstil, pencelupan, pencetakan serta finishing

- h. Menyediakan infrastruktur lainnya seperti sarana dan prasarana komunikasi, transportasi, pelabuhan, airport, jalan dan peti kemas.

Disamping fungsi di atas, pemerintah mengembangkan industri TPT melalui

industri terkait dan pendukung . Kebijakan yang diterbitkan antara lain :

- a. Melakukan koordinasi untuk peningkatan daya pengembangan berbagai sistim dalam industri terkait dan pendorong
- b. Mendorong pengembangan supporting industrial di dalam negeri dan memberikan kemudahan untuk impor bahan baku/penolong,mesin peralatan/spare part yang belum di buat di dalam negeri
- c. Melakukan counter trade dengan negara-negara penghasil kapas
- d. Menerapkan system automatisasi dan sistim manufaktur yang fleksibel
- e. Mengembangkan sumber bahan baku alternatif melalui kerjasama dengan pusat-pusat riset internasional

Disamping factor-faktor di atas, untuk memenuhi permintaan, pemerintah dalam mengembangkan industri TPT, meliputi antara lain ;

- a. Menciptakan penyelarasan peraturan yang mempengaruhi industri TPT melalui :
  - mengurangi peraturan yang tidak pasti
  - menstimuli penyesuaian yang cepat
  - mendukung peningkatan/perbaikan peraturan
- b. Meningkatkan penyebaran lokasi industri ke luar P. Jawa
- c. Mensponsori pengetesan independen, sertifikasi produk, dan meranking jasa-jasa yang dihasilkan oleh suatu industri kluster
- d. Melanjutkan deregulasi dan debirokratisasi secara konsisten

## **2. Peran Dunia Usaha**

Peranan dunia usaha dalam mengembangkan dan meningkatkan industri

TPT (factor input) di Indonesia antara lain dilakukan melalui :

- a. Merestrukturisasi/modernisasi permesinan khususnya bagi mesin-mesin yang tua atau in-efisiensi dan memfasilitasi lembaga-lembaga pengembangan teknologi TPT
- b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan produktivitas dan dibidang tehnik produksi, pemasaran, termasuk tehnik negosiasi dengan penerapan system manajemen standar mutu (ISO) 9000 maupun ISO 14000)
- c. Mengumpulkan informasi kluster melalui asosiasi-asosiasi perdagangan

Disamping factor input, peranan dunia usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan industri kluter melalui industri terkait dan pendukung antara lain melalui :

- a. investasi pada industri pendukung
- b. mendirikan asosiasi-asosiasi perdagangan yang berdasarkan kluster
- c. mengembangkan system inti-plasma yang melibatkan industri hulu, hilir dan industri penunjang dengan memperkuat dan memperluas keterkaitan (kemitraan) antara IKM dengan usaha besar

Hal-hal yang dilakukan dunia usaha dalam mengembangkan dan meperluas industri yang berhubungan dengan permintaan antara lain :

- a. bekerjasama dengan pemerintah untuk menyeleraskan peraturan dan memodifikasi peraturan sehingga menjadi bermanfaat
- b. Mendirikan organisasi pengetesan (standar mutu) lokal
- c. Melanjutkan langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi



## **B. ANALISIS KINERJA PRODUK TPT DALAM NEGERI**

Pembinaan industri TPT sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan pemerintah, berada dalam koordinasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Khususnya untuk penangan kegiatan PPDN berada di Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri pada Direktorat Bina Pasar dan Distribusi. Adapun strukturnya nampak pada lampiran 4.

Selanjutnya, berdasarkan tugas dan fungsi Dirjen PDN khususnya Direktorat terkait dengan pelaksanaan PPDN adalah Direktorat Bina Pasar dan Distribusi. Adapun Tugas dan fungsi Direktorat Bina Pasar dan Distribusi adalah, melaksanakan perumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi di bidang pembinaan pasar dan distribusi. Sedangkan fungsinya adalah :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dan edoman di bidang pengembangan pasar, informasi pasar, peningkatan penggunaan produk dalam negeri
- b. Bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan di bidang pengembangan pasar, informasi pasar, peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan distribusi
- c. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat

### **B.1. Kondisi Pegawai Dilingkungan DITJEN PDN**

Perencanaan SDM dalam rangka pembinaan pegawai setiap tahunnya

dituangkan dalam perencanaan SDM dan mencakup : Pengadaan pegawai berdasarkan formasi yang ada, pendidikan dan pelatihan pegawai, pembayaran gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, promosi dan mutasi, pensiun pegawai. Dari pegawai sejumlah 513 orang tahun 2002/2003, 63 Orang diantaranya adalah tenaga Fungsional (Statistisi, PPNS dan Fungsional Metrologi dan Penyuluh Perindustrian seperti dalam table dibawah ini

Tabel No. 1  
Tingkat Pendidikan Pegawai Ditjen PDN

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	Sarmud	SLTA	SLTP	SD	
1.	Setditjen PDN	4	27	14	37	2	2	86
2.	Dit. Metrologi	2	39	2	71	13	7	134
3.	Dit. Bina Usaha Perdag	3	28	9	37	-	3	80
4.	Dit. Bina Psr & Distribusi	6	33	7	27	3	2	78
5.	Dit. Binawas Brg Beredar dan Jasa	10	20	2	39	-	1	72
6.	Dit. Perlindungan Konsumen	3	30	1	26	1	2	63
<b>Jumlah</b>		28	193	43	239	23	19	513

Sumber : Ditjen PDN, angka diolah Tahun 2003

Untuk mendukung kelancaran tugas, Pimpinan Departemen memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan sejalan dengan peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1994, untuk mengembangkan pola karir guna memenuhi persyaratan jabatan sesuai kebutuhan organisasi.

Latihan Pegawai Ditjen PDN selain Diklat penjenjangan seperti, SEPAMEN, SPAMA, ADUM diberikan pula Diklat bagi Calon Pejabat fungsional seperti Petugas Penyuluh Lapangan, Statistisi, PPNS serta Diklat lain yang mendukung peningkatan keterampilan dan keahlian. Adapun klasifikasi pendidikan (Sarjana) Pegawai Ditjen PDN jika dirinci berdasarkan disiplin ilmu pendidikan ialah : Sarjana Ekonomi 110 orang, Sarjana Administrasi 39 orang, Sarjana Pertanian 21 orang dan Sarjana Hukum 45 orang.

Adapun klasifikasi Pangkat pegawai Ditjen PDN seperti dalam tabel dibawah ini :

**Tabel No. 2**  
**Pangkat/Golongan Ditjen PDN**

No	Unit Kerja	Pangkat/Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Setditjen	9	55	18	2	86
2.	Dit. Metrologi	9	78	44	3	134
3.	Dit. Bina Usaha	6	63	9	1	80
4.	Dit. Bina Pasar	6	58	12	2	78
5.	Dit. Binawas Brg Beredar dan Jasa	8	52	12		72
6.	Dit. Perlindungan Konsumen	8	39	13	2	63
<b>Jumlah</b>		<b>46</b>	<b>345</b>	<b>108</b>	<b>10</b>	<b>513</b>

Sumber : Ditjen PDN angka diolah, tahun 2003

Berdasarkan struktur organisasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan, adapun eseloneringnya adalah seperti nampak dalam tabel dibawah ini

**Tabel No. 3**  
**Eselonoring Pegawai Ditjen PDN**

No	Unit Kerja	Jumlah (orang)					Jumlah
		II A	III A	IV A	Staf	Fun g	
1.	Sesditjen	1	4	12	60	9	86
2.	Dit. Metrologi	1	5	11	83	34	134
3.	Dit. Binusdag PP	1	5	10	50	14	80
4.	Dit. Bina Pasar dan Distribusi	1	5	11	60	1	78
5.	Dit. Binawas Brg Beredar dan Jasa	1	5	11	51	4	72
6.	Dit. Perlindungan Konsumen	1	5	11	45	1	63
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>29</b>	<b>66</b>	<b>349</b>	<b>63</b>	<b>513</b>

Sumber : Ditjen PDN, angka diolah, Tahun 2003

Disamping Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka terkait pula Direktorat Ekspor Produk Industri sebagai sub ordinat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Direktorat Ekspor Produk Industri mempunyai tugas antara lain melaksanakan perumusan

kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang ekspor industri.

Dalam pelaksanaan tugasnya, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan peningkatan ekspor produk industri dibidang tekstil dan produk tekstil, kimia, logam, mesin, alat angkut, elektronika, aneka industri dan kerajinan serta jasa
- b. Penyiapan perumusan pedoman, standar, norma, criteria, dan prosedur peningkatan ekspor produk industri dibidang tekstil dan produk tekstil, kimia, logam, mesin, alat angkut, elektronika, aneka industri dan kerajinan serta jasa
- c. Bimbingan teknis peningkatan ekspor produk industri dibidang tekstil dan produk tekstil, kimia, logam, mesin, alat angkut, elektronika, aneka industri dan kerajinan serta jasa
- d. Evaluasi pelaksanaan peningkatan ekspor produk industri dibidang tekstil dan produk tekstil, kimia, logam, mesin, alat angkut, elektronika, aneka industri dan kerajinan serta jasa
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

## **B.2. Kondisi Kepegawaian pada Direktorat Tekstil dan Produk Tekstil**

Berdasarkan data Tahun 2002, jumlah aparat dilingkungan Direktorat Tekstil sebanyak 49 orang, yang terdiri dari 35 orang pria dan 14 wanita dengan komposisi golongan : Golongan IV, 10 orang, golongan III, 36 orang, dan Golongan II, 3 orang dengan latar belakang pendidikan : . Pasca Sarjana 7 orang, . Sarjana/Diploma IV 20 orang, Sarjana Muda 6 orang, Sekolah lanjutan Atas 15 orang dan Sekolah Lanjutan Pertama 1 orang. Adapun klasifikasi atau kompetensinya adalah :

- a. Bidang tekstil : 6 orang
- b. Bidang Teknik Industri : 6 orang
- c. Bidang manajemen Industri : 8 orang
- d. Bidang Administrasi/Hukum : 9 orang
- e. Bidang Ekonomi : 3 orang
- f. Bidang umum : 17 orang

Guna mendukung kelancaran tugas, kepada aparatnya diberi kesempatan sesuai dengan persyaratan untuk mengikuti pendidikan, baik pelatihan structural, fungsional dan pelatihan teknis. Sesuai dengan sifat teknis Direktorat tekstil, disamping pelatihan di dalam negeri seperti anti dumping, kehumasan, administrasi umum, ISO 9000-2000, fungsional analisis, perdagangan internasional, dilakukan pula pelatihan di luar negeri dengan kegiatan : Management Textile Industry, regional support system for SME, Cotton grading & classification, Asia Pacific Textile & Clothing Industry Forum dan Textile International Formand Exhibition 2002.

Sejalan dengan SK Menperindag tentang uraian tugas pokok dan fungsi Direktorat Produk Ekspor, Direktorat Industri tekstil dan Produk Tekstil yang merupakan Sub Ordinat Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Elketronika dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman,

standar, norma, criteria, prosedur dan bimbingan teknis serta evaluasi pengembangan industri tekstil dan produk tekstil. Berdasarkan tugas dimaksud, Direktorat Industri Tekstil dan Produk tekstil menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan program industri tekstil dan produk tekstil
- b. Penyiapan penyusunan pedoman, standar, norma, criteria dan prosedur pengembangan program industri tekstil dan produk tekstil
- c. Penyiapan bimbingan teknis pengembangan program industri tekstil dan produk tekstil
- d. Penyiapan evaluasi pelaksanaan pengembangan program industri tekstil dan produk tekstil.

Khusus untuk pelaksanaan tugas dan fungsi mengenai penyiapan perumusan kebijakan dibidang tekstil dan produk tekstil, Sub Direktorat Tekstil dan Produk Tekstil menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan peningkatan ekspor produk industri tekstil dan produk tekstil
- b. Penyiapan penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria dan prosedur peningkatan ekspor produk industri tekstil dan produk tekstil
- c. Penyiapan bimbingan teknis peningkatan ekspor produk industri tekstil dan produk tekstil
- d. Penyiapan evaluasi pelaksanaan peningkatan ekspor produk industri tekstil dan produk tekstil.

Bersamaan dengan tugas pokok dan fungsi Depperindag, upaya penyelenggaraan pembinaan dunia usaha tekstil dan produk tekstil dilaksanakan pula oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1987. Sesuai dengan UU dimaksud, tujuan KADIN adalah :

- a. membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta dalam kedudukannya sebagai pelaku-pelaku ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib berdasarkan pasal 33 Undang-Undang dasar 1945
- b. Menciptakan dan mengembangkan iklim usaha yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi pengusaha Indonesia sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam Pembangunan Nasional.

Berdasarkan Visi dan Misi KADIN Periode Tahun 1999-2004, terkandung didalamnya Visi : - Adanya keunggulan nyata sumber daya nasional

- Keseimbangan paduan keterkaitan berbagai potensi ekonomi spasial, sektoral, dan antar skala usaha
- Kandungan dimensi tertib hukum, etika bisnis dan kemanusiaan
- Tatanan ekonomi pasar yang menjamin peran ekonomi nasional
- Adanya transparansi, dan efisiensi
- Bagian Integral ekonomi regional dan global

Sesuai dengan visi dan misi, KADIN menetapkan program untuk jangka panjang dan pendek yang berorientasi pada mendorong pemulihan ekonomi serta membangun tata ekonomi baru. Kemudian dengan landasan program jangka panjang dan pendek disusun pola umum implementasi kebijaksanaan dengan titik berat, fasilitasi advokasi, fasilitasi pelayanan, fasilitasi pengembangan. Disamping itu dilakukan pula restrukturisasi – integrasi organisasi dan fasilitasi yang menuju terbentuknya aliansi strategis potensi ekonomi nasional. Khusus untuk Kompartemen Industri Tekstil program dan kegiatannya antara lain :



- a. Melakukan langkah-langkah kegiatan dalam rangka mengupayakan peningkatan produksi, investasi dan pemasaran di bidang industri TPT
- b. Ikut serta dalam kegiatan kunjungan misi dagang dan investasi ke luar negeri
- c. Ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dalam rangka mempromosikan produk-produk TPT
- d. Berupaya dan berpartisipasi dalam menyiapkan dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan SDM sesuai kualifikasi dan tuntutan dunia industri
- e. Mengadakan audiensi dan dialog dengan pemerintah dan instansi terkait, dalam rangka memperjuangkan dan mengupayakan pemecahan masalah yang dialami oleh para anggota dilingkup industri per tekstilan
- f. Memperjuangkan hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan dalam pengembangan industri per tekstilan
- g. Memberikan masukan kepada pemerintah dan instansi terkait mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan di bidang moneter dan perbankan
- h. Memberi masukan kepada pemerintah berkenaan dengan perkembangan dunia usaha khususnya lingkup industri per tekstilan
- i. Mengupayakan tersedianya informasi, mengenai industri per tekstilan.

### **C. KONDISI INDUSTRI TPT DI INDONESIA**

Upaya perkuatan perkonomian nasional melalui sektor industri khususnya TPT sejak diterbitkannya UU mengenai PMA No. 1 Tahun 1967, persebaran industri semakin meluas, namun masih terkonsentrasi di P. Jawa. Penetapan lokasi industri berkaitan dengan keunggulan atau fasilitas sarana dan prasarana, kualitas angkatan kerja serta potensi daya beli masyarakat lokal. Hal ini nampak seperti Tabel dibawah ini, bahwa Propinsi Jawa Barat merupakan pusat industri TPT. Sementara di luar P. Jawa adalah Propinsi Bali, Sumatera dan Sulawesi relatif kecil

Tabel No. 4

## Persebaran Industri TPT di Indonesia Periode 1996 – 2002

( DIMENSION : UNIT )

NO.	LOCATION	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
1	SUMATERA	41	46	46	46	49	49	47
2	DK.I JAKARTA	411	448	450	450	456	459	453
3	JAWA BARAT	1,358	1,433	1,448	1,463	1,496	1,501	1,448
4	JAWA TENGAH	367	370	375	377	381	384	385
5	YOGYAKARTA	30	30	30	30	31	31	31
6	JAWA TIMUR	144	145	149	149	150	151	151
7	BALI	65	78	78	78	83	85	86
8	SULAWESI	5	5	5	5	5	5	5
TOTAL		2,421	2,555	2,581	2,598	2,651	2,665	2,606

Sumber : DEPPERINDAG

Berdasarkan potensi penggunaan bahan baku local TPT, program pemassalan kapas transgenic dilaksanakan di P. Sulawesi namun memerlukan kajian, karena penanamannya baru dimulai di Kab. Jeneponte, dan hasilnya belum dapat

diidentifikasi/dievaluasi bagi pengembangan berikutnya. Investasi terbesar berada pada kelompok benang dan kain, hal ini berkaitan dengan peluang olahannya dalam bentuk lain sesuai dengan permintaan pasar. Secara umum terjadi kenaikan investasi yang menggambarkan industri di sektor TPT tetap memiliki daya tarik, disebabkan perannya sebagai komoditi primair.

Besarnya investasi merupakan gambaran peningkatan daya tahan perekonomian nasional, namun disisi lain besarnya investasi membuat tingkat ketergantungan pada sektor keamanan, kepastian hukum dan lingkungan menjadi sistemik. Resultante dari sistemik dimaksud akan berpengaruh pada tingkat ketahanan ekonomi nasional disebabkan dominasi impor seperti nampak dalam tabel dibawah ini.

**Tabel No. 5**  
**Perkembangan Investasi ITPT Tahun 1998 – 2002**

Unit : Milyar Rupiah

NO	INDUSTRI	1998	1999	2000	2001	2002
1	SERAT BUATAN	7,578.04	8,605.24	10,938.57	11,640.09	11,929.09
2	BENANG	20,613.73	22,288.69	23,077.20	24,777.12	25,040.15
3	KAIN	29,220.25	29,624.16	30,458.29	30,811.02	31,428.19
4	PAKAIAN JADI	2,348.51	2,472.39	2,715.4	2,808.61	2,913.65
5	TEKSTILAINNYA	60,532.92	60,622.27	60,737.68	60,786.27	60,790.00
	JUMLAH	120,293.45	123,612.75	127,927.14	130,823.11	132,101.08

Sumber : BPS, BKPM  
angka diolah

Berdasarkan kesepakatan, bahwa Tahun 2005, industri TPT tidak lagi berdasarkan kuota, dan selanjutnya industri TPT memasuki pasar bebas yang dilandasi persaingan. Dengan kondisi dimaksud, industri TPT nasional menghadapi pesaing baru, yang ditandai dengan meningkatnya ekspor negara-negara Thailand, Vietnam dan Malaysia ke pasar yang sama. Ketergantungan terhadap bahan baku impor serta mesin dan peralatannya menunjukkan industri TPT nasional setiap saat dapat runtuh akibat ketergantungan dan perubahan kurs, serta besarnya investasi akan sejalan dengan besarnya kerugian.

Perhatian pemerintah serta dunia usaha untuk melakukan rekayasa dan rancang bangun menjadi penting mengingat sektor ini terkait erat dengan sumber pendapatan nasional di sektor non migas. Terjadinya kekacauan di sektor ini dipastikan pendapatan nasional (devisa) akan menurun. Berkaitan dengan tabel persebaran industri dan investasi, dalam tabel di bawah ini akan nampak besarnya produk TPT, tenaga kerja serta pemenuhan untuk kebutuhan ekspor.

Tabel No. 6  
Perkembangan IPTT Periode 1998 – 2002

NO.	INDUSTRI	1998	1999	2000	2001	2002
1	Investasi (Rp. Milyar)	3,128	3,320	4,315	2,896	1,278
2	Tenaga Kerja (Orang)	1.143	1.160	1.193	1.220	1.182
3	Nilai Prod. (Rp. Milyar)	68.614	75.791	86.813	89.818	82.412
4	Ekspor (US\$. Juta)	7.322	7.158	8.205	7.676	6.898
5	Impor (US\$. Juta)	2.022	1.716	2.285	2.441	1.736

Sumber : BPS, BKPM (angka diolah)

Dari data dimaksud dapat disimpulkan, bahwa sebagian besar produk TPT diproduksi berdasarkan kuota dan memberi kepastian berusaha sampai Tahun 2005. industri ini semakin kuat dikaitkan dengan bertambahnya investasi. Industri TPT perlu mendapat dukungan dari seluruh komponen bangsa untuk dijadikan perkuatan landasan perekonomian nasional, guna pemenuhan dalam negeri melalui fasilitasi perbankan (kredit dan sukubunga).

Dalam tabel dibawah ini nampak, bahwa angkatan kerja yang terbesar di sektor ini diserap oleh industri pakaian jadi, kain dan benang. Perbedaan mencolok industri TPT dengan industri lainnya, adalah tenaga kerja di sektor ini usia angkatan kerjanya relatif lebih dewasa. Maksudnya, angkatan kerja di sector ini mempunyai tanggungjawab sosial terhadap keluarganya. Setiap PHK yang melibatkan tenaga kerja di sektor TPT akan mempengaruhi ketahanan ekonomi keluarga, dan imbasnya pada ketahanan ekonomi nasional.

**Tabel No. 7**

**PERKEMBANGAN TENAGA KERJA 1995 – 2002**

**TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL**

(000)

NO	KOMODITAS	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
1	Serat Buatan	24,23	24,42	25,52	26,08	26,77	29,32	29,69	29,48
2	Benang	166,17	170,28	175,34	186,45	189,79	193,37	207,88	209,43
3	Kain	307,49	317,20	329,38	337,98	341,40	349,40	355,57	343,16
4	Pakaian jadi	323,95	329,44	346,17	348,42	355,24	372,72	376,59	350,90
5	Tekstil Lainnya	236,32	241,49	243,89	244,53	246,71	247,38	249,62	249,28
TOTAL		1.058,16	1.082,83	1.120,30	1.143,46	1.159,91	1.192,19	1.219,35	1.182,25

Sumber : BKPM, DEPPERINDAG RI (angka diolah)

Berdasarkan data Tahun 2000 terjadi PHK sebanyak 2.032 orang, tahun 2001 sebanyak 14.856 orang dan kemudian menjadi 19.038 orang pada bulan Juli. Menjelang akhir 2002 menjadi 35.926 PHK. Jumlah ini relatif kecil karena inilah data yang tercatat, sementara PHK terjadi pada banyak industri TPT kecil dan lokal yang ditangani keluarga dan penyelesaiannya tidak teridentifikasi. Dari kelompok industri TPT, PHK terjadi pada 157 perusahaan terbanyak pada industri garment sebesar 92 perusahaan, disusul industri tekstil, industri rajut sebanyak 5 perusahaan, pemintalan 3 perusahaan, bordir 2 perusahaan, karpet 2 perusahaan

Meskipun dalam kondisi krisis ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, namun penanaman modal pada industri TPT masih terjadi tahun 2002 yang secara kumulatif total penanaman naik 0,98 %, yaitu dari Rp 130.823, 11 Milyar pada Tahun 2001 menjadi Rp 132.101,08 Milyar pada Tahun 2002 atau 99,14 % dari sasaran 2002 sebesar Rp 132.250 Milyar, sementara penambahan jumlah perusahaan baru sebanyak 14 perusahaan. Adapun rincian perkembangan investasi pada Tahun 2002 menurut sektor adalah nampak seperti tabel dihalaman berikut :

Tabel No. 8

PERKEMBANGAN INVESTASI 1995 – 2002  
( UNIT : MILYAR RUPIAH )  
TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

NO	K.OMODITAS	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
1	Serat Buatan	7,135	7,298	7,578	8,605	10,939	11,640	11,929
2	Benang	18,538	18,913	20,614	22,289	23,077	24,777	25,040
3	Kain	27,297	28,231	29,222	29,624	30,458	30,811	31,428
4	Pakaian Jadi	2,030	2,288	2,349	2,473	2,715	2,8091	2,914
5	Tekstil lainnya	60,372	60,437	60,533	60,622	60,738	60,786	60,790
TOTAL		115,371.48	117,166.32	120,293.45	123,612.75	127,927.14	130,823.11	132,101.08

Sumber : Depperindag Thn 2003, angka diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Investasi pada Industri serat naik 2,48 %
- b. Investasi pada industri benang naik 1,06 %
- c. Investasi pada industri kain naik 2,00 %
- d. Investasi pada industri pakaian jadi naik 3,74 %
- e. Investasi pada industri barang jadi naik 0,01 5

Sebagai upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional, berbagai kebijakan diterbitkan pemerintah untuk menumbuhkembangkan berbagai kegiatan usaha, terutama sektor-sektor yang menghasilkan devisa, menyerap angkatan kerja, serta menggunakan bahan baku dalam negeri. Memperhatikan karakteristik sektor ini, sebagian besar komponennya masih impor, namun dalam prospek penerimaan

devisa menjadi tulang punggung, sehingga berbagai kebijakan untuk pengadaan bahan baku dan mesin, dapat masuk ke wilayah Indonesia dengan berbagai fasilitas. Berkembangnya kemajuan teknologi informasi serta berkurangnya dampak resesi global di awal 80 an, maka industri ini berkembang pesat seiring dengan penetapan kuota. Dalam tabel di halaman berikut nampak terlihat tingkat produktivitas sektor ini mencapai 80 - 90 % dari kapasitas terpasang seperti tabel berikut.

**Tabel No. 9**

**PERKEMBANGAN KAPASITAS DAN PRODUKSI  
TEKSTIL DAN PRODUKSI TEKSTIL 1995 – 2001  
( UNIT : TON )**

NO	Komoditas		1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
1	Serat Buatan	A	514.320	560.000	797.820	856.700	905.700	1.039.430	1.049.824
		B	476.275	523.129	617.660	746.835	839.566	970.749	961.041
2	Benang	A	1.622.890	1.929.000	1.937.250	2.074.313	2.107.007	2.298.692	2.321.679
		B	1.342.632	1.582.749	1.584.178	1.783.696	1.912.485	2.056.303	2.025.458
3	Kain	A	1.555.500	1.700.895	1.752.962	1.894.353	1.904.085	1.972.661	1.992.388
		B	1.104.950	1.208.184	1.241.137	1.341.245	1.346.236	1.546.360	1.561.824
4	Pakaian Jadi	A	441.168	469.000	486.062	564.900	572.026	573.502	584.972
		B	402.460	427.740	460.365	535.034	543.150	554.436	565.524
5	Tekstil lainnya	A	36.390	36.390	36.390	36.390	38.578	87.708	88.585
		B	27.292	25.473	21.834	21.834	22.534	42.152	42.995

A : Kapasitas B : Produksi

Sumber : DEPPERINDAG RI (angka diolah)

Produk TPT Indonesia sudah cukup dikenal di pasar internasional yang diawali produk-produk tradisional dan pada Tahun 2000 berada pada urutan ke 12 dunia. Pangsa pasar TPT Indonesia menunjukkan perkembangan tidak hanya pada



pasar kuota tapi juga ke pasar non kuota. Hal ini membuktikan usaha-usaha yang dilakukan ekspor telah memberikan hasil nyata seperti nampak dalam tabel di bawah ini :

**Tabel No. 10**

**PERKEMBANGAN NILAI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL 1995 - 2002**

( UNIT : MILYAR RUPIAH )

NO	KOMODITAS	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
1	Serat Buatan	1.878,00	2.048,58	2.448,00	5.785,95	6.563,70	5.579,14	5.523,34	5.411,74
2	Benang	8.452,92	9.746,19	9.755,44	24.935,26	27.124,73	24.954,40	24.580,08	23.444,91
3	Kain	9.470,45	21.573,60	34.201,75	34.201,75	34.201,75	35.227,80	35.589,08	34.073,21
4	Pakaian Jadi	10.745,55	11.610,90	19.729,80	44.025,70	49.063,50	54.951,12	56.050,14	52.085,10
5	Tekstil lainnya	-	-	-	-	72,10	71,37	72,80	3.645,14
TOTAL		25.927,90	29.000,17	42.511,80	68.613,91	75.790,23	86.812,62	89.417,00	82.411,85

Catatan : Hasil total bukan dari kumulatif,  
sumber Depperindag

## BAB IV

### ANALISA DAN PEMECAHAN MASALAH

#### A. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PILIHAN KONSUMEN

Sesuai dengan penetapan criteria seperti pada Gambar No. i adalah (harga, desain, motif, merk dan kualitas), maka berdasarkan uji AHP, yang menjadi factor dominan preferensi konsumen terhadap produk TPT secara berurutan adalah, 1 (*Desain* 0,3232), 2 (*Harga* 0,3017), 3 (*Motif* 0,2060), 4 (*Merk* 0,1314), 5 (*Kualitas* 0,0377). Secara keseluruhan pilihan terhadap produk dalam negeri sebesar (0,8720) sedangkan produksi luar negeri (0,1280) dan tingkat konsistensi relatif baik, disebabkan tetap pada 0,1 atau dibawah 10 % . Adapun hasil di atas merupakan rangkuman jawaban dari 30 orang Responden.

Adapun tahapan pembagian kuesioner terhadap responden adalah, tahap I, 10 orang responden yang mewakili institusi/lembaga, sedangkan pada tahap II, 20 Responden dengan kriteria pelanggan produk-produk TPT di pasar ( PT. SARINAH Jakarta, Jln. M.H. Thamrin). Kepada Responden ini tidak dilakukan identifikasi atau status responden, karena samplangnya dilakukan secara insidental. Dasarnya adalah adalah tingkat konsumsi atau daya beli, dengan pemikiran lokasi PT. Sarinah dikunjungi Konsumen dari berbagai strata sosial. Adapun dari 30 responden, yang paling kuat pilihannya terhadap produk dalam negeri berdasarkan hasil AHP adalah dengan skore 0,8720 sedangkan produk luar

negeri dengan skore 0,1280. Secara menyeluruh, dari lima (5) criteria yang ditetapkan, pada akhirnya responden tetap memilih produk dalam negeri, dengan komposisi pilihan antara produk dalam dan luar negeri seperti di bawah ini:

**Tabel No. 11**

**Perbandingan jawaban responden terhadap criteria preferensi**

No.	Kriteria	Produk Dalam Negeri	Produk Luar Negeri
1	Desain	0,9079	0,0921
2	Harga	0,9904	0,0096
3	Motif	0,6118	0,3882
4	Merk	0,9280	0,0720
5	Kualitas	0,8452	0,1548

Sumber : Jawaban responden, 2003

Kuatnya pilihan pada penggunaan produk dalam negeri didukung Responden Kelompok I (mewakili lembaga) yang memiliki akses langsung kepada dunia usaha atau industri TPT yang memiliki tendensi nasionalisme, sehingga dari 10 Responden hanya satu (1) orang memilih produk luar negeri. Pilihan ini terkait dengan profesi konsumen yang bergerak dibidang entertainment (Artis Sinetron), tetap konsisten dengan pilihannya untuk mendukung tugas atau kegiatan profesinya. Untuk tahap berikutnya (konsumen di Pasar) dari sebanyak 20 responden memiliki pilihan, yakni dua belas (12) responden memilih produk

luar negeri dan delapan (8) responden memilih produk dalam negeri. Hal-hal ini dipengaruhi oleh tingkat kebebasan responden, atau tidak memiliki ikatan tugas dengan bidang atau pembinaan industri TPT. Adapun hasil dari Analytical Hierarchy Process nampak pada Rekapitulasi Jawaban Responden pada lampiran No. 3.

## **B. USAHA PEMERINTAH UNTUK MEMBERDAYAKAN TPT DALAM NEGERI**

Seperti dikemukakan sebelumnya, penggunaan analisa AHP ditujukan untuk mengetahui faktor dominan dalam preferensi konsumen. Analisa selanjutnya digunakan tehnik deskripsi sebagai dasar kebijaksanaan pengembangan industri TPT dalam negeri, serta dampaknya terhadap ketahanan ekonomi nasional. Untuk mengetahui dan merefleksikan arah dan kebijaksanaan pemberdayaan usaha TPT nasional, maka faktor-faktor yang terkait dengan kriteria AHP dan kriteria lainnya, dijadikan dasar bagi pengembangan produk TPT dalam negeri.

Dengan demikian, untuk menghadapi tantangan masa depan, dengan asumsi, produk TPT nasional sebagai besar akan di pasarkan di dalam negeri, beberapa hal yang sangat terkait, terutama dengan faktor internal pelaku usaha. Untuk mendukung industri TPT faktor harga, pendapatan dan pengeluaran masyarakat memerlukan pendekatan-pendekatan yang berdimensi ekonomis

melalui penyelenggaraan otonomi daerah, pendekatan hukum, peran masyarakat, fasilitasi pemerintah dan dukungan dunia usaha.

### **1. Penyelenggaraan Otonomi Daerah**

Dengan terkonsentrasinya usaha TPT di P. Jawa, maka secara ekonomis akan menambah beban, disebabkan besarnya upah, modal yang lebih besar dan lahan yang semakin terbatas. Untuk itu, perluasan usaha TPT ke daerah lain di luar P. Jawa dapat menjadi pilihan, dengan asumsi otonomi daerah menjadi pemicu bagi pengembangan daerahnya melalui, penyerapan angkatan kerja, fasilitas perpajakan serta peluang-peluang ekonomis lainnya (insentif). Untuk pendekatan ini yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, pergeseran atau perluasan usaha ke daerah tidak menjadi beban bagi dunia usaha, karena orientasi “profit motif” tetap dominan dalam pengambilan keputusan perluasan/perpindahan tempat usaha. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah :

- a. Memberi berbagai kemudahan dalam sistem perijinan, dengan mengurangi margin cost yang bertendensi high cost/KKN
- b. Memberi kepastian hukum, akan besarnya retribusi daerah, serta jangka waktu pengolahan lahan serta Peraturan daerah lainnya yang relatif jangka panjang
- c. Dukungan infra struktur, terutama sarana transportasi

- d. Situasi yang kondusif, terutama ancaman keamanan maupun kegiatan-kegiatan separatis, atau masyarakat yang mengganggu kelancaran jalannya usaha.

Untuk itu, pemberdayaan asosiasi-asosiasi masyarakat, pekerja dan terutama dunia usaha yang terkait dengan industri TPT mendapat perhatian, sehingga kegiatan atau industri TPT dapat memberi manfaat bagi masyarakat daerah. Khususnya untuk sentra-sentra, seperti Pekalongan, Tasikmalaya, Solo dan Jogja, koordinasi dan komunikasi bisnis dan keamanan merupakan faktor yang tak dapat ditinggalkan. Faktor lain adalah, sistem perbankan atau perkreditan dengan memfasilitasi masyarakat, khususnya usaha kecil menengah.

## **2. Pendekatan Hukum**

Merujuk pada fenomena krisis, adanya PHK, atau pengurangan karyawan yang diikuti dengan berbagai demonstrasi, menyebabkan kegiatan usaha nasional pada situasi ketidakpastian. Pilihan kebijaksanaan melindungi karyawan atau perusahaan menjadi dilemmatis. Untuk itu, pendekatan hukum sejak awal harus dikedepankan dan diketahui bersama oleh buruh, pemilik modal dan penyelenggaranya. Pembaharuan produk-produk hukum harus dilakukan dan sesuai dengan kondisi normatif kemanusiaan, hukan pilihan ekonomis yang didasari kebutuhan. Penggantian peraturan harus mampu menjawab tuntutan perkembangan yang senantiasa berubah dan kini masalah HAM, lingkungan

harus menjadi bagian utama serta kepastian akan pengabdian yang diberikan oleh buruh. Pilihan strategis adalah peningkatan kemampuan profesionalisme aparat penegak hukum disamping keteladanan, tegas, konsisten dan tidak diskriminatif untuk memenuhi keadilan dan kebenaran. Keberadaan institusi/ organisasi di bidang penegakan hukum harus diperkuat. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah ;

- a. Peningkatan keteladanan
- b. Penegakan hukum yang tegas, manusiawi, konsisten dan tidak diskriminatif berdasarkan azas-azas keadilan dan kebenaran
- c. Penataan kembali dimensi organisasi yang meliputi identitas, sistem, struktur, sumber daya, hubungan antar manusia dalam organisasi, hubungan dengan organisasi lain dan peningkatan kinerja untuk mewujudkan pembangunan yang proporsional

### **3. Peran serta dan sinergi masyarakat**

Untuk mewujudkan ketahanan nasional di bidang perekonomian, maka peranserta masyarakat baik sebagai konsumen maupun sebagai bagian integral dari kebijakan publik, maka peningkatan kegiatan sosialisasi diperlukan dengan langkah bersama, sehingga masyarakat, pengusaha dan pemerintah menerima manfaat dari kebijakan yang diterbitkan. Pembudayaan setiap kebijakan publik,

tentunya diawali dengan keteladanan dan hal ini sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia yang paternalistik.

Dengan dijadikannya PPDN sebagai Kalender Kegiatan Politik bersamaan dengan peringatan Kebangkitan Nasional (20 Mei Tahun 2003), masyarakat harus terlibat dengan representasinya. Memperhatikan keberhasilan gerakan KB, maka gerakan PPDN harus memiliki jaringan sampai ke masyarakat. Disamping pendekatan ekonomis, masyarakat harus mendapat produk yang seimbang dengan biaya yang dikeluarkan. Adanya sinyal bahwa terjadinya "high cost" akibat faktor non ekonomi mengakibatkan rendahnya daya saing, sementara daya beli masyarakat relatif rendah. Pendapatan dan daya beli sebagai acuan dalam pengambilan keputusan konsumen, maka untuk meningkatkan daya beli, perlu meningkatkan pendapatan dengan membuka lapangan kerja baru.

Faktor lain adalah peran perlindungan konsumen, masyarakat harus memiliki wadah yang efektif dalam menyampaikan kerugian-kerugian material dan non material akibat dari transaksi yang dilakukan, sejalan dengan amanat UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Proses penyelesaian yang relatif singkat serta tidak mengeluarkan biaya tambahan, akan membuat masyarakat responsif dengan berbagai program atau imbauan pemerintah. Untuk mengetahui arah dan perkembangan permintaan pasar, dalam tabel di halaman berikut nampak tanggapan konsumen terhadap Produk TPT dalam negeri, sebagai upaya penyesuaian pasar.



Tabel No. 12

Tanggapan responden terhadap Statement TPT dalam negeri

NO	URAIAN	PERNYATAAN	
		SETUJU	TIDAK SETUJU
1	Kuno dan ketinggalan zaman	126	148
2	Mendukung anjuran, wujud nasionalisme baru	79	195
3	Motifnya kaya dengan kultur Indonesia	127	147
4	Kualitasnya tidak mendukung	109	165
5	Desainnya tidak sesuai dengan bentuk tubuh	135	139
6	Merek tidak merupakan jaminan mutu	149	125
7	Harganya relatif mahal dibandingkan produk impor	165	109
8	Menggunakan produk dalam negeri dan impor sama	140	134
9	Karena pendapatan berkurang	175	99
10	Terpaksa, tidak mampu membeli produk impor	181	93
11	Motifnya tidak inovatif, kurang kreasi	99	175
12	Penggunaan warna konvensional	93	181
13	Tidak prestisius	147	127
14	Sesuai dengan anggaran (pengeluaran)	153	121

Sumber : Hasil kuesioner 2003, N = 274

Sejalan dengan tabel di atas, jawaban para responden tidak mempengaruhi analisa, adapun statement di atas ditujukan untuk mengetahui secara kontekstual atas preferensi konsumen. Namun yang prinsip adalah statement atau pernyataan No. 2 dan 3, sebagai bagian dari tolok ukur keberhasilan sosialisasi PPDN. Besarnya jawaban responden, menunjukkan program sosialisasi belum berhasil dengan optimal.

Pada tabel di bawah ini, diajukan pula pada responden tentang media cetak yang sering di baca, untuk mengetahui atau memilih media cetak yang akan digunakan untuk program pensosialisasian.

Tabel No. 13

Media cetak yang sering di baca

URAIAN	PILIHAN				
	1	2	3	4	5
Kompas, Republika, Koran Tempo, Harian Ekonomi Neraca, Rakyat Merdeka, Pelita, Warta Kota, Harian Terbit, Jakarta Post, Media Indonesia, Suara Pembaruan, Investor Indonesia, Suara Karya, Pos Kota, Berita Buana, Sinar Pagi, The Straits Times, Fihnancial Times, The Asian Wall Street Journal, International Herald Tribune, The Business Times, Tempo, Forum Swasembada, Eksekutif, Business Week Eds Indonesia, Prospektif, Info Kompu, Gatra Femina, Pilar, Intisiasi, Investor, Info Bank, Warta Ekonomi Info Bisnis.	K O M P A S	R E P U B L I K A	M E D I A I N D O N E S I A	R A K Y A T M E R D E K A	P O S K O T A

Sumber : Hasil kuesioner diolah, 2003 N = 274

Pada tabel di atas, nampak para Responden memilih Harian Kompas, Republika, Media Indonesia, Rakyat Merdeka dan Pos Kota menjadi media cetak yang sering dibaca. Untuk pengembangan atau pensosialisasian PPDN, instansi terkait dapat menyusun strategi dengan menetapkan pilihan media cetak mana yang akan digunakan, serta kemasan (berita) yang akan disampaikan. Adanya asumsi umum atau segment market tertentu sebagai pelanggan media cetak,

memberi gambaran akan bobot atau beban berita yang dapat disampaikan, sesuai dengan jawaban responden di bawah ini

**Tabel No. 14**

**Faktor-faktor pendukung dalam penentuan Pembelian Produk TPT**

NO	URAIAN	PILIHAN		
		1	2	3
1.	Besarnya pendapatan	57	43	39
2.	Harga produk	53	31	32
3.	Desain yang sesuai	17	19	29
4.	Kualitas, dengan mengabaikan motif dan desain	22	33	34
5.	Motif sesuai rencana penggunaan	7	12	17
6.	Merek telah digunakan relatif lama	16	14	14
7.	Kuatnya pengaruh iklan	6	21	10
8.	Coba-coba	4	9	12
9.	Berlangganan pada toko tertentu	5	8	9
10.	Feeling atau mood	7	10	16
11.	Sesuai kebutuhan	8	19	13
12.	Yang penting produk luar negeri	5	11	12
13.	Yang penting produk dalam negeri	7	12	11
14.	Anggaran atau pengeluaran	50	24	16
15.	Menambah prestise	10	8	10

Sumber : hasil kuesioner diolah, Tahun 2003, N = 274

Pada tabel di atas, yang diinginkan adalah jawaban yang penting produk dalam negeri (No. 13), untuk mengetahui preferensi internal konsumen. Jawaban responden, jawaban yang diinginkan masih minimal, yaitu sebesar 7, 12, 11 responden sebagai pilihan 1, 2, dan 3. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran yang dipicu faktor internal dan eksternal belum dapat mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen. Pada pilihan lain yang terkait dengan emosional (desain, motif dan prestise) pada umumnya konsisten, dalam arti pilihannya tidak bersifat ekonomis dan teknis.

Adanya jawaban responden terhadap kuatnya pengaruh iklan atau feeling dapat menjadikan konsumen yang bertendensi untuk tidak memilih produk lokal. Hal ini dikaitkan dengan kemampuan ekonomis dan pemahamannya terhadap informasi, atau sebaliknya konsumen ini dapat menjadi potensi aktif jika informasi yang diberikan memadai dan dapat menyentuh emosional konsumen. Pada Tabel di bawah ini diajukan pertanyaan pada responden untuk mengetahui wacana responden jika industri TPT dikembangkan.

**Tabel No. 15**  
**Faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian**

NO	URAIAN	PERNYATAAN				
		SM	M	C	TM	STM
1.	Sumber daya manusia	26				
2.	Investasi atau permodalan	27				
3.	Penyediaan bahan baku	15				
4.	Research	19				
5.	Sistem moneter	21				
6.	Akses pasar	15				
7.	Kerja sama regional	9				
8.	Art graphics	8				
9.	Pengembangan Iptek	16				
10.	Perlunya contoh (panutan)	46				
11.	Adanya gerakan kesadaran nasional	14				
12.	Adanya pemaksaan atau kewajiban	11				
13.	Tidak perlu ada imbauan	47				

SM = Sangat mendukung; M = Mendukung; C = Cukup; TM = Tidak Mendukung dan STM = Sangat Tidak Mendukung. Sumber : hasil kuesioner, 2003, N = 274

Pada tabel di atas yang diinginkan adalah jawaban responden yang sangat mendukung adanya program gerakan kesadaran nasional (No. 11) dan, panutan, pemaksaan atau kewajiban (No. 12 dan 13) bagi golongan masyarakat yang terikat secara langsung dengan kewajibannya (PNS, TNI, POLRI serta masyarakat

pendidikan yang mendapatkan bantuan secara langsung dari Masyarakat. Adanya heterogenitas dari responden, menyebabkan pilihan pada research, moneter, akses pasar maupun dan kerja sama regional.

#### **4. Fasilitasi Pemerintah dan Kemauan Nasional**

Sesuai dengan data, bahwa basis utama kegiatan industri TPT adalah untuk import, maka upaya peningkatan kualitas dengan memfasilitasi dunia usaha merupakan peluang meningkatkan daya saing. Peran strategis perbankan, seperti yang dilakukan negara lain (Taiwan), bahwa untuk industri TPT atau yang bersifat menyerap tenaga kerja, memiliki peluang produk ekspor dan menggunakan bahan baku di dalam negeri, suku bunganya mencapai 5 % per tahun. Peluang ini dimanfaatkan pelaku usaha sesuai dengan norma dan etika dunia usaha bagi pengembangan produknya. Hal ini berbeda dengan pelaku usaha di dalam negeri, perbedaan harga bahan bakar solar misalnya, untuk industri atau transportasi, dimanfaatkan pelaku usaha yang nakal bagi kepentingan usahanya.

Adanya wadah dunia usaha (KADIN) diharapkan menjadi pemacu atau stimulus entrepreneur yang bertanggungjawab, sehingga kegiatan usaha yang dilakukannya bukan untuk mengambil untung semata, tetapi menjadi bagian dari pengembangan inovasi dan kreasi. Kecenderungan dunia usaha menjadi pressure group agar asosiasinya mendapat pekerjaan dari Pemerintah, semakin tidak relevan dengan era reformasi dan transparansi. Dunia usaha yang diharapkan

ialah dunia usaha yang mandiri, bahkan ekspansi dalam arti mampu membuka peluang ekspor dan terus melakukan inovasi.

Untuk itu, langkah yang dilakukan adalah memperkuat atau memperketat sistem perijinan bagi dunia industri TPT serta membuka peluang untuk usaha kecil dan menengah di bidang industri TPT.. Hal ini menjadi perhatian dikaitkan dengan sistem moral dan etika dari perkreditan dan fasilitasi. Penyelesaian kasus BLBI misalnya, melahirkan rasa cemburu bagi dunia usaha kecil yang dipaksa untuk menyelesaikan hutang piutangnya dengan sita jaminan. Dengan demikian keterlibatan dunia berbagai lembaga terkait serta LSM yang berkiprah dalam fasilitasi pendidikan, perlu dijadikan mitra untuk mempercepat alih teknologi. Keberhasilan dari LSM adalah kepercayaan dari pemerintah, dan sebaliknya LSM harus berfungsi sesuai dengan kaidahnya dan tidak menjualbelikan konsepsi atau berita-berita yang factual untuk kepentingan sesaat atau mempolitisasinya. Hal-hal yang perlu dilakukan antara lain :

- a. Meningkatkan kemampuan manufacturing perusahaan-perusahaan nasional untuk meningkatkan rantai nilai produk
- b. Membuat program-program pendidikan dan pelatihan khusus mengenai pertekstilan, dengan mensinerjikan lembaga pendidikan yang ada atau membuka kejuruan yang lebih strategis dan memiliki korelasi yang sangat signifikan dengan pengembangan kreasi dan inovasi industri TPT nasional melalui lembaga-lembaga R&D dengan

PT untuk menyiapkan rekayasa dan rancangbangun, sehingga dari hulu hingga ke hilir sistemik..

- c. Mengadakan sumber daya nasional yang kompetitif, baik yang bersumber dari kerjasama internasional maupun dalam negeri
- d. Menyiapkan industri utama dengan pengembangan sistem pengadaan bahan baku, baik melalui penyediaan bahan baku kawasan
- e. Mengkaji lebih intens sisi permintaan baik di dalam dan luar negeri dan terutama di dalam negeri menyongsong Tahun 2005 pasca kuota.
- f. Mensinkronkan seluruh ketentuan atau peraturan

#### **5. Dukungan Dunia Usaha**

Adanya wadah dunia usaha (KADIN) diharapkan menjadi pemicu atau stimulus entrepreneur yang bertanggungjawab, sehingga dunia usaha yang dilakukannya bukan untuk mengambil untung semata, tetapi menjadi bagian dari pengembangan inovasi dan kreasi. Untuk itu yang harus dilakukan antara lain :

- a. Restrukturisasi permesinan, sehingga memiliki kapasitas yang lebih efektif dan efisien dalam sistem produksi
- b. Menyediakan dan menyelenggarakan diklat-diklat yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, kreasi dan inovasi sehingga setiap produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang berlaku atau ditetapkan

- c. Memfasilitasi lembaga-lembaga pengembangan ilmu dan teknologi bersama-sama dengan instansi terkait lainnya.
- d. Bekerja sama dengan pemerintah untuk menyesuaikan dan atau memodifikasi berbagai peraturan dan ketentuan yang dapat memberi ruang publik bagi seluruh komponen yang terkait
- e. Melakukan diversifikasi produk yang dapat menguntungkan baik bagi produsen maupun konsumen
- f. Ikut berperan dalam pelaksanaan regulasi, sehingga usaha nasional menjadi efisien dan menjadi menarik bagi investor asing untuk melakukan joint venture
- g. Membuat program yang dapat dilaksanakan seluruh mitra dibidang industri TPT, sehingga seluruhnya dapat bersaing secara sehat dan dinamis.

### **C. BESARNYA DEvisa YANG DIGUNAKAN UNTUK PRODUK TPT IMPOR**

Untuk mengetahui besarnya devisa yang hilang atau digunakan untuk produk impor TPT, dilakukan pendekatan dengan mengidentifikasi komponen-komponen produk TPT seperti mesin, kapas, serat atau serat buatan, kain. Pada dasarnya impor bahan baku dimaksud selain kain, dipastikan menjadi barang atau bahan modal, yang diproses menjadi produk TPT. Impor bahan baku dimaksud,



tetap dilakukan mengingat keterbatasan produk dalam negeri. Sedangkan produk TPT impor yang berpotensi menjadi barang/produk konsumsi adalah produk kain.

Berdasarkan Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2002, seluruh produk impor non migas sebesar Tahun 2001 dan 2002 untuk barang konsumsi 2.287 Juta US\$ dan 2.576 Juta US\$, bahan baku 20.866 Juta US\$ dan 20.281 Juta US\$ dan barang modal 5.789 US\$ dan 5.402 US\$. Dari data di atas, tidak dapat diklarifikasi besaran impor TPT untuk dikonsumsi di dalam negeri, namun dipastikan konsumsi untuk produk TPT baru ada. Pada tabel di bawah ini nampak data berdasarkan BPS sebagai komoditi impor.

**Tabel No. 16**  
**Barang-Barang Impor yang menggunakan produk TPT Thn 2001-2003**  
**(Dalam US\$)**

No.	Jenis Komoditi	2003	2002	2001
1.	Pakaian dan Tekstil Barang Bekas	897.443	1.568.301	3.184.575
2	Pakaian Lelaki dan Anak Lelaki bukan Rajutan	3.721.339	3.228.707	2.742.502
3	Pakaian Wanita dan Anak Wanita bukan Rajutan	1.056.473	8.614.937	1.678.514
4	Pakaian Lelaki dan Anak Lelaki Rajutan	319.096	891.112	442.114
5	Pakaian Wanita dan Anak Wanita Rajutan	295.309	1.143.879	621.150
6	Barang-barang lainnya dari tekstil	2.626.342	8.341.439	6.248.224
7	Perlengkapan pakaian dari Kain Tekstil	2.815.947	5.415.809	5.828.508

Sumber : BPS, angka diolah, khusus untuk 2003 s.d. bulan Juli

Untuk mengetahui besaran impor produk TPT bekas, yang dilakukan oleh Asosiasi Pedagang Pakaian Bekas (APPB) berdasarkan Berita Buana, 30 Mei 2003 angkatan kerjanya 50.000 orang, dengan omzet Rp 250 Milyar/per bulan atau Rp 3 Trilyun per/tahun. Merujuk pada yang diterbitkan oleh BPS, khusus besaran produk TPT bekas mencapai  $\pm$  33 dan 26 Milyar untuk Tahun 2001 dan 2002 ada perbedaan yang mencolok. Pada harian yang sama dikemukakan tangkapan Ditjen Bea dan Cukai sebanyak 14 – 15.000 Bal setiap minggu yang berisi 500 potong pakaian atau 300 juta pakaian bekas/tahun. Dengan jumlah penduduk 220 juta, besarnya produk TPT impor bekas, dan dikorelasikan dengan angka kemiskinan, pengangguran dan rata-rata konsumsi untuk produk TPT, dapat diasumsikan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia termasuk kategori pengguna produk impor (bekas). Asumsi ini berdasarkan Statistik Indonesia 2001, konsumsi produk TPT di Perkotaan adalah Rp 3.265, Rp 3.885 dan Rp 8.394 per bulan untuk tahun 1993, 1996 dan 1999.

Jenis-jenis produk TPT bekas dipasarkan dilokasi/kios/los bahkan toko dengan label “Eks Impor” diminati masyarakat dari berbagai strata sosial local (menengah atas). Disamping relatif murah dan keadaan produk dimaksud mendekati kondisi 75 – 90% dari keadaan baru sehingga memiliki daya saing tinggi dibandingkan dengan produk-produk lokal dipasar yang sama. Tarik ulur mengenai eksistensi pedagang TPT bekas akhirnya disepakati dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Majelis Pengrajin Produk Tekstil Pancasila

(AMPIPT). APPB mendapat komoditi dari AMPIPT dengan bentuk konsinyasi (Berita Buana, 30 Mei 2003).

Solusi yang baik dikatkan dengan besarnya angkatan kerja APPB sebesar 50.000 orang. Hal yang mendasar ialah besarnya omzet APPB yaitu Rp 250 Milyar/per bulan atau Rp 3 Trilyun per/tahun. Memperhatikan besarnya omzet serta tinjauan lapangan ke berbagai lokasi APPB (Pasar Senen, Pasar Baru, Pasar Minggu), dengan tempat tempat yang memadai, maka kategori pelanggan tidak saja masyarakat golongan bawah, melainkan masyarakat golongan menengah atas.

#### **D. RELEVANSI INDUSTRI TPT DAN KETAHANAN EKONOMI NASIONAL**

Untuk melindungi atau memperkuat industri TPT nasional, pemerintah, swasta serta komponen bangsa lainnya yang terkait dengan industri TPT sebagai bagian dari perkuatan ketahanan ekonomi nasional, perlu didukung strategi yang komprehensif dan integralistik. Dampak dari kegagalan penanganan industri TPT, akan memperlebar kesenjangan faktor-faktor sosial lainnya, dan perkiraan akan munculnya demonstrasi/unjuk rasa, PHK, penurunan upah buruh/regional dan penutupan perusahaan disebabkan inefisiensi dan tidak memberikan profit bagi pemilik modal. Hal seperti ini dapat muncul kembali, disaat industri TPT terkena imbas krisis moneter dan perekonomian atau adanya kebijaksanaan yang

tidak sinkron dengan pengembangan industri TPT. PHK dan pengurangan karyawan, dapat dijadikan solusi dunia usaha jika besarnya biaya produksi, adanya nuansa ketidakpastian, ditinjau dari segi politik dan ekonomi, terutama dengan maraknya kerusuhan-kerusakan di dalam negeri yang tidak kondusif dengan dunia usaha.

### **1. Korelasi stabilitas ekonomi dengan ketahanan ekonomi nasional**

Merujuk pada factor-faktor determinan Ketahanan Ekonomi Nasional yang dikemukakan Bambang Sudibyo sebelumnya, stabilitas ekonomi sangat terkait dengan inflasi, bunga bank, kurs rupiah dan investasi.

#### *Inflasi*

Upaya yang terus menerus dari pemerintah untuk menekan inflasi dari dua digit menjadi satu digit pada Tahun 2003 menjadi kenyataan. Hal ini tercapai dikaitkan dengan strategi yang komprehensif dan integralistik yang disertai dengan pengadaan pasokan untuk kebutuhan dalam negeri dengan melakukan kalkulasi setiap event-event nasional, baik dalam perayaan-perayaan hari besar atau kemampuan mengidentifikasi gejala pasar dengan memperhitungkan keseimbangan konsumsi dan pasokan. Kondisi ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, inflasi yang terbesar berdasarkan Laporan Tahunan Bank

Indonesia terjadi pada Tahun 1998, dan besaran inflasi sejak tahun 1998 sampai dengan Tahun 2002 adalah 77,63 %, 2,01 %, 9,35, 12,55 % dan 10,03 %.

Berkembangnya transparansi di era reformasi, hal-hal terselubung dalam penetapan harga menjadi berkurang, kini harga mendekati real cost dan biaya produksi tidak dibebani dengan biaya-biaya lain. Tumbuh dan berkembangnya eksportir maupun importir, maka model monopoli ataupun oligopoly tidak lagi marak, sehingga memberi peluang bagi pelaku usaha baru untuk ikut bersaing. Hal seperti ini mendukung terwujudnya efisiensi dan pada gilirannya mendukung stabilitas perekonomian.

### *Bunga Bank*

Disamping tingkat inflasi, stabilitas ekonomi dipengaruhi pula oleh faktor Bunga Bank. Perkembangan di kawasan atau regional pasca krisis, pemerintahan yang berkuasa berupaya maksimal untuk memulihkan perekonomian nasional melalui pengembangan industri, khususnya industri yang berpeluang dan menarik devisa dan pengadaan pasokan bagi kebutuhan di dalam negeri. Industri TPT pilar ekspor non migas, masih sangat tergantung dengan permodalan atau joint venture dengan pihak asing, disebabkan keterbatasan kemampuan teknologi, permodalan dan permesinan. Upaya-upaya yang dilakukan negara pesaing, antara lain menurunkan suku bunga pinjaman bagi industri yang berpotensi memberikan devisa, menyerap tenaga kerja dan

menggunakan komponen atau bahan baku dari dalam negeri, belum dapat diikuti hingga 5 %, seperti dalam lampiran 5.

Hal ini dilakukan oleh negara maju dibidang industri pertanian, sehingga produknya memiliki daya saing tinggi. Faktor lain menyebabkan rendahnya daya saing industri TPT nasional, suku bunga tinggi dan pinjaman dengan mata uang asing, bahan baku impor dan teknologi asing. Adapun besaran suku bunga di dalam negeri berdasarkan laporan tahunan Bank Indonesia Tahun 2002, seperti dalam tabel di bawah ini

**Tabel No. 17**  
**Rata-rata Suku Bunga Bank di Indonesia Tahun 2001-2002**

No.	Keterangan	Tahun 2001	Tahun 2002
1	Modal Kerja	19,19 %	18,25 %
2	Investasi	17,90 %	17,82 %
3	Konsumsi	19,85 %	20,21 %

Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2002

#### *Kurs Rupiah*

Menguatnya mata uang rupiah yang pada periode 1997-1998 hingga mencapai Rp 18.000an dan kini menjadi Rp 8.400,- s.d Rp. 8500,- menunjukkan upaya yang dilakukan dalam skala nasional menuju integrasi. Untuk itu, dalam mendukung perkuatan perekonomian nasional melalui stabilitas nilai kurs adalah, mengurangi gejolak-gejolak atau factor sentiment yang tidak terkait langsung dengan sistem penetapan suku bunga, namun secara emosional dapat mengurangi tingkat kepercayaan publik. Pada lampiran 6 nampak factor-faktor sentimen yang

mempengaruhi nilai kurs pada periode dimaksud berdasarkan laporan tahunan Bank Indonesia Tahun 2002. Peran Bank Sentral untuk menjaga stabilitas mata uang dengan berbagai instrumen yang dimiliki, perlu didukung untuk mempertahankan tingkat nilai yang ekonomis dan disepakati bersama pada level tertentu. Otoritas Bank Sentral akan berarti dan bermanfaat bagi bangsa dan negara, jika pengelolanya menempatkan kepentingan nasional di atas segalanya, dan tidak melakukan kegiatan yang bersifat trial and error.

Disamping itu, pemberdayaan berbagai institusi pemerintah terutama BUMN, Bursa Efek dan Badan Pelaksana Bursa Komoditi serta lembaga-lembaga swasta lainnya yang terkait, dapat didayagunakan jika pengelolaannya transparan dan memiliki visi dan misi yang jelas, yaitu keuntungan bagi masyarakat dan dunia usaha. Dalam hal ini, peran pejabat publik yang mengelola berbagai instansi terkait dimaksud, ikut mempengaruhi kredibilitas dan legalitas instansi yang dikelolanya.

## **2. Korelasi integrasi ekonomi dengan ketahanan ekonomi nasional**

Sesuai dengan tabel sebelumnya, bahwa industri TPT terkonsentrasi di P. Jawa, yaitu dari 2.606 Produsen TPT, 138 tersebar di P. Sumatera, Bali dan Sulawesi dan di P. Jawa 2.468 produsen. Konsekuensi dari keberadaan produsen dimaksud, angkatan kerja yang terserap tentunya didominasi oleh angkatan kerja

disekitar lokasi (local/daerah). Disisi lain, kondisi perekonomian yang buruk seperti masa krismon, angkatan kerja di P. Jawa yang paling menderita.

Adanya asumsi, bahwa persebaran yang berimbang diikuti dengan penyerapan angkatan kerja yang berkualitas dapat menarik angkatan kerja baru serta membuka peluang efisiensi. Dengan karakteristik geografi Indonesia, peluang pengadaan bahan baku dari daerah atau lokasi industri, dapat dikembangkan untuk pemenuhan bahan baku jangka panjang. Disisi lain, dengan adanya persebaran lokasi industri TPT secara tidak langsung ikut membantu distribusi pendapatan antar daerah. Dengan berkembangnya industri TPT pada suatu daerah baru, maka akan diikuti dengan industri lainnya, mengingat industri TPT relatif lebih banyak memerlukan industri pendukung lainnya.

Merujuk pada pengalaman krismon serta upaya pemulihan perekonomian nasional, kuatnya jaringan dunia usaha di dalam negeri akan memperkuat hubungan antar sektor. Tumbuh dan berkembangnya industri TPT di dalam negeri secara merata dan berimbang, akan memperkuat keterkaitan usaha di dalam negeri dan memudahkan berbagai penyelesaian kegiatan perekonomian. Bagi pimpinan atau penyelenggara pemerintahan di daerah, tumbuh dan berkembangnya industri antar sektor akan melahirkan berbagai peluang usaha dan diikuti dengan penyerapan angkatan kerja. Disisi lain, peran penyelenggaraan otonomi daerah akan semakin besar dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan daerah untuk mendukung terwujudnya efisiensi. Pendapatan asli daerah harus



(PAD) harus dijadikan out put bagi pengembangan daerah dan bukan dijadikan input. Kerancuan mengenai PAD menjadikan industri di daerah tidak menjadi efisien dan kembali ke kota-kota besar di P. Jawa karena besarnya pungutan/retribusi dan banyaknya campurtangan pemerintah daerah.

Untuk menumbuhkan industri TPT yang kuat dan memiliki keunggulan desain pada tekstil tradisional, terletak pada nilai-nilai simbolik atau nilai ritualnya. Faktor emosionalnya dilandasi kehidupannya yang diwarnai oleh hal-hal yang bersifat simbolik dan ritual sebagai bentuk hubungan mikro dan makro kosmos. Hal ini ditandai dengan motif dan warna-warna tradisional, terkecuali untuk kepentingan bisnis semata, sehingga dapat digunakan motif dan warna kontemporer, untuk jenis Ulos, Lurik, Kain Tenun Ikat. Mereka menampilkan simbol-simbolnya di dalam tekstil. Simbol-simbol terekspresikan lewat bentuk, motif dan pilihan warnanya. Pilihan warna TPT tradisional disesuaikan dengan simbol yang hendak mereka sampaikan ternyata memiliki nilai estetik yang tinggi.

Sebagai kekayaan ekspresi yang memiliki nilai estetik, produk TPT tradisional sangat beragam, menunjukkan adanya kekayaan sumber daya budaya yang mampu merekat dan menggugah nilai-nilai atau emosi. Karena memiliki nilai-nilai ritual, maka direproduksi secara turun-temurun dan menjurus monoton karena terbuai dengan nilai-nilai legenda. Dalam konteks ini terjadi paradoksal, apakah kekuatan atau kelemahan. Dengan adanya pembatasan penggunaan motif terhadap produk TPT, maka pembuatan atau memproduksi jenis tersebut semakin

terbatas yang dibantu oleh transformasi budaya dari negara lain, khususnya untuk motif-motif yang berlaku secara universal. Adanya keinginan atau melestarikan nilai-nilai budaya terhadap produk TPT, maka penggunaannya pada acara-acara atau pesta-pesta tradisional, atau hari-hari besar yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai wahana persatuan dan kesatuan melalui proses budaya. Dengan kondisi seperti dimaksud, kekayaan motif dapat dikembangkan.

Demikian pula halnya dengan desain, adanya nilai-nilai religius untuk desain pakaian (busana muslim) membuat segment market yang baru terbatas, atau pembatas bagi non muslim untuk memakainya. Adanya budaya coba-coba, tentu tidak diterima golongan mayoritas jika pemahaman budaya diidentikkan dengan prosesi religius. Kekayaan desain sangat kuat memberi nilai tambah khususnya dengan sentuhan teknologi dan kultural. Perubahan dan pergeseran pasar didukung oleh kemajuan teknologi informasi, berbagai desain dan motif tampak bermunculan dari rumah-rumah mode melalui informasi elektronika. Terlalu kuat terhadap desain-desain tradisional, maka peluang pasar semakin terbatas. Desain dan motif, nampak sangat kuat menjelang hari raya, berbeda halnya dengan Natal atau Imlek (hanya warna), yang tidak terikat dengan desain dan motif, tentunya musim ini dapat dijadikan ajang untuk inovasi dan kreasi.

Pengertian dan pendekatan desain modern yang akan dirujuk, perlu disepakati agar produk TPT nasional menjadi tuan di negeri sendiri, melalui pemanfaatan lembaga pendidikan untuk mengembangkan wacana melalui

pendekatan lintas dan multi disiplin, sehingga penetapan desain sesuai dengan selera pasar. Melalui pengembangan pendidikan desain dapat membimbing para pengrajin lokal agar setiap produk sesuai dengan permintaan pasar. Untuk menjadikan Industri TPT mampu menembus pasar internasional khususnya segment menengah atas, serta di dalam negeri mampu menyaingi produk-produk impor, maka dalam hal pendekatan kualitas, hal yang paling strategis adalah penguasaan teknologi pada industri serat, pemintalan, pertenunan dan pakaian jadi serta barang jadi tekstil lainnya. Teknologi yang digunakan mengarah kepada peningkatan kecepatan dan ketepatan yang menuju kepada peningkatan produktivitas, efisiensi dan mutu. Namun kegiatan R&D, inovasi teknologi masih sangat kurang apabila dibandingkan dengan industri tekstil dan produk tekstil di negara-negara lapisan atas.

Perkembangan yang mencolok pada industri serat (serat staple polyester dan rayon serta filament nylon), demikian pula dengan pemintalan dengan adanya teknologi baru seperti : short staple, long staple, rotor dan proses open end mengakibatkan persaingan semakin ketat. Sementara pada industri pertenunan dan perajutan telah berkembang shuttleless loom untuk kain halus. Faktor lain dalam peningkatan kualitas, adalah standarisasi walaupun belum ada aduan yang mencolok kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) terhadap kualitas produk-produk TPT nasional. Dengan melakukan uji passif (pengaduan), YLKI melakukan uji aktif dengan mengambil sample untuk mengetahui apakah sesuai dengan jenis produk yang disebutkan.

Merujuk pada tabel 14 (hal. 86) tujuan untuk mengetahui bentuk nasionalisme baru yaitu yang penting produk dalam negeri, hasil kuesioner menunjukkan, faktor-faktor pengaruh (preferensi konsumen) antara lain iklan masih rendah. Dengan demikian, penyebarluasan informasi yang dilakukan pelaku usaha maupun pensosialisasian pemerintah yang telah dilakukan selama ini, belum menyentuh tingkat emosional konsumen.

Untuk itu, dalam penetapan gerakan sosialisasi program-program pencanangan gerakan nasional, melalui talk show, penayangan iklan, penyebaran sticker, spanduk, pameran-pameran, seminar dan diskusi, partisipasi, serta pemberdayaan berbagai lembaga-lembaga kemsyarakatan menjadi strategis. Dalam konteks sosialisasi metode AIM (Awareness, Improvement dan Maintenance) menjadi satu paket kegiatan dan dilakukan secara terukur dengan menetapkan jenis kegiatan serta tolok ukur masing-masing.

Awareness (sosialisasi) tentunya dilakukan melalui sistem komunikasi, informasi dan edukasi dengan tujuan untuk kesamaan persepsi membangun citra, sikap positif serta menumbuhkan rasa kebanggan terhadap produk buatan Indonesia. Adapun sebagai sasaran adalah, konsumen yang memiliki daya beli relatif lebih besar (menengah ke atas), rasional dan logis dan ikut berperan sebagai media pembentukan opini masyarakat. Dengan keberadaan kelompok masyarakat (golongan ini) maka pertumbuhan atau pemerataan penggunaan produk dalam negeri akan lebih cepat. Sebagai tolok ukur keberhasilan

Awareness antara lain: adanya perubahan image atau citra di masyarakat, pilihan terhadap produk TPT dalam negeri meningkat, mutu, desain, motif dan kualitas meningkat.

Seperti Awareness, program Improvement ditujukan kepada masyarakat profesi atau mempunyai keterkaitan langsung dengan program PPDN, dengan sasaran terbatas seperti mutu, standard, pelayanan. Untuk kelompok ini, stimuli yang efektif antara lain kebijakan publik yang membuat suasana usaha lebih kondusif. Fasilitasi latihan, lokakarya dan klinik bisnis diharapkan dapat melahirkan multiplier effect. Untuk tolok ukur program ini adanya pertambahan nilai dari setiap usaha yang dilakukan kelompok masyarakat ini serta meningkatnya penggunaan komponen local, dan adanya HAKI. Tolok ukur lainnya adalah kemajuan bidang R&D.

- Faktor lain yang sama strategisnya adalah Maintenance, seperti pemahaman umum maka kegiatan maintenance harus dilakukan secara periodic dan bukan setelah adanya ekses. Adanya ekses dari setiap kebijakan, lebih spesifik menunjukkan adanya benturan nilai. Dengan demikian, dalam hal maintenance, dunia usaha dan khususnya pemerintah tanggap terhadap berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat. Namun perlu digarisbawahi, bahwa respons yang dilakukan bukan untuk kepentingan sepihak. Misalnya, TPT bekas (impor), secara ekonomis konsumen diuntungkan, namun sebagai bangsa serta kesinambungan program lainnya, perlu dukungan kebersamaan.

### **3. Korelasi Ketahanan Sistem Ekonomi dan guncangan dari luar Sistem Ekonomi Terhadap ketahanan ekonomi nasional**

Disamping faktor internal antara Pemerintah dan pelaku usaha nasional, faktor eksternal yang mempengaruhi industri dan ekspor TPT nasional ialah, gejolak-gejolak atau peristiwa internasional yang berskala global baik secara ekonomis maupun politis. Penyerangan Amerika beserta sekutunya ke Irak sangat mempengaruhi industri TPT nasional, karena Amerika adalah pasar utama (26 %). Sementara hampir bersamaan terbakarnya Pasar T. Abang serta mati surinya sentra tekstil di Pekalongan membuat industri TPT nasional semakin terpuruk. Upaya-upaya untuk membuka pasar baru atau negara-negara alternatif, tidak semudah beroperasinya atau bertransaksi di pasar lokal. Terbatasnya kemampuan diplomasi, khususnya Atase perindustrian dan Perdagangan (KBRI), serta kuatnya ikatan-ikatan diplomasi antar negara sekutu ikut mempengaruhi perluasan pasar.

Faktor di luar sistem ekonomi di dalam negeri antara lain faktor politik. Permasalahan yang timbul di bidang politik pada era reformasi ini adalah krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Display integrasi bangsa, demokratisasi, hak azazi manusia dan penegakan hukum mencolok. Krisis politik dimaksud menunjukkan bahwa bangsa Indonesia belum siap untuk melaksanakan sistem politik yang demokratis, terbuka, transparan dan dewasa. Hal ini ditandai dengan

dibukanya kanalisasi demokratisasi, yang muncul kebablasan. Seluruh lapisan masyarakat telah meninggalkan moral dan etika politik dan hukum. Kepentingan pribadi, golongan dan kelompok mengemuka. Akibatnya pemerintah dihadapkan pada peristiwa-peristiwa lokal yang menuntut penanganan segera sehingga terbitlah kebijaksanaan-kebijaksanaan politik yang bertentangan dengan kehendak rakyat.

Mengacu pada konsepsi ketahanan nasional di bidang politik sebagai sistem pembinaan kehidupan nasional, maka ketahanan nasional tercermin dari kondisi kehidupan politik bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Realitasnya menunjukkan kondisi yang bertentangan. Kesenjangan yang terjadi dalam kondisi politik dewasa ini, gejala dis-integrasi semakin marak dan kesempatan untuk membangun bangsa menjadi tertunda. Peluang disharmoni dalam pembangunan selain memiskinkan masyarakat, pendidikan sebagai landasan pembangunan generasi berikutnya kehilangan momentum.

Faktor lain diluar sistem ekonomi antara sistem budaya dan politik dan memiliki relevansi yang sangat tinggi ialah ideologi ekonomi. Di dalam negeri, sejak proklamasi hingga reformasi bentuk perekonomian nasional masih dalam pergulatan yang diwarnai arah dan kutub yang akan dirujuk dalam rangka mengamankan pembangunan nasional. Ideologi ekonomi yang diwakili UUD 1945 pasal 33 (sebelum amandemen) pada kesimpulannya tidak merujuk pada satu kutub yang ada (Liberalisme-Kapitalis maupun Sosialis). Perjalanan politik

bangsa yang bernuansa poros tidak mampu melahirkan idologi ekonomi secara utuh, namun fakta yang ada menunjukkan, bahwa sistem ekonomi yang dilaksanakan tidak menunjukkan arah dimaksud atau inkonsistensi. Bubarkan IGGI dan tolak bantuan asing dan kini melepaskan dari IMF, melahirkan polemik baru. Namun satu hal yang perlu disepakati adalah, kehadiran bantuan asing tentunya diikuti dengan pamrih, dikaitkan dengan strategi global negara dimaksud, baik langsung atau tidak langsung.

#### **4. Korelasi kemiskinan dengan ketahanan perekonomian nasional.**

Adanya pengakuan kemiskinan melahirkan paradigma baru dalam pembangunan nasional, setelah issue kemiskinan selalu ditolak keberadaannya oleh Rezim Orde Baru. Program 8 jalur pemerataan pada tahun 1978 diterbitkan dan diikuti dengan berbagai sensus untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan dan persoalan serta meletakkan dasar bagi solusi penyelesaiannya. Perkembangan berikutnya melahirkan Trilogi Pembangunan. Adapun kriteria kemiskinan masih rancu (absolut, struktural dan kultural) dikaitkan dengan keberhasilan pembangunan perekonomian yang ditandai dengan pertumbuhan atau keberadaan sarana-sarana fisik. Namun disepakati, bahwa kemiskinan suatu standar atau tingkat kehidupan yang rendah, diikuti kekurangan materi dan ketidakmampuan berinteraksi secara sosial dengan kelompok atau golongan masyarakat lainnya.



Perkembangan angka kemiskinan pada awal 1990 sebanyak 27,2 juta jiwa baik diperkotaan maupun perdesaan sejak Tahun 1990 s.d. 2003, nampak seperti dalam table di bawah ini.

**Tabel No. 18**  
**Persebaran Jumlah Kemiskinan Tahun 1990 – 2003**  
**(dalam Jutaan)**

Tahun	Kota	Desa	Kotdes	%
1990	9,4	17,8	27,2	15,1
1993	8,7	17,2	15,3	13,7
1996	7,2	15,3	22,5	11,3
1999	15,6	32,5	47,9	23,4
2002	13,3	25,1	38,4	18,2
2003	12,2	25,1	37,3	17,4

Sumber : Harian Umum Tempo 15 Oktober 2003, Halaman 5

Sejalan dengan dengan besarnya angka kemiskinan, upaya pengentasannya diikuti dengan berbagai program, khususnya IDT. Keterbukaan dan pengakuan adanya kemiskinan di seluruh nusantara, melahirkan banyak dan ragamnya kegiatan untuk meningkatkan ketahanan perekonomian masyarakat. Khususnya pada era krisis moneter dan perekonomian umumnya, melahirkan program JPS maupun P2KP yang pada dasarnya tidak melahirkan perkuatan perekonomian nasional.

Program pengentasan kemiskinan bersifat crash program yang tidak diikuti sistem pengamannya, sehingga dana yang digulirkan tidak jelas dan bentuk pertanggungjawabnya sebatas pada ikatan moral. Berkaitan dengan krismon,

angka kemiskinan dipastikan bertambah dan besarnya para pakar dan analisis sangat berbeda, disebabkan perbedaan parameter. Masyarakat yang dikategorikan miskin, menyentuh golongan/kelompok masyarakat yang sebelumnya memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan yang tetap.

Korelasi angka kemiskinan dengan kebijaksanaan industri TPT sangat relevan dikaitkan dengan lokasi industri TPT umumnya di perdesaan (tingkat kecamatan) untuk menekan biaya operasional, upah buruh dan rendahnya tingkat pendidikan. Kelompok masyarakat miskin dipastikan akan menjadi angkatan kerja pada lokasi dimaksud. Adanya perbedaan upah (UMR), menunjukkan kemiskinan dimaksud masih tetap ada dan upaya penyelesaian dari satu proyek ke proyek lain, bukan menjadi solusi terbaik.

Dengan persebaran masyarakat miskin, maka upaya aksesibilitas terhadap sumber-sumber keuangan (dana), pendidikan, fasilitasi (informasi, pelatihan dan pemasaran) dapat ditumbuhkembangkan pada masyarakat sekitar lokasi industri. Karakteristik perdesaan, tentunya memerlukan fasilitasi agar lahan yang ada dapat dioptimalkan sebagai bagian dari pengadaan bahan baku industri TPT. Disamping itu, kontinuitas dan langkah strategis dari pemerintah daerah guna memperkuat pembangunan antar sektor, untuk membebaskan sebagian masyarakatnya dari kemiskinan, berpartisipasi dalam pembangunan. Bersamanya angka kemiskinan, gambaran dari ketahanan ekonomi nasional. Untuk itu, pertumbuhan yang relatif besar dan mampu menyerap serta melahirkan industri

dan diikuti dengan distribusi pendapatan yang merata, maka besaran atau keberadaan masyarakat dibawah garis kemiskinan dapat diatasi.

#### **5. Korelasi Keunggulan Kompetitif produk-produk Ekonomi Nasional dengan ketahanan perekonomian nasional**

Peran produk-produk unggulan yang dimiliki Indonesia cukup solid di pasar ekspor dan bahkan mampu melakukan penetrasi pasar ke kawasan baru. Didukung dengan kebijaksanaan politik khususnya untuk negara-negara yang memiliki ikatan moral, maka produk Indonesia dapat tumbuh dan berkembang. Negara-negara OPEC, OKI atau Kawasan Afrika dan Amerika Latin menjadi pasar baru bagi produk nasional. Sementara Pasar-pasar tradisional seperti Eropa, Amerika Utara, Jepang (G7 dan APEC) penuh dengan persaingan. Komoditi-komoditi pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan menjadi primadona.

Sementara untuk produk TPT, kuatnya rumor mengenai penyimpangan atau adanya ketidakadilan pembagian karena kuota diberikan kepada yang tidak berwenang, Menteri Perdagangan sebelumnya Satrio B. Yoedono (kini Kepala BPK) menetapkan institusi Universitas Indonesia (UI) untuk ikut menangani pembagian sistem kuota melalui komputerisasi, agar sesuai dengan kaidah pengembangan dunia usaha TPT (anti KKN). Hal ini disebabkan semakin bertambahnya Produsen TPT, maka kuota menjadi barang ekonomis dan dipastikan pemiliknya meraih keuntungan yang relatif besar untuk kawasan

Amerika Utara dan Eropa. Banyaknya kuota serta nilai ekonomisnya yang tinggi, melahirkan inefisiensi, bahkan biaya tinggi bagi produsen. Kelanjutannya, daya saing menurun (lampiran 7, 8, dan 9)

Untuk pasar ekspor dikaitkan dengan daya beli dan strategisnya kuota TPT sebagai pilar ekspor non migas, regulasinya mempengaruhi penyelenggara pemerintahan, dunia usaha dan konsumen yang dikaitkan dengan Ganti Menteri Ganti Kebijakan yang diikuti rumors-rumors, regulatornya tidak konsisten dalam mengimplementasikannya. Menguatnya transparansi, pelaku usaha berusaha mendapatkan atau menuntut akuntabilitas publik dari penyelenggara negara berkaitan dengan manajemen kuota, apakah soal alokasi kuota dan masalah regulasi, masalah utilisasi/riil kuota. Terbitnya SK Menperindag No. 02/MPP/Kep/2001 diprotes pengusaha TPT, khususnya eksportir TPT karena tidak kondusif atau menimbulkan suasana ketidakpastian kepemilikan kuota. Sebagai contoh, adalah regulasi SK Menperindag No. 02/MPP/kep/1/2001, antara lain :

1. Mengabaikan kepastian hukum dan kepastian berusaha,
2. Menyisakan masalah akhir tahun 2001 overshipment yang mengakibatkan embargo oleh AS,
3. Melemahkan kepercayaan pembeli (buyer) TPT, sebagai penggantinya diterbitkan

SK Menperindag No. 311/MPP/Kep/2001 tanggal 30 Oktober 2001

adalah :

1. Akomodatif karena telah menyerap aspirasi pelaku TPT (BPP API),
2. Ada kepastian hukum dan kepastian berusaha,
3. Kepastian untuk buyer,
4. Dipastikan pelayanan lebih dipercepat bahkan melalui faksimilpun akan dilayani

Untuk mempertahankan peran strategis komoditi ekspor TPT, Pemerintah meningkatkannya melalui program revitalisasi, yaitu revitalisasi sektor riil dengan melakukan restrukturisasi mesin-mesin yang sudah tua, mendorong timbulnya industri bahan baku dan industri pendukung seperti revitalisasi sektor keuangan, melalui pendirian Indonesia Recovery Funds (IRF). Disamping itu, mengundang representatif/pembeli luar negeri untuk memberi informasi kendala yang dihadapi (impor) TPT dari Indonesia. Upaya lainnya, memberi jaminan kepada eksportir/importir akan pulihnya perekonomian Indonesia, jaminan keamanan, transparansi, kepastian hukum (perbutuhan, sistem pengupahan) sehingga perusahaan dapat berproduksi memenuhi permintaan, diikuti kerjasama dengan lembaga nasional/internasional sebagai mediasi political will Indonesia kepada mitra dagang.

## 6. Korelasi pertumbuhan dengan ketahanan perkonomian nasional

Meningkatkan daya saing produk ekspor TPT di era pasca 2005 dapat dilakukan jika Pemerintah mampu mengurangi/menghilangkan berbagai varian/cost of production yang berskala nasional dengan memperhatikan efisiensi, seperti listrik, air, BBM serta institusi pemerintah berjalan sesuai dengan akuntabilitasnya (public services). Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah jiwa entrepreneurship dari pengusaha nasional selaku aktor politik non-state. Kemampuan lobby serta aksesibilitas yang competitiveness, dapat membuat industri TPT nasional tetap tumbuh dan berkembang, sehingga produk lokal memiliki daya saing tinggi dan pada gilirannya dapat memenuhi selera konsumen di dalam negeri diikuti harga yang relatif murah sebagai faktor dominan dalam penentuan pembelian produk-produk TPT.

Gejala berkembangnya Pasar TPT bekas, menunjukkan kemampuan daya beli, kualitas, harga, motif dan desain tetap lebih menarik dibandingkan dengan image social "*pengguna barang bekas*". Pemicu maraknya produk-produk TPT bekas, harganya terjangkau masyarakat, kualitasnya memadai dibandingkan dengan produk lokal dan konsumennya kelas menengah ke atas. Berkaitan dengan hal-hal dimaksud, peran instansi terkait, POLRI, Ditjen Bea Cukai Departemen Keuangan, serta Depperindag dan Dep. Perhubungan untuk memantau dan mengefektifkan petugas-petugas terkait agar bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## *Investasi*

Adapun faktor lain yang terkait dengan stabilitas ekonomi antara lain perkembangan investasi. Sampai dengan Tahun 2000, investasi di bidang industri TPT menunjukkan peningkatan yang cukup berarti yaitu, rata-rata Rp 3.586,94 milyar per tahun (tabel 5 hal. 67). Hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkembangan investasi TPT mengalami penurunan walaupun ada produsen baru terutama pada industri kain dan pakaian jadi. Peluang investasi masih terbuka untuk menanamkan modal pada industri yang menghasilkan bahan baku tekstil, namun minat untuk menanamkan modal pada industri tersebut kurang karena membutuhkan modal sangat besar dan teknologi tinggi.

Kendati Tahun 2002 diterbitkan izin baru bagi 14 perusahaan baru, namun jumlah perusahaan Industri TPT pada Tahun 2002 turun 0,7 % dibanding Tahun 2001 (Tabel 4). Hal ini disebabkan pada Tahun 2002 terdapat 33 perusahaan yang tutup. Sebagian lokasi industri TPT pada umumnya berada di Pulau Jawa (Jawa Barat dan Jawa Tengah). Pada tahun 2001 dari 2.665 perusahaan TPT diantaranya 2.526 perusahaan (94,7) berlokasi di Pulau Jawa, dan pada Tahun 2002 dari 2.646 perusahaan, sebanyak 2.508 (94,78 %) berlokasi di Pulau Jawa.

Nilai produksi pada Tahun 1998 sebesar 68.613, 91 Milyar meningkat menjadi Rp 89.417,00 Milyar pada tahun 2001 atau mengalami peningkatan rata-

rata sebesar 2,16 % (Tabel 10). Peningkatan nilai produksi TPT disebabkan meningkatnya kebutuhan dalam negeri dan juga untuk memenuhi permintaan ekspor. Pada Tahun 2002 nilai produksi mengalami penurunan sebesar 7,83 %. Hal ini disebabkan lesunya pasar dalam negeri dan menurunnya kinerja ekspor. Dari tabel di atas tersebut di atas dapat dilihat penurunan nilai produksi Tahun 2002 masing-masing cabang industri dibandingkan tahun 2001, yaitu :

- a. Industri serat mengalami penurunan sebesar 2,02 %
- b. industri benang mengalami penurunan sebesar 4,26 %
- c. Industri kain mengalami penurunan sebesar 4,26 %
- d. Industri pakaian jadi mengalami penurunan sebesar 7,07 %
- e. Industri tekstil lainnya mengalami penurunan sebesar 7,84 %

#### *Realisasi ekspor*

Ekspor TPT Indonesia periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2001 setiap tahunnya fluktuatif. Peningkatan ekspor terbesar terjadi pada Tahun 2000 dan pada tahun-tahun selanjutnya mengalami penurunan. Hal ini berkaitan dengan menurunnya perdagangan TPT dunia akibat kontraksi ekonomi dunia terutama USA dan Jepang. Pada tahun 2001 terjadi penurunan ekspor 6,45 % dibanding tahun 2000 dan pada tahun 2002 turun 10,14 % dibanding periode yang sama tahun 2001 (Tabel 6). Produk TPT Indonesia sudah cukup dikenal di pasar internasional yang diawali produk-produk tradisional dan pada Tahun 2000



berada pada urutan ke 12 dunia. Pangsa pasar TPT Indonesia menunjukkan perkembangan tidak hanya pada pasar kuota tapi juga ke pasar non kuota. Berdasarkan data dari Direktorat Produk Ekspor Deperindag Tahun 1998 nilai kuota tekstil ke pasar non kuota baru mencapai US\$ 4,192 Milyar (57 %), maka pada Tahun 2000 telah meningkat menjadi US\$ 4,581 Milyar (55 %) dan Tahun 2001 dan 2002 turun menjadi US\$ 4,184 Milyar (54 %) dan US\$ 3,763 Milyar (54 %). Hal ini membuktikan usaha-usaha diversifikasi negara tujuan ekspor telah memberikan hasil nyata khususnya ekspor ke negara-negara Timur Tengah, Afrika dsbnya.

Apabila dilihat dari komposisi ekspor TPT Indonesia, maka produk pakaian jadi merupakan andalan ekspor TPT nasional. Pada Tahun 2002 ekspor pakaian jadi memberikan kontribusi sebesar 56,60 % terhadap total ekspor TPT. Sebagai andalan ekspor Indonesia dari sektor non migas dan hasil industri, industri tekstil menghadapi persaingan yang cukup tajam. Ditingkat bawah yaitu produk yang nilainya tambahnya rendah, dan mengandalkan upah buruh murah. Negara-negara lainnya dipelopori oleh China dengan upah yang lebih murah menyaingi Indonesia dengan ketat. Sementara di segment atas yaitu produk-produk dengan nilai tambah tinggi dan menuntut keterampilan yang tinggi, selama ini dikuasai negara maju. Dalam memasuki pasar atas tersebut, industri tekstil Indonesia menghadapi persaingan dari negara ASEAN lainnya terutama Thailand yang memiliki iklim usaha yang lebih kondusif dibandingkan Indonesia.

### *Perkembangan Impor*

Pada Tahun 1998 nilai impor tercatat US\$ 2.020,51 Juta dan tahun 2001 meningkat menjadi US\$ 2.440,11 Juta atau mengalami peningkatkan rata-rata 8,29 %. Sementara Tahun 2002 mengalami penurunan menjadi US\$ 1.735,03 atau turun 29 % dibanding Tahun 2001. Masih tingginya nilai impor tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain :

- a. Sebagian besar kebutuhan belum diproduksi di dalam negeri sehingga pemenuhannya harus diimpor, seperti serat kapas dan serat akrylik;
- b. Dalam rangka pengadaan bahan baku untuk keperluan ekspor, maka dewasa ini masih diberikan fasilitas seperti pembebasan bea masuk dan PPN yang menyebabkan harga bahan baku impor lebih rendah dibandingkan apabila diperoleh di dalam negeri,
- c. Beberapa perusahaan juga masih tetap terikat menggunakan bahan baku dari atau ditentukan oleh perusahaan buyer atau perusahaan induknya

#### **7. Koorelasi kemantapan ekonomi dan dengan ketahanan perekonomian nasional**

Memperhatikan besarnya ketergantungan industri TPT nasional terhadap produk impor, upaya-upaya untuk meminimalisrnya telah dilakukan beberapa dasawarsa yang lalu, namun tidak terkonsepsi serta tidak berkesinambungan

sehingga hasilnya tidak optimal seperti adanya Kementerian Perindustrian Rakyat serta Menteri Negara Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Untuk menggambarkan besarnya ketergantungan berdasarkan Indonesia Garment Tahun 2002, dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Mesin & Accessories	100 % impor
Spare part dan peralatan lainnya	85 %
2. Bahan baku Cotton (Kapas)	96 %
Polyester	95 %
Polycrylic	100 %
Polyamid/Nylon	100 %
Viscouse Rayon	95 %
Worsted/Wool	100 % (dari Australia)
Ramie /Haramay	100 % (dari Cina)

Khususnya untuk impor bahan baku kapas, volume impor periode Tahun 1994, 1995 serta Tahun 1997-2000, besarnya adalah 57.000 ton, 511.000 ton serta 530.000 ton (disamping syntetic wool dan serat ramie). Berdasarkan bahan baku impor, dan peluang penyediaan bahan bakunya untuk diproduksi di dalam negeri, industri benang dan tekstil perlu diperhatikan kembali, setelah dilaksanakan pada Tahun 1952 dan 1985. Pengenalan masyarakat Industri tekstil di Indonesia terhadap serat rami bukanlah hal yang baru. Sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, Belanda dan Jepang, ramie sudah dikenal masyarakat dengan nama Haramay (P.

Jawa) dan Kloi (P. Sumatera) dan ditanam secara serentak di P. Jawa dan Sumatera dan Irian Jaya.

Kegagalan industri serat ramie antara lain, adanya hambatan dan kerugian ekonomis Importir serta kurangnya pemahaman atas penggunaan bahan baku ramie atau kapas karena mempunyai market berbeda. Faktor lain tidak adanya political will dan kesinambungan program, dan kurangnya kesadaran akan urgensinya bahan baku serta peran strategisnya sebagai penyangga/kelangsungan industri TPT.

Untuk mendukung industri TPT nasional, pengadaan kebutuhan bahan baku serat ramie dapat dilakukan dalam skala besar, dikaitkan dengan karakteristiknya yang sesuai (iklim dan kandungan tanah). Faktor lain yang mendukung perlunya pemassalan industri serat ramie adalah, nilai ekonomisnya dan dalam proses produksi tidak menuntut teknologi tinggi. Dengan kemampuan panen 6 kali dalam setahun dan tingkat kesuburan atau produk 8-10 tahun, dan kemampuan produk lebih kurang 6 ton per tahun, maka usaha ini perlu didukung secara nasional karena kualitasnya tidak kalah dengan importir utama (China dan Brazil), sesuai hasil laboratorium ramie di Jepang. Adapun besarnya kebutuhan serat ramie dunia menurut Indonesia Garment tahun 2002 sebesar 400.000-500.000 ton yang dipasok oleh RRC, Brazil dan Philipina sebesar 130.000-150.000 ton, sehingga peluang pasar 300.000 ton. Kebutuhan ini memerlukan

perluasan lahan sebesar 150.000-200.000 Ha, dan Indonesia berpeluang untuk melakukan ekstensifikasi (masih memiliki lahan).

Pentingnya serat rami sebagai bahan baku, selain kehalusan, kekuatan dan daya tariknya, serat ramie memiliki keunggulan setelah sutera, seperti mudah diberi warna, nyaman dipakai, anti bakteri, tahan api, tahan air daya serap air tinggi dan kekuatan tariknya 7 x kekuatan tarik cotton (kapas). Dalam konteks penguasaan teknologi, Indonesia dengan jumlah penduduk (No. 5 didunia), kemampuan penyediaan bahan baku akan mempengaruhi atau meningkatkan citra produknya. Kelemahannya adalah pada visi dan misi sehingga pemanfaatan teknologi sebagai bagian budaya belum tumbuh. Kestinambungan usaha atau generasi pelaku usaha umumnya putus pada satu (1) generasi, sementara untuk industri TPT diperlukan regenerasi dan profesionalisme (bukan primordialisme).

Kuatnya pemahaman dan penguasaan multi dan lintas disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, negara-negara berkembang di kawasan ASEAN, Vietnam, Philipina disamping RRC mulai menguasai pasar AS dan menggeser posisi industri TPT nasional. Besarnya ekspor TPT dan perannya terhadap non migas, dipengaruhi sistem kuota (Lamp : 1), sehingga para industriawan langsung mendapat market yang jelas, disamping harga yang relatif baik bila dibandingkan dengan pasar-pasar kawasan lainnya menjadikan produsen TPT hanya sesaat melalui koneksitas.

Faktor lain, yang memperlemah industri TPT adalah, biaya yang terkait dengan penguasaan dan pengembangan teknologi dan kurang sinkronya kerjasama antara dunia usaha dan pemerintah. Kecenderungan para pelaku dunia usaha, untuk menunggu peran pemerintah dalam hal mengurangi, pajak, fasilitas dan perluasan pasar menyebabkan dunia usaha lokal menjadi terhambat pertumbuhannya.

#### **8. Korelasi integrasi kebijaksanaan dengan ketahanan perekonomian nasional**

Upaya memantapkan kebijaksanaan industri sebagai pilar utama non migas, maka berbagai hal yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan industri TPT perlu dilakukan evaluasi atau revitalisasi guna meningkatkan peran lembaga-lembaga terkait baik lembaga/instansi pemerintah, swasta dan masyarakat. Integrasi secara komprehensif dan integralistik terutama industri TPT, maka penataan institusi merupakan langkah awal untuk memperjelas peran dan peranan masing-masing instansi. Lembaga atau Instansi pemerintah, sejalan dengan era reformasi dan perdagangan dunia tidak dapat lagi berperan sebagai regulasi melainkan fasilitasi.

Untuk itu, langkah awal ialah melakukan restrukturisasi internal diseluruh jajaran terkait dan khususnya produsen melakukannya dengan bertahap untuk mendapatkan daya saing yang tinggi, serta SDM yang berkualitas. Pilihan

ini akan berakibat terhadap pengurangan angkatan kerja, namun menjadi pilihan. Perluasan usaha di dalam negeri dengan peran sebagai pemasok bahan baku menjadi alternatif, dan hal ini dapat tercapai jika didukung dengan kemajuan Iptek, sehingga kebutuhan bahan baku dan komponen industri lainnya dapat disediakan di dalam negeri. Merujuk pada besaran angka impor dan terutama impor bahan baku utama, menunjukkan perlunya pilihan teknologi serta strateginya pengadaannya dengan memperhitungkan potensi pasar dalam negeri. Pengembangan IPTEK dan R & D untuk mendukung perkiraan kebutuhan, strateginya diarahkan untuk meminimalisir bahan baku dan komponen utama seperti dalam tabel dibawah ini :

**Tabel No. 19**  
**KONTRIBUSI EKSPORT TPT**  
**TERHADAP EKSPOR NON MIGAS SERTA**  
**BESARNYA IMPOR BARANG UTAMA DAN OLAHAN**

TH	NON MIGAS (Juta US \$)	TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (000 US \$)	%	TOTAL IMPOR BARANG UTAMA & OLAHAN (000\$)
1997	41,821,1	5,158,273,3	12,33	16,154,6
1998	40,975,5	4,988,459,9	12,17	11,243,1
1999	38,873,2	6,875,810,1	17,68	10,507,3
2000	47,757,4	8,239,090,7	17,25	14,441,7
2001	43,684,6	7,732,533,0	17,70	13,199,1

Sumber : Statistik Indonesia 2001 (BPS), angka diolah

Dalam tabel di bawah ini nampak real market yang dapat diberdayakan pada tingkat yang optimal, sesuai dengan aturan pendidikan maupun norma-norma yang berlaku pada PNS, sesuai dengan bidang tugasnya.

**Tabel No. 20**  
**Perkiraan Potensi Pengguna PDN dalam bingkai Kebijakan**

NO	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Siswa SD	25.701.558	
2	Siswa SLTP	7.584.707	
3	Siswa SLTA	2.938.514	
4	Siswa SMK	1.933.937	
5	Mahasiswa	2.618.704	
6	PNS Departemen	1.710.795	
7	PNS Diperbantukan	1.649.971	
8	PNS Dipekerjakan	106.373	
9	PNS Daerah	475.639	
10	Lain-lain	522.317	TNI dan POLRI dan Dosen IAIN

Sumber : Statistik Indonesia 2001 (BPS, angka diolah)

Berdasarkan angka atau jumlah dalam tabel di atas, nampak potensi pasar yang dapat dikelola dengan pendekatan kebijakan pemerintah diikuti, dengan meningkatkan kualitas secara bertahap. Disamping potensi dimaksud, dikaitkan dengan adanya penggunaan produk TPT untuk kegiatan lain (Pesta, Upacara /PDL/PDH, Seragam Sekolah), dapat diprediksi kebutuhan nasional (TPT) secara akurat. Sementara, untuk anak didik pada usia dini, disamping pemahaman nilai-nilai PPDN, tersirat konsepsi nasionalisme yang semakin dibutuhkan dalam melanjutkan pembangunan di era global. Dengan demikian, untuk mengintegrasikannya diperlukan pendekatan yang dilandasi :



### *a) Manajemen*

Sejalan dengan dengan tabel-tabel yang dikemukakan di atas, peran kuota sebagai basis kegiatan industri TPT harus diperkuat hingga Tahun 2005 dan sekaligus sebagai wacana peningkatan daya saing. Persebaran lokasinya perlu diperhatikan agar terjadi transfer of knowledge ke berbagai daerah baik dalam sistem produk, pemasaran maupun pengembangannya guna meningkatkan kesinambungan program dan kegiatan.

Rumor atau issue-issue negatif yang berkaitan dengan manajemen kuota dari tahun ke tahun, disebabkan oleh kompleksitas manajemen disebabkan adanya kepastian keuntungan (Produsen) yang akan diterima atas setiap transaksi yang dilakukan. Kuota adalah pasar bagi eksportir untuk mengekspor TPT ke negara-negara tertentu seperti AS, Uni Eropa, Kanada, Turki, Norwegia berdasarkan perjanjian bilateral (Multi Fiber Arrangement/MFA). Di Indonesia, pemberian sistem kuota TPT dikaitkan dengan tugas dan fungsi Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Perdagangan), kemudian dibagikan kepada eksportir TPT yang terdaftar (ETTPT).

Menyongsong pasar bebas (globalisasi) komoditi, termasuk didalamnya TPT Tahun 2005, pemerintah telah melakukan langkah-langkah yang penting dan sesuai dengan komitmen dalam persetujuan-persetujuan organisasi perdagangan

dunia (WTO). Tindakan-tindakan tersebut diikuti penghapusan tarif dan non-tarif (Putaran Uruguay) melalui kebijaksanaan deregulasi. Memperbaiki ketentuan nasional yang sudah ada dan menyusun ketentuan nasional agar sejalan dengan persetujuan WTO misalnya Hak atas Kekayaan Intelektuan-HAKI (Trade related Aspects of Intellectual Property rights).

Melaksanakan berbagai kewajiban notifikasi guna mendukung aspek transparansi yang merupakan salah satu elemen dalam system perdagangan multilateral dalam kerangka WTO. Menyusun ketentuan dan menyiapkan perangkat pelaksana sesuai persetujuan dalam WTO dalam rangka melakukan tindakan terhadap produk impor yang dituduh melakukan dumping, serta dalam upaya menangkal produk impor yang melanggar HAKI.

#### **b) Aspek Demografi dan Geografi**

Persaingan yang tajam di industri TPT pada era globalisasi menyebabkan sektor industri TPT nasional harus mengefisiensikan dan mengefektifkan seluruh penunjang industri tidak terkecuali sumber daya manusianya. Salah satu upaya peningkatan daya saing adalah, menjadikan SDM Indonesia yang unggul. Banyak perusahaan yang tinggal nama akibat tidak mempersiapkan SDM yang tangguh dan handal menghadapi persaingan yang semakin keras. Menurut Data Depnakertrans, perkembangan SDM Indonesia yang masuk ke dunia angkatan kerja masih memperhatikan karena masih didominasi oleh lulusan SD ke bawah

sebanyak 56,8 juta orang, SLTP 14,4 juta orang, SLTA 21,05 juta orang, Akademi 4 juta orang dan Perguruan Tinggi 3 juta orang, bekerja pada sektor pertanian dan industri manufaktur terutama pada industri kecil dengan tingkat keterampilan dan produktivitas rendah.

Sejalan dengan era globalisasi dan antara sesama anggota ASEAN (AFTA) pada tahun 2003, pembangunan SDM Indonesia perlu ditumbuhkembangkan melalui pemanfaatan teknologi. Hal ini perlu disadari bersama, bahwa keunggulan komparatif (sumber daya alam) tidak lagi menjadi faktor utama tetapi sudah bergeser ke faktor SDM yang memiliki daya saing tinggi (Singapura, Jepang). Produktivitas Indonesia dikaitkan dengan kapasitas produksi masih tertinggal atau kalah dengan RRC bahkan Kamboja dan Thailand. Khusus untuk sektor garment, untuk jam yang sama Indonesia rata-rata 7 potong sementara di China sampai 20 potong (Indonesia Garment Tahun 2002). Dengan kalah bersaing di produktivitas, maka pasar ekspor semakin lemah dan tidak tertutup untuk seluruh Indonesia.

Sejalan dengan upaya penyediaan bahan baku dalam negeri, produksi kapas dalam negeri dihasilkan melalui program intensifikasi kapas rakyat (IKR) yang telah dimulai sejak tahun 1978/1979 dengan luasan akhir 14.000 ha dan tahun 1984/1985 46.360 ha dengan produksi 24.850 ton kapas berbiji atau 8.615 ton serat kapas. Menurunnya areal, diikuti dengan menurunnya produktivitas petani, disamping nilai jual dan waktu pengembalian modal relatif lama jika

melalui model konvensional. Upaya perkuatan ketahanan ekonomi nasional melalui pematapan industri TPT di dalam negeri yang ditandai dengan meningkatnya konsumsi produk dalam negeri oleh masyarakat, peluangnya antara lain diperoleh dengan kesesuaian harga dengan kualitas. Untuk menekan atau mengurangi biaya produksi, diantaranya mengurangi atau menekan komponen impor. Kapas sebagai bahan baku utama dan hampir seluruhnya impor, kini dengan penggunaan dan penguasaan teknologi diupayakan untuk dapat diproduksi di Indonesia. Adanya perkembangan dan perbedaan dalam hal pemahaman serta resiko yang ditimbulkan akibat dari penggunaan model transgenik, membuang kesempatan dalam arti kehilangan waktu.

Berdasarkan pemikiran pakar internasional dan dijadikan acuan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, khususnya Komisi Bidang Ilmu Kodokteran (Mahar Mardjono) yang berkaitan dengan pelaksanaan transgenik dapat disimpulkan, bahwa bioteknologi modern berpotensi tinggi untuk mendorong usaha negara untuk mencapai keamanan pangan dan kompetitif global. Produk bioteknologi modern memberi harapan bagi petani mengurangi biaya produksi, meningkatkan hasil panen dengan tetap menjaga ekosistem secara utuh, dan memberdayakan tanaman tumbuh baik walaupun iklim tidak mendukung. Selain itu, produk bioteknologi juga memberi manfaat bagi konsumen.

Disamping itu penggunaan rekayasa genetika tanaman akan meningkatkan kualitas lingkungan dan dapat mengurangi penggunaan pestisida kimia. Hal ini dapat meminimalkan bahaya pemakaian bahan kimia terhadap petani. Dengan demikian, dapat meningkatkan keuntungan bagi petani. Tanaman hasil rekayasa genetika merupakan alat untuk berswasembada pangan. Penggunaan tanaman bioteknologi akan membuat lahan pertanian lebih produktif, mengurangi kebutuhan areal hutan yang dikonversi menjadi lahan pertanian dan memberikan manfaat bagi lingkungan.

1. Indonesia harus secara terencana dan terarah mengembangkan kemampuan teknologi rekayasa genetika, karena teknologi tersebut mampu menghasilkan berbagai inovasi untuk mendukung pembangunan kesehatan, melestarikan swasembada pangan dan meningkatkan kemampuan bersaing Indonesia di era globalisasi,
2. Penguasaan teknologi rekayasa genetika memungkinkan membandingkan secara adil kebaikan dan kekuarangan produk transgenik berdasarkan kaidah ilmiah, serta memungkinkan untuk memilih produk transgenik yang paling menguntungkan bangsa indonesia,
3. Rekayasa genetika dan produk transgeniknya, sebagai lazim dilaksanakan pada setiap pemanfaatan teknologi baru dan produknya, harus dipantau dan dievaluasi secara berkala dan berkelanjutan untuk mengkonfirmasi keunggulannya dan menemukan sedini mungkin kekurangan-kekurangan yang mungkin dapat timbul.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab terdahulu, serta memperhatikan analisa dan serta jawaban responden atas kuesioner yang disampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor dominan yang mempengaruhi konsumen dalam menetapkan preferensinya secara berurutan adalah desain, harga, motif, merek dan kualitas. Dari 30 orang expert yang dijadikan responden, alternatif terhadap produk TPT, adalah produk TPT dalam negeri. (0.8720 %).
2. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong pemberdayaan produk TPT dalam negeri belum optimal. Hal ini ditandai dengan :
  - a. Bahan baku sebagian besar masih import, sementara peluang untuk meminimalisirnya belum dilakukan secara optimal seperti, pengadaan bahan baku, peningkatan kualitas SDM, relokasi industri, sistem perburuhan dan pengupahan.

- b. Disamping pengadaan bahan baku serta dukungan strukturnya yang belum memadai, disisi lain upaya menarik investor asing belum optimal dikaitkan dengan semakin kondusifnya dunia usaha, terutama kepastian hukum dan upaya meminimalisir KKN namun dana yang masuk melalui investasi asing belum sebesar pada periode sebelumnya.
3. Besarnya devisa yang hilang atau keluar akibat dari penggunaan produk TPT impor ada peningkatan sejak Tahun 2001 – 2003, merujuk pada data BPS.
- a. Tahun 2001, sebesar US\$ 20.745.587 , jika nilai kurs rata-rata Tahun 2001 Rp 11.000,-/US\$, maka nilai impornya Rp 228.201.457.000,-
- b. Tahun 2002, sebesar US\$ 29.204.184, jika nilai kurs rata-rata Tahun 2002 Rp 10.000,-/US\$, maka nilai impornya Rp 2.92.041.840.000,-
- c. Tahun 2003, sebesar US\$ 11.731.949, jika nilai kurs rata-rata Tahun 2002 Rp 9.000,-/US\$, maka nilai impornya Rp 105.617.541.000,-.
- d. Besarnya devisa yang hilang atau keluar untuk penggunaan produk TPT impor (bekas) sebesar Rp 3 Trilyun yang digunakan oleh APPB, tidak dapat dijadikan ukuran atau acuan dan memerlukan kajian lebih lanjut. Hal ini berkaitan dengan dimensi politik dan ekonomi dalam rangka mempertahankan eksistensi mereka. Untuk tahun ini berdasarkan data BPS akan lebih besar, mengingat laporan yang digunakan sampai dengan Bulan Juli. Jika digunakan asumsi menyambut Hari-hari Besar Keagamaan dan menyambut Tahun Baru 2004, kebutuhan produk legal

akan meningkat pula sejalan dengan intensifnya pengawasan terhadap produk TPT bekas (impor).

4. Relevansi TPT dan ketahanan ekonomi nasional adalah :

- a. Kehadiran Industri TPT di dalam negeri memperkuat ketahanan ekonomi nasional, melalui penyerapan angkatan kerja, menahan arus devisa ke luar negeri, adanya distribusi atau persebaran pendapatan sampai ke daerah dan memasyarakatkan teknologi sebagai landasan bagi kegiatan industrialisasi.
- b. Bagi produsen, dengan masuknya TPT impor ke dalam negeri dengan keunggulan desain, motif dan harga akan semakin meminggirkan produk local. Bila kondisi ini tidak dapat berubah, maka industri TPT di dalam negeri akan hancur atau tutup. Konsekuensinya antara lain, PHK.
- c. Bagi konsumen, dengan masuknya produk TPT impor, memberikan alternatif untuk pemenuhan kebutuhan atau kepuasannya., bila kondisi ini berkepanjangan akan mematikan industri TPT dalam negeri.

#### **SARAN-SARAN**

Memperhatikan besarnya investasi, tenaga kerja yang terserap, potensi pasar dalam dan luar negeri serta masuknya produk-produk TPT impor, baik bekas, selundupan maupun yang ilegal serta dalam rangka meningkatkan



ketahanan ekonomi nasional khususnya Pasca Tahun 2005 (bebas kuota), dapat disarankan sebagai berikut :

1. Pemerintah harus mengkaji ulang peran industri TPT dalam negeri sebagai penyangga ekspor non migas maupun pemenuhan kebutuhan dalam negeri berkaitan dengan :
  - a. Kapasitas terpasang yang mendekati optimal (100 %), sehingga terjadinya penurunan produksi dapat mengakibatkan PHK
  - b. Dengan dijadikannya desain, harga dan motif sebagai bagian acuan dari preferensi konsumen, maka diperlukan kreativitas dan inovasi guna meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. Hal yang strategis diperlukan adalah adanya institusi atau lembaga-lembaga pendidikan di bidang TPT. Secara formal pendidikan setingkat S1 hanya ada di Bandung.
2. Untuk meminimalisir masuknya produk-produk impor, khususnya ilegal, maka koordinasi antar instansi terkait semakin diperlukan disertai adanya forum atau wadah yang memudahkan para Pejabat terkait untuk memutuskan setiap permasalahan.
3. Masuknya peralatan dan mesin guna mendukung kelancaran memproduksi TPT dalam negeri, perlu disiapkan rekayasa dan rancangbangun teknologi

untuk memutuskan apakah teknologi impor atau rekayasa dalam negeri dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri.

4. Gerakan penggunaan produk dalam negeri dapat ditingkatkan jika dilakukan dengan pendekatan yang multi dan lintas disiplin. Untuk itu, diperlukan pemahaman terhadap sosiokultural masyarakat, sehingga pemerintah dapat menetapkan langkah yang strategis sesuai psikososial kemasyarakatan. Gagalnya berbagai kebijakan pemerintah, disebabkan meninggalkan pendekatan keilmuan
5. Dalam menetapkan produk dalam negeri, pemerintah perlu bersama-sama dengan komponen masyarakat, terutama barang-barang yang memerlukan bahan baku impor.
6. Definisi produk dalam negeri perlu dibakukan dengan menghitung potensi bangsa sesungguhnya, untuk tidak menimbulkan kerancuan, seperti Program mobil nasional yang dibuat di Korea.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anwar Ibrahim, *Renaissans Asia Gelombang Reformasi di Ambang Alaf Baru*, PT. Mizan Bandung, 1998
- Anoraga Panji dan Janti Soegiatuti, *Pengantar Bisnis Modern Kajian Dasar Manajemen Perusahaan*, PT. Dunia Pustaka Jaya, 1996
- Alvin Y. So dan Sumarsono, *Perubahan Sosial dan Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1991
- Cahyono Bambang Tri, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, IPWI, Jakarta, 1996
- David Osborne dan Ted Gaebler, *Mewirauahakan Birokrasi (Reinventing Government)* Pustaka Binamar Pressindo, Jakarta, 1995
- Ermaya Suradinata dan Alex Dinuth, *Geo Politik dan Konsepsi Ketahanan Nasional*, PT. Paradigma Cipta Yatsigama, Jakarta, 1995
- Frederikson, Georger H, *Administrasi Negara Baru*, LP3ES, Jakarta 1994
- Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, CIDES, Jakarta, 1996
- Ichlasul Amal dan Armaidly Armawi, *Sumbangan Ilmu-Ilmu Sosial terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1995
- Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001
- James F. Engel (dkk), *Perilaku Konsumen*, Binarupa Akasara, Jakarta 1995
- Jhon W. Berry (dkk), *Psikologi Lintas Budaya*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1995
- Lembaga Pertahanan Nasional, *Tolok Ukur Ketahanan Nasional*, Lemhannas, Jakarta, 1999
- Hasibuan S..P. Malayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Gunung Agung, 1997
- Kartadjoemena, H.S. *Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa*, UI-Press, Jakarta, 2000
- , *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*, UI-Press, Jakarta, 1998

- Kerlinger Fred. N, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1996
- M. Irfan M. Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Nicholas Henry, *Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Publik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Rachbini J. Didik, *Ekonomi Politik Paradigma dan Teori Pilihan Publik*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2002
- Ralph H. Gabriel, *Nilai-Nilai Amerika, Pelestarian dan Perubahan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991
- Robbins Stephen P, *Organizational Behavior Concept Controversies and Applications*, Prentice Hall International Ins, New Jersey, 1985
- Ryaas Rasyid, M. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Yarsif Watampone, Jakarta, 1997
- Sarlito, W Sarwono, *Psikologi Sosial, Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991
- Solichin Abdulwahab, *Analisis Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Gunung Agung Jakarta, 1983
- Sumadi Surjabrata, *Psikologi Kepribadian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, BPFE< Yogyakarta, 19196
- Sutrino Hadi, *Metode Research*, Gunung Agung, Jakarta 1983
- Taliziduhu nDraha, *Research Teori, Metodologi Administrasi*, Bina Aksara, Jakarta, 1981
- Thomas L. Saaty, *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin*, PPM, Jakarta, 1995
- Winardi, *Azas-azas Manajemen*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1990
- Wee Chow Hou, *Prinsip-prinsip Tao Zhu-gong Pelajaran Bisnis Modern Dalam Falsafah Klasik*, Prenhallindo, Jakarta, 2002
- Wee Chow-Hou, *Sun Tsu Perang dan Manajemen*, Gramedia, Jakarta, 2001
- Yusmar Yusuf, *Psikologi Antar Budaya*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991

## DOKUMEN-DOKUMEN

- Sekretariat Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi GATT dan WTO
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Kamar Dagang dan Industri Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, tentang Kamar Dagang dan Industri Nasional
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 234 Tahun 2000 tentang Penyempurnaan Organisasi dan tata kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 109 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Eselon I dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Surat keputusan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri negara Perencanaan Pembangunan/ Ketua Badan Perencanaan pembangunan Nasional Nomor Keputusan 27/MK-3/8/1994 dan Nomor 166/Ket/8/1994 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994
- Lembaga Administrasi Negara, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pelayanan Aparatur Pemerintahan
- Lembaga Administrasi Negara, peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan bagi pegawai Negeri Sipil
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Surat Keputusan Meenteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 732/MPP/Kep/10/2002 tentang Pelarangan Pemasukan Kain Gombal Bekas dan Baru

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan *Nasional Penyusunan Konsep Kurikulum Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tingkat Pendidikan Dasar*, Jakarta, 2001

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, *Term of Reference Pengaruh Penggunaan Produk Dalam Negeri Terhadap Perkuatan Perekonomian Nasional*, Jakarta, 2001

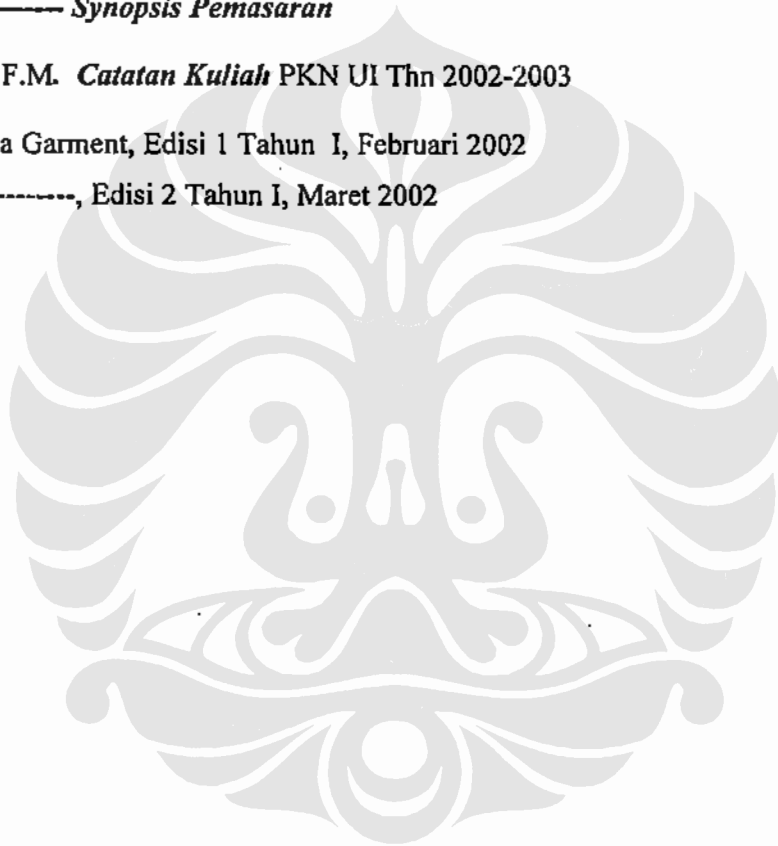
Wan Usman, *Modul Manajemen Strategik Kajian Strategik Ketahanan Nasional Pasca Sarjana Universitas Indonesia*, Jakarta, 2002,

----- *Synopsis Pemasaran*

Parapat, F.M. *Catatan Kuliah PKN UI Thn 2002-2003*

Indonesia Garment, Edisi 1 Tahun I, Februari 2002

-----, Edisi 2 Tahun I, Maret 2002



UNIVERSITAS INDONESIA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
KAJIAN STRATEJIK KETAHANAN NASIONAL  
KUESIONER ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP)

*KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL(TPT) DALAM NEGERI SERTA PREFERENSI KONSUMEN TERHADAP PRODUK TPT DALAM NEGERI (KAJIAN DILIHAT DARI SUDUT KETAHANAN EKONOMI NASIONAL)*

PENGANTAR

Analytical Hierarchy Process (AHP) sebagai metode yang dikemukakan Thomas Saaty, merupakan proses pengambilan keputusan bagi manajemen melalui strukturisasi pendekatan. Pendekatan yang dilakukan, disusun berdasarkan hierarki dengan memberi nilai pada setiap pertimbangan subyektif antar variabel, serta mensintesis berbagai pertimbangan untuk mendapatkan prioritas. Pendekatan model AHP, berkaitan dengan masukan serta perlunya pertimbangan bagi manajemen, dikaitkan dengan besarnya resiko terhadap kegagalan atas pilihan keputusan. Metode ini (AHP) membutuhkan kuesioner yang akan diisi oleh responden (sampel), yang dalam penelitian ini ditetapkan sebagai expert atau pakar dibidangnya. Kemudian, setiap kuesioner (jawabannya) dikuantifikasi dalam skala tertentu, selanjutnya diolah melalui software yang diprogram secara khusus untuk penggunaan AHP yang disebut expert choice.

Relevansi judul dengan ketahanan ekonomi nasional, dikaitkan dengan besarnya investasi, banyaknya tenaga kerja, peluang atau potensi pengadaan bahan baku dan sistem moneter. Disamping hal tersebut, perlunya pengadaan sarana dan prasarana, dukungan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan pemerintah untuk menyinkronkan kepentingan Pelaku Usaha, ketersediaan kebutuhan masyarakat dan kesinambungan pembangunan. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan sebagai faktor pengaruh konsumen dalam menetapkan pilihannya, merujuk pada teori-teori tentang perilaku konsumen, a.l : harga, desain, motif, merk dan kualitas. Secara umum, pengertian terhadap kriteria dimaksud adalah :

**HARGA**, Secara umum, harga jual yang ditetapkan pelaku usaha bagi konsumen atas setiap produknya merupakan nilai suatu barang yang diukur dengan sejumlah uang, di mana berdasarkan nilai tersebut seseorang/perusahaan bersedia melepaskan barang yang dimiliki kepada pihak lain.

**MERK/BRAND NAME**, Pada awalnya merk atau cap merupakan identitas produk dari suatu perusahaan dan sekaligus untuk membedakannya dengan produk sejenis lainnya. Dengan adanya persaingan serta semakin banyaknya pilihan yang beredar, maka merk menjadi alat bantu bagi konsumen, karena setiap produk dengan merk-merk tertentu telah memiliki pelanggan dan didukung dengan kualitasnya masing-masing. Adanya kebanggaan terhadap pemakaian suatu merk, menjadikan merk sebagai trade mark perusahaan itu sendiri.

**KUALITAS**, Adalah satu kesatuan yang utuh antara bahan baku dan proses pekerjaan (pembuatannya) yang diikuti dengan proses penjualannya. Kualitas suatu produk saat ini semakin beragam dikaitkan dengan sistem penjualan yang dilakukan produsen. Namun kualitas yang beredar dapat menjadi lebih baik atau lebih rendah dibandingkan dengan bahan baku yang digunakan. Maksudnya, sentuhan proses dapat membuat nilai tambah dari bahan baku yang digunakan, atau sentuhan teknologi yang lebih optimal.

**DESAIN**, Dalam kuesioner ini, desain merupakan bentuk atau mode setiap produk yang ditawarkan. Dalam sistem penjualannya produsen selalu menawarkan Desain yang terkait atau memiliki kesamaan dengan kebutuhan konsumen, dalam arti kebutuhan bentuk yang sesuai dalam setiap penggunaannya, seperti yang ditawarkan oleh para perancang.

**MOTIF**, Perbedaan desain dengan motif dalam kuesioner ini ialah, terletak pada bentuk pendekatan dan tidak pada bentuk produk, warna atau gambar yang melekat pada setiap produk. Secara bersamaan, produsen menempelkan kedekatan motif dan desain, namun konsumen dapat membedakan penetapan pilihannya

**PRODUK DALAM NEGERI**, Adalah produk yang dibuat di dalam negeri, dengan menggunakan tenaga lokal, bahan baku sebagian atau seluruhnya berasal dari dalam negeri serta tunduk dan taat terhadap peraturan atau perundang-undangan yang ditetapkan di dalam negeri.

**PRODUK LUAR NEGERI**, Langsung atau tidak langsung masuk wilayah pabean Indonesia, dan dibuat di luar negeri, menggunakan tenaga asing dan dalam proses pembuatannya tidak tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan yang berlaku di dalam negeri (Indonesia).

Selanjutnya pada halaman berikut nampak struktur atau hierarki AHP.



## PETUNJUK PENGISIAN

Setiap pertanyaan dari dua model, yaitu Model A dan Model B. Silahkan bapak, Ibu dan saudara (B/I/S) memilih salah satu model yang paling cocok dengan pendapat B/I/S.

1. kalau sudah menjawab A, jangan menjawab B. Sebaliknya, jika telah menjawab B, tidak perlu menjawab A. Berilah garis bawah pada pilihan jawaban yang menurut B/I/S anggap paling benar.
2. Jangan sampai ada jawaban yang tertinggal atau tidak terjawab

## CONTOH

Dalam rangka menetapkan pilihan penggunaan produk TPT, seberapa pentingkah :

- A. Aspek HARGA jika dibandingkan dengan motif  
Jawab : (sama/sedikit lebih/lebih/sangat lebih/paling) penting
- B. MOTIF, jika dibandingkan dengan aspek harga  
Jawab (sama / sedikit lebih / lebih / sangat lebih / paling) penting

Artinya : Jika B/I/S telah memilih atau menjawab pertanyaan Model B, maka Model A tidak perlu dijawab. Menurut B/I/S, MOTIF lebih penting dibandingkan dengan Harga. Demikian sebaliknya, jika B/I/S memilih menjawab Model A, maka Model B tidak perlu dijawab

## KUESIONER

Dalam rangka mengetahui Preferensi Konsumen terhadap produk TPT, ditinjau dari segi HARGA, seberapa pentingkah :

1. A. Aspek HARGA jika dibandingkan dengan DESAIN produk ?  
Jawab : (sama / sedikit lebih / lebih / sangat lebih / paling ) penting
- B. DESAIN Produk jika dibandingkan dengan HARGA  
Jawab ( sama / sedikit lebih / lebih / sangat lebih / paling) penting

2. A. Aspek HARGA jika dibandingkan dengan MOTIF produk  
Jawab : (sama / sedikit lebih / lebih / sangat lebih / paling) penting
- B. MOTIF produk jika dibandingkan dengan HARGA  
Jawab : (sama / sedikit lebih / lebih / sangat lebih / paling) penting
3. A. Aspek HARGA jika dibandingkan dengan MERK produk ?  
Jawab : (sama / sedikit lebih / lebih / sangat lebih / paling ) penting
- B. MERK Produk jika dibandingkan dengan HARGA  
Jawab ( sama / sedikit lebih / lebih / sangat lebih / paling) penting
4. A. Aspek HARGA jika dibandingkan dengan KUALITAS produk  
Jawab : (sama / sedikit lebih / lebih / sangat lebih / paling) penting
- B. KUALITAS produk jika dibandingkan dengan HARGA  
Jawab : (sama / sedikit lebih / lebih / sangat lebih / paling) penting

Dalam rangka mengetahui Preferensi Konsumen terhadap produk TPT, ditinjau dari segi DESAIN, seberapa pentingkah :

5. A. Aspek DESAIN jika dibandingkan dengan MOTIF produk ?  
Jawab : (sama / sedikit lebih / lebih / sangat lebih / paling ) penting
- B. MOTIF Produk jika dibandingkan dengan DESAIN  
Jawab ( sama / sedikit lebih / lebih / sangat lebih / paling) penting
6. A. Aspek DESAIN jika dibandingkan dengan MERK produk  
Jawab : (sama / sedikit lebih / lebih / sangat lebih / paling) penting
- B. MERK produk jika dibandingkan dengan DESAIN  
Jawab : (sama / sedikit lebih / lebih / sangat lebih / paling) penting
7. A. Aspek DESAIN jika dibandingkan dengan KUALITAS produk ?  
Jawab : (sama / sedikit lebih / lebih / sangat lebih / paling ) penting
- B. KUALITAS Produk jika dibandingkan dengan DESAIN  
Jawab ( sama / sedikit lebih / lebih / sangat lebih / paling) penting

Dalam rangka mengetahui Preferensi Konsumen terhadap produk TPT, ditinjau dari segi MOTIF, seberapa pentingkah

8. A. Aspek MOTIF jika dibandingkan dengan MERK produk  
Jawab : (sama / sedikit lebih / lebih / sangat lebih / paling) penting
- B. MERK produk jika dibandingkan dengan MOTIF  
Jawab : (sama / sedikit lebih / lebih / sangat lebih / paling) penting
9. A. Aspek MOTIF jika dibandingkan dengan KUALITAS produk ?  
Jawab : (sama / sedikit lebih / lebih / sangat lebih / paling ) penting
- B. KUALITAS Produk jika dibandingkan dengan MOTIF  
Jawab ( sama / sedikit lebih / lebih / sangat lebih / paling) penting

Dalam rangka mengetahui Preferensi Konsumen terhadap produk TPT, ditinjau dari segi MERK, seberapa pentingkah

10. A. Aspek MERK jika dibandingkan dengan KUALITAS produk  
Jawab : (sama / sedikit lebih / lebih / sangat lebih / paling) penting
- B. KUALITAS produk jika dibandingkan dengan MERK  
Jawab : (sama / sedikit lebih / lebih / sangat lebih / paling) penting

Ditinjau dari segi HARGA, manakah yang lebih penting untuk menjamin ketahanan ekonomi nasional, antara :

11. A. Penggunaan TPT Produk Dalam Negeri jika dibandingkan dengan Produk Luar Negeri  
Jawab : ( sama / sedikit lebih / lebih / sangat lebih / paling) penting
- B. Penggunaan produk Luar Negeri jika dibandingkan dengan Produk Dalam Negeri  
Jawab : (sama / sedikit lebih / lebih / sangat lebih / paling) penting

Ditinjau dari segi DESAIN, manakah yang lebih penting untuk menjamin ketahanan ekonomi nasional, antara :

12. A. Penggunaan TPT Produk Dalam Negeri jika dibandingkan dengan Produk Luar Negeri  
Jawab : ( sama / sedikit lebih / lebih / sangat lebih / paling) penting
- B. Penggunaan produk Luar Negeri jika dibandingkan dengan Produk Dalam Negeri  
Jawab : (sama / sedikit lebih / lebih / sangat lebih / paling) penting

Ditinjau dari segi MOTIF, manakah yang lebih penting untuk menjamin ketahanan ekonomi nasional, antara :

13. A. Penggunaan TPT Produk Dalam Negeri jika dibandingkan dengan Produk Luar Negeri

Jawab : ( sama / sedikit lebih / lebih / sangat lebih / paling) penting

B. Penggunaan produk Luar Negeri jika dibandingkan dengan Produk Dalam Negeri

Jawab : (sama / sedikit lebih / lebih / sangat lebih / paling) penting

Ditinjau dari segi MERK, manakah yang lebih penting untuk menjamin ketahanan ekonomi nasional, antara :

14. A. Penggunaan TPT Produk Dalam Negeri jika dibandingkan dengan Produk Luar Negeri

Jawab : ( sama / sedikit lebih / lebih / sangat lebih / paling) penting

B. Penggunaan produk Luar Negeri jika dibandingkan dengan Produk Dalam Negeri

Jawab : (sama / sedikit lebih / lebih / sangat lebih / paling) penting

Ditinjau dari segi KUALITAS, manakah yang lebih penting untuk menjamin ketahanan ekonomi nasional, antara :

15. A. Penggunaan TPT Produk Dalam Negeri jika dibandingkan dengan Produk Luar Negeri

Jawab : ( sama / sedikit lebih / lebih / sangat lebih / paling) penting

B. Penggunaan produk Luar Negeri jika dibandingkan dengan Produk Dalam Negeri

Jawab : (sama / sedikit lebih / lebih / sangat lebih / paling) penting

# HASIL AHP DENGAN 30 RESPONDEN

## SINTESA SELURUH MATRIKS

1. FOKUS	TINGKAT PRIORITAS
Desain	0.3232
Harga	0.3017
Motif	0.2060
Merek	0.1314
Kualitas	0.0377
<b>TOTAL</b>	<b>1.0000</b>

## 2. PRIORITAS ALTERNATIF TERHADAP FOKUS

1 Desain	
Produk Dalam Negeri	0.9079
Produk Luar Negeri	0.0921
2 Harga	
Produk Dalam Negeri	0.9904
Produk Luar Negeri	0.0096
3 Motif	
Produk Dalam Negeri	0.6118
Produk Luar Negeri	0.3882
4 Merek	
Produk Dalam Negeri	0.9280
Produk Luar Negeri	0.0720
5 Kualitas	
Produk Dalam Negeri	0.8452
Produk Luar Negeri	0.1548

## 3. URUTAN PRIORITAS ALTERNATIF TERHADAP FOKUS

Produk Dalam Negeri	0.8720
Produk Luar Negeri	0.1280

Jakarta,       Maret 2003

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr .....

Di

Jakarta

Salam hormat,

Dalam rangka menyelesaikan pendidikan Pasca Sarjana Program Kajian Strategik Ketahanan Nasional Universitas Indonesia, mohon perkenan Bapak/Ibu/Sdr untuk mengisi kuesioner yang kami sampaikan. Besar harapan kami, bahwa Bapak/Ibu/Sdr bersedia, dan kesediaan dimaksud untuk mengisi kuesioner yang kami berikan pasti akan mengurangi produktivitas Bapak/Ibu/Saudara. Namun, waktu itulah yang menjadi kesempatan bagi peneliti untuk menerima bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara, sekaligus kelancaran penyelesaian pendidikan yang ditempuh.

Adapun seluruh jawaban atas kuesioner yang dibagikan, dipergunakan hanya untuk kepentingan penulisan atau penyelesaian tesis. Ikatan moral merupakan landasan, dan untuk itu Peneliti tidak akan menyebarkanluaskannya untuk kepentingan apapun, selain untuk Tesis yang berjudul : Kebijakan Pembangunan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Dalam Negeri Serta Preferensi Konsumen Terhadap Produk TPT Dalam Negeri (Kajian dilihat dari sudut Ketahanan Ekonomi Nasional)

Atas perhatian Bapak/Ibu/Sudara kami ucapkan terimakasih

Hormat kami

P. Remedy Silalahi

**JATI DIRI RESPONDEN**

Nama : ..... (lk/pr)

Tempat dan : .....

Tanggal Lahir : .....

Alamat : ..... No. ....

RT..... /RW ..... Kode Pos .....

Telepon : Rumah ....., Hp .....

Alamat Kantor :

Faksimili : .....

E-Mail : .....

*Catatan : Mohon maaf menggunakan B/I/S sebagai pengganti Bapak/Ibu/Saudara, dan saat memberi jawaban, tanda huruf (S, T, SM, M, C, TM, STM) pada setiap jawaban merupakan akronim. Huruf S ( setuju); T ( tidak setuju); SM (sangat mendukung); M (mendukung); C (cukup); TM (tidak mendukung ); STM (sangat tidak mendukung)*

---

1. Usia B/I/S sekarang : .....

- a. (18 - 23 tahun), b. (24 -29 tahun), c. (30 - 35 tahun) , d. (36 - 41 tahun)
- e. (42 - 47 tahun), f. (48 - 53 tahun)

2. Pendidikan B/I/S terakhir : .....

- a. (SMU atau sederajat), b. (Sarjana Muda), c. (S 1), d. ( S2), e. (S3)

3. Pekerjaan B/I/S: .....

- a. Pegawai swasta                      c. TNI/Polri                      e. Pengusaha/Wiraswasta
- b. Ibu Rumah Tangga                  d. Pegawai Negeri              f. Pegawai BUMN

4. Lama B/I/S bekerja : .....

- a. (1 - 5 tahun), b. (6 - 10 tahun), c. (11 - 15 tahun), d. > 15 tahun

5. Jabatan B/I/S: .....

- a. Presiden Komisaris                  f. Perwira Tinggi                  j. General Manager
- b. Komisaris                              g. Perwira Menengah              k. Pegawai Eselon III

- c. Presiden Direktur
  - d. Direktur
  - e. General Manager
  - h. Pegawai Eselon I
  - i. Pegawai Eselon II
  - j. Asisten Manager
  - l. Pegawai Eselon IV
  - m. Lainnya sebutkan
6. Pengeluaran Perkapita B/I/S setiap bulannya : .....

- a. < Rp. 40.000,-
- b. Rp. 40.000,- - Rp. 59.999,-
- c. Rp. 60.000,- - Rp. 79.999,-
- d. Rp. 80.000,- - Rp. 149.999,-
- e. Rp. 150.000,- - Rp. 199.999,-
- f. Rp. 200.000,- - Rp. 299.999,-
- g. Rp. 300.000,- - Rp. 499.000,-
- h. > Rp. 500.000,-

(tidak termasuk biaya/cicilan kendaraan, rumah, pendidikan, telepon, air)

### EVALUASI TERHADAP PRODUK DALAM NEGERI

7. Pertamakali B/I/S mendengar Penggunaan Produk Dalam Negeri

- a. Keluarga/Orang Tua
- b. Kampus/Dosen
- c. Teman
- d. Iklan/Promosi
- e. Lainnya (sebutkan) .....

8. Pernahkah B/I/S melihat iklan tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri

- a. Pernah
- b. Tidak pernah

9. Jika pernah, dimana B/I/S melihat iklan Penggunaan Produk Dalam Negeri

- a. Televisi
- b. Koran
- c. Billboard/iklan luar ruang
- d. Majalah
- e. Lainnya (sebutkan)

10. Sebutkan nama media tersebut .....

Media Cetak	Televisi	Radio
a. Majalah Gatra	a. TVRI	a. Trijaya FM
b. Majalah Gamma	b. T P I	b. RRI
c. Majalah Warta Ekonomi	c. Trans	c. Sonora
d. Majalah Swa	d. R C T I	d. Jayabaya
e. Majalah Matra	e. S C T V	
f. Majalah Business Week	f. AN	
g. Majalah Infobisnis	g. Indosiar	
h. Koran Jawa Pos	h. Metro	

11. Sudah berapa lama B/I/S mengetahui Penggunaan Produk Dalam Negeri Dicanangkan



- a. Kurang dari 1 tahun
- b. 1 tahun s.d. 5 tahun
- c. 6 tahun s.d. 10 tahun
- d. 11 tahun s.d. 15 tahun
- e. Lebih dari 16 tahun

12. Mengapa B/I/S menggunakan Produk Impor 1. ....; 2. ....; 3. ....; 4. ....; 5. ....

- a. Sesuai anggaran pengeluaran sehingga menguntungkan
- b. Motifnya sesuai dengan mode atau trend masa kini
- c. Menunjang/Mendukung keberhasilan pekerjaan
- d. Sesuai dengan pendapatan
- e. Prestise
- f. Merk jaminan mutu
- g. Kualitasnya lebih baik
- h. Harganya sesuai
- i. Desainnya sesuai dengan bentuk tubuh
- j. Sesuai dengan pendapatan
- k. Tuntutan lingkungan

13. Bagaimana pendapat B/I/S saat menggunakan Produk Dalam Negeri

No. Pernyataan	S	T
1. Kuno dan ketinggalan zaman	( )	( )
2. Mendukung anjuran, wujud nasionalisme baru	( )	( )
3. Motifnya kaya dengan kultur Indonesia	( )	( )
4. Kualitasnya tidak mendukung	( )	( )
5. Desainnya tidak sesuai dengan bentuk tubuh	( )	( )
6. Merk tidak merupakan jaminan mutu	( )	( )
7. Harganya relatif mahal dibandingkan produk impor	( )	( )
8. Menggunakan produk dalam negeri dan impor sama	( )	( )
9. Karena pendapatan berkurang	( )	( )
10. Terpaksa, tidak mampu membeli produk Impor	( )	( )
11. Motifnya tidak inovatif, kurang kreasi	( )	( )
12. Penggunaan warna konvensional	( )	( )
13. Tidak prestisius	( )	( )
14. Sesuai dengan anggaran (pengeluaran)	( )	( )

14. Dimana B/I/Sdr biasanya membeli produk TPT

- a. Berlangganan
  - b. Super Market/Mall/Plaza
  - c. Boutique
  - d. Pasar
  - e. Lainnya (sebutkan)
- .....

- b. Untuk keperluan Kantor (Kerja)
- c. Pakaian sehari-hari
- d. Hari-hari besar nasional
- e. Kontak bisnis
- f. Acara-acara resmi

20. Untuk mendukung peningkatan penggunaan produk TPT dalam negeri, menurut B/I/S, faktor-faktor apakah yang strategis diprioritaskan dalam pengembangannya, terutama dalam menyikapi dan menghadapi era perdagangan bebas

	SM	M	C	TM	STM
a. Sumber daya manusia	...	...	...	...	...
b. Investasi/permodalan	...	...	...	...	...
c. Penyediaan bahan baku	...	...	...	...	...
d. Research	...	...	...	...	...
e. Sistem Moneter	...	...	...	...	...
f. Akses pasar	...	...	...	...	...
g. Kerjasama Regional	...	...	...	...	...
h. Art graphics	...	...	...	...	...
i. Pengembangan Iptek	...	...	...	...	...
j. Perlunya Contoh (Panutan)	...	...	...	...	...
k. Adanya gerakan kesadaran nasional	...	...	...	...	...
l. Adanya pemaksaan/kewajiban	...	...	...	...	...
m. Tidak perlu ada imbauan	...	...	...	...	...

21. Pernahkah B/I/S merancang busana untuk keperluan Dinas maupun Bisnis dengan bahan dan motif tekstil daerah

- a. Ya
- b. Tidak pernah
- c. Lupa

22. Dapatkah B/I/S sebutkan secara berurutan, faktor utama yang digunakan saat atau setiap melakukan pembelian produk TPT yang disukai :

1. ....; 2. ....; 3. ....; 4. ....; 5. ....; 6. ....; 7. ....; 8. ....;

- a. Besarnya *Pendapatan* setiap bulan
- b. *Harga* Produk TPT yang ditawarkan
- c. *Desain* yang sesuai dengan bentuk tubuh
- d. *Kualitas* produk TPT, dengan mengabaikan motif dan desain
- e. *Motif* yang sesuai dengan rencana penggunaan Produk TPT
- f. *Merk* tertentu, yang telah digunakan dalam waktu relatif lama
- g. Kuatnya *pengaruh Iklan* atau Sales promotion
- h. *Coba-coba*, untuk mendapatkan pilihan yang sesuai
- i. *Berlangganan* pada satu Toko pada lokasi tertentu

- j. Tergantung *feeling/mood* (dari lihat-lihat menjadi membeli)
- k. Membeli *sesuai kebutuhan* (acara)
- l. Yang penting *Produk Luar Negeri*.
- m. Yang penting *Produk Dalam Negeri*
- n. Perkiraan *Anggaran/Pengeluaran* setiap bulannya
- o. Setiap memakainya *menambah Prestise*

23. Setiap B/I/S melaksanakan tugas ke luar negeri, dapatkah B/I/S sebutkan, jenis kebutuhan/cinderamata yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas selalu di tanah air

- a. Tekstil dan Produk Tekstil
- b. Sepatu, Tas
- c. Jam Tangan
- d. Pulpen/Ballpoint
- e. Produk elektronik
- f. Perhiasan, logam mulia atau batu permata

24. Dapatkah B/I/S sebutkan, tiga (3) warna pavorit untuk tekstil dan produk tekstil yang menurut B/I/S harus dimiliki

a. .... ; b. .... ; c. ....

25. Apakah menurut B/I/S, pembinaan guna meningkatkan penggunaan produk dalam negeri bagi masyarakat, memiliki arti strategis dalam rangka mewujudkan ketahanan ekonomi nasional

a. Ya ..... ; b. Tidak ..... ; c. bertentangan dengan era WTO

26. Berapakah B/I/S memiliki produk TPT (Jas, Blazer) dengan warna favorit ?

a. Kurang dari 3      b. 4 - 6      c. 7 - 9      d. lebih dari 10

27. Apakah B/I/S selalu menyesuaikan motif produk TPT yang dipakai dengan warna/jenis kendaraan yang B/I/S miliki/gunakan pada setiap harinya ?

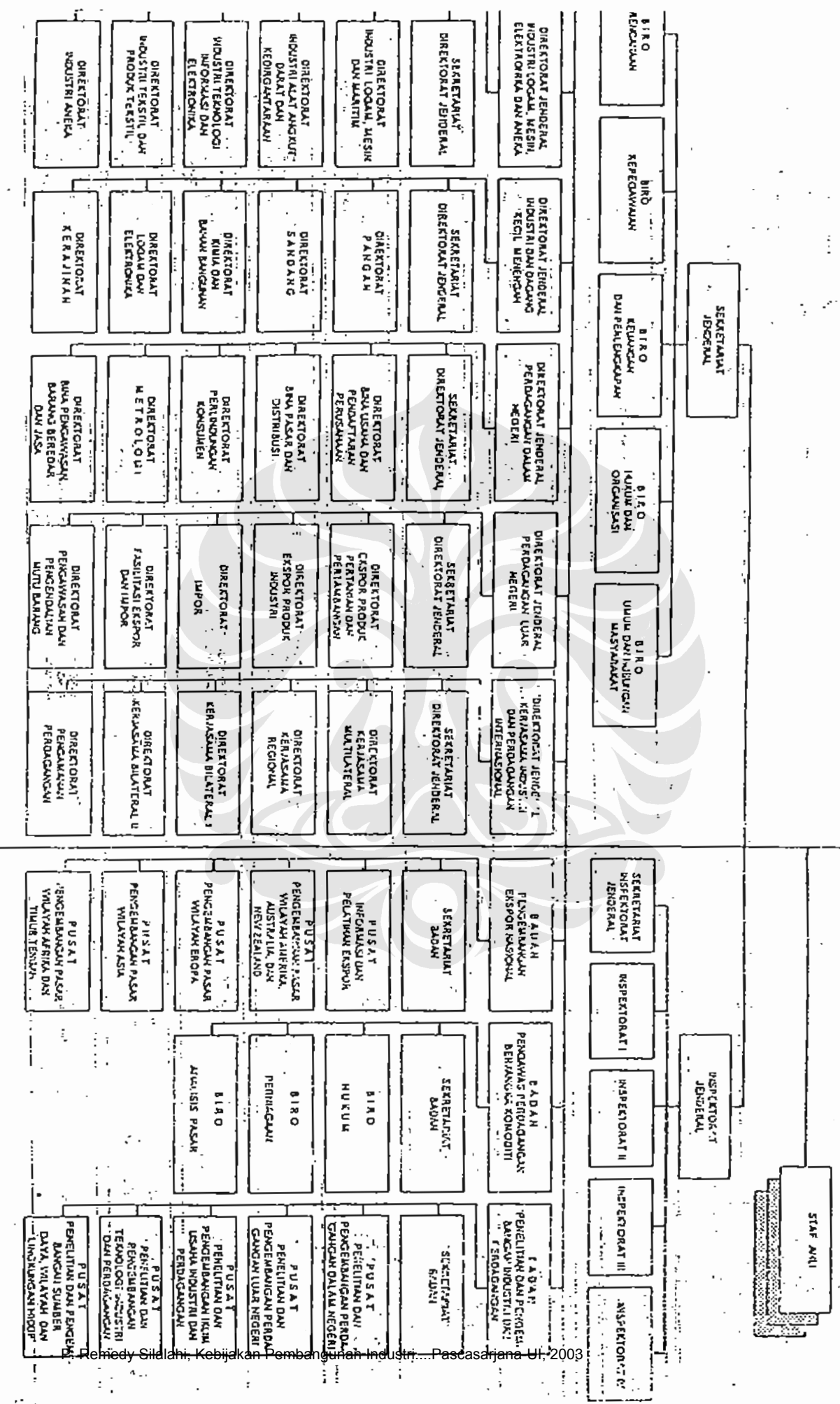
a. Ya ..... ; b. Tidak ..... ; c. Kadang-kadang .....

STRUKTUR DAN PERDAGANGAN

KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN PERTANJANGAN

Lampiran Keputusan Menteri Perindustri dan Perdagangan Nomor 80/KSP/1992/2001

STAF AHLI



## Bank Taiwan Dana Industri Tekstil

JAKARTA — Industri tekstil yang kinerjanya sedang lesu, dapat angin segar. Dua bank asing, China Trust dan Bank Export Import dari Taiwan memastikan untuk mendanai restrukturisasi mesin pengolah tekstil.

Kedua bank itu bersedia membantu, dengan catatan, industri membeli mesin-mesin yang diproduksi Taiwan dalam restrukturisasinya. Untuk itu, kalangan industri cukup menyediakan modal 15 persen dari total kebutuhan. Sisanya dipinjami kedua bank itu, dengan bunga rata-rata 10 persen.

Pemerintah tidak ikut serta dalam penentuan skema kredit yang digunakan. "Skemanya ditentukan melalui kesepakatan bisnis di antara keduanya," kata Subagyo. Dirjen Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka Departemen Perindustrian dan Perdagangan dua hari lalu.

Restrukturisasi industri tekstil dibutuhkan lantaran mesin pengolahan yang digunakan rata-rata sudah tua. Rencana ini

pemah dipresentasikan ke Bank Indonesia guna mendapatkan dukungan bank lokal, tapi tidak berhasil.

Soebagyo menuturkan, pemerintah mempertemukan kalangan industri tekstil di Bandung pada April lalu dengan kedua bank tadi. Setelah ini, pertemuan akan digelar di Jakarta untuk pengusaha tekstil di luar Bandung.

Secara terpisah, Direktur Industri Tekstil dan Produk Tekstil Luky Hartini menjelaskan, bantuan ini sekaligus merupakan upaya Taiwan untuk mendorong pemasaran produknya. "Jadi, seolah-olah Taiwan mengeksport mesinnya ke sini, sementara perbankan mendukung pembayarannya."

Secara garis besar, pola bantuan ini mirip dengan imbal beli antarnegara. Pasalnya, produsen mesin pengolah tekstil di Taiwan menerima pembayaran tunai dari kedua bank itu. Sedangkan kalangan industri membayar tidak perbankan dengan

cara mencicil. Meski begitu, pemerintah masih menunggu daftar merek dan kualifikasi mesin yang ditawarkan.

Luky mengungkapkan, pengusaha yang berniat dapat langsung menghubungi kedua bank tersebut. Menurut dia, mesin pengolah tekstil asal Taiwan bukanlah barang asing bagi kalangan pengusaha tekstil.

"Bahkan, yang selama ini sudah memakai mesin Taiwan, langsung mengontak mereka," katanya.

Di antaranya, kata Luky, para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Perancang Mode. "Selama ini saya pakai, *oke-oke saja, kok.*"

Selama ini, yang menjadi kesulitan industri tekstil dalam restrukturisasi, salah satunya lantaran suku bunga kredit yang besar, yakni sebesar 18-19 persen. Padahal, negara-negara lainnya di kawasan Asia Tenggara justru memiliki tingkat suku bunga yang lebih rendah. Contohnya, Thailand (5,6 persen), Viet-

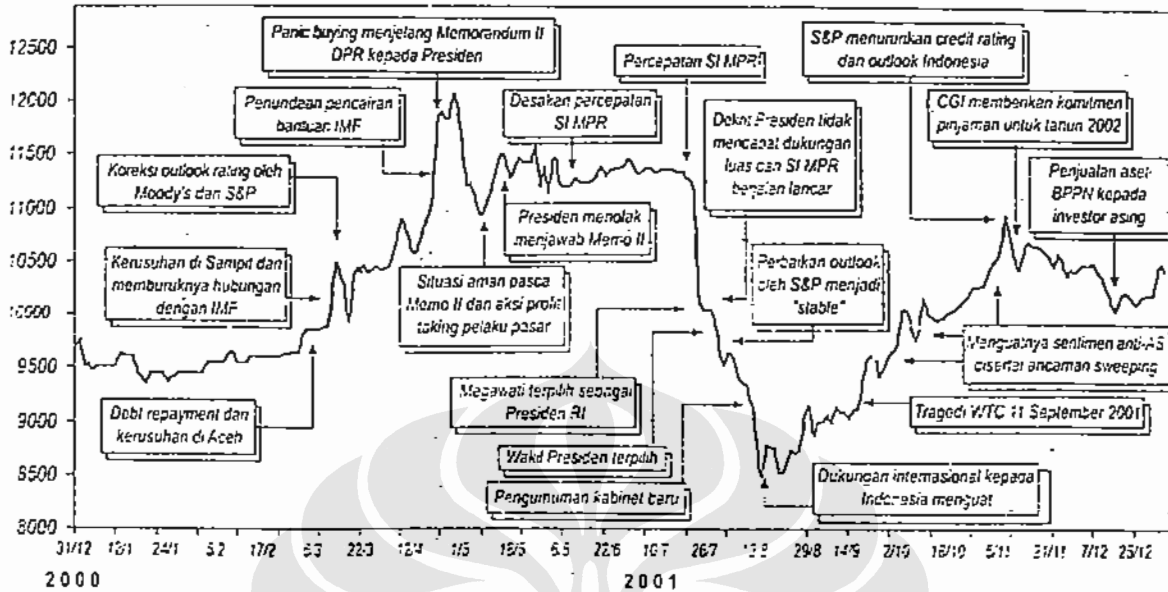
nam (11 persen), dan Kamboja (8 persen).

Kendala lainnya, kata Luky, industri tekstil kerap dianggap sebagai industri yang kurang seksi. Sekarang ini, katanya, industri itu memang sedang suram. "Sedang setengah mati untuk bertahan tidak tutup." Karena itu, kalangan perbankan khawatir dengan masa depannya, karena dinilai penuh risiko.

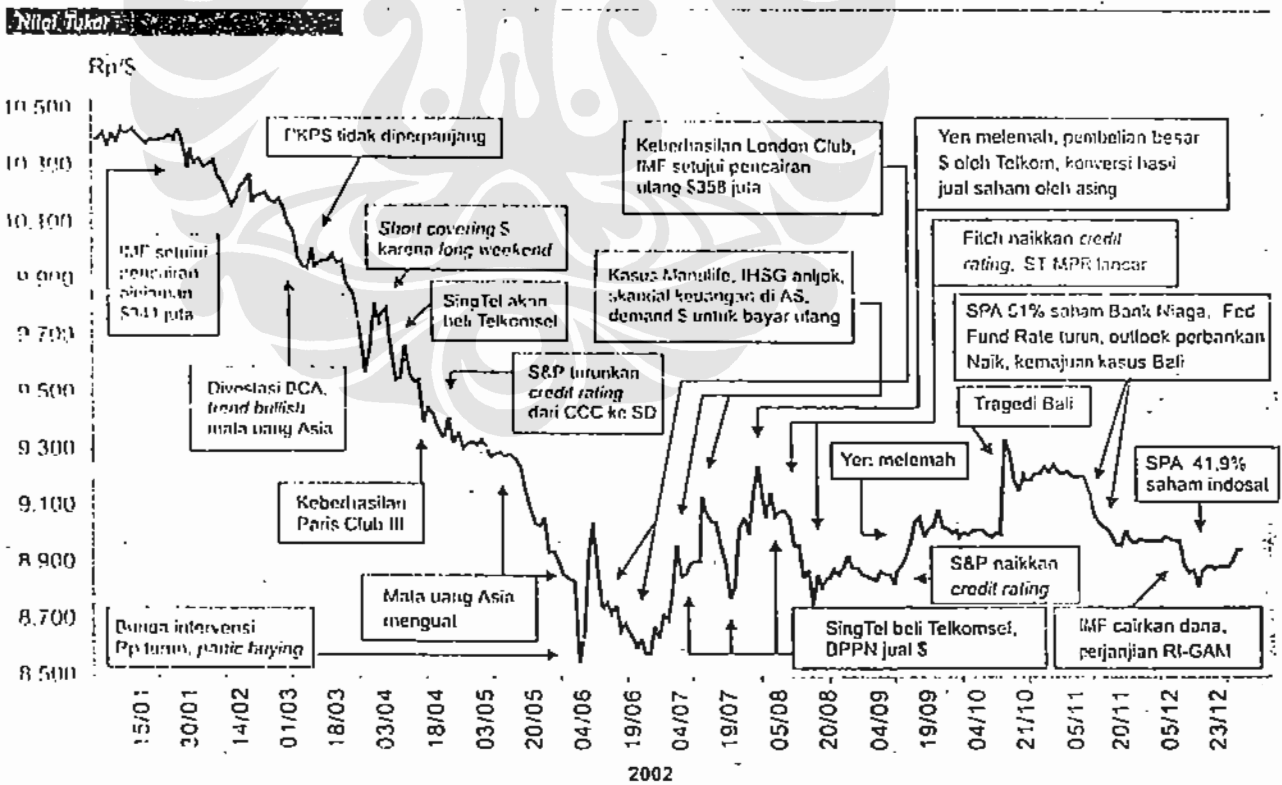
Berdasarkan data Departemen Perindustrian, tahun lalu nilai ekspor tekstil turun 11,47 persen dibandingkan sebelumnya. Meski begitu, volume ekspor tekstil dan produk tekstil yang dikenakan kuota meningkat 6,95 persen.

Saat ini, Indonesia menduduki peringkat pertama dalam realisasi kuota tekstil dan produk tekstil ke Amerika Serikat dibanding negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya, yakni 98,68 persen. Peringkat kedua dan ketiga diduduki Filipina (82,99 persen) dan Kamboja (81,62 persen). ● data mutia uning

Rp/\$



Grafik 3.2  
Perkembangan Nilai Tukar Rupiah dan Faktor Sentimen



Grafik 3.2  
Perkembangan Nilai Tukar Rupiah dan Faktor Sentimen Tahun 2002

# Skandal KKN Kuota TPT Ratusan Miliar Mulai Terkuak



Laporan Lembaga Transparansi Internasional menempatkan Indonesia pada peringkat 96 yang menunjukkan tingginya tingkat korupsi di negeri ini. Peringkat ini didasarkan pada indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang pada akhir tahun 2002

hanya mendapatkan nilai 1,9 dari angka 10 yang merupakan nilai amat bersih dari korupsi. Hasil survey juga menunjukkan bahwa selama setahun ini tidak terlihat upaya serius pemerintra dalam memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tingkat korupsi di Indonesia, menurut laporan tersebut, sejajar dengan Kenya atau hanya sedikit lebih rendah dari korupsi yang berlangsung di Angola, Madagaskar, Paraguay, Nigeria dan Bangladesh. Padahal Indonesia bukan negara termiskis di dunia. Sebab jika dibandingkan dengan negara yang pembangunan manusianya lebih rendah dari Indonesia, seperti Namibia dan Botswana indeks persepsi korupsinya jauh lebih rendah dari Indonesia atau lebih baik nilainya yakni 5,7 dan 6,4. Demikian pula bila dibanding dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya, seperti Vietnam yang memiliki tingkat kesejahteraan di bawah Indonesia, namun Vietnam justru jauh lebih rendah tingkat korupsinya dengan indeks 2,4 (peringkat 87).

Tingkat korupsi seperti diungkap Lembaga Transparansi Internasional ini sebenarnya bukan hal baru. Dari beberapa laporan temuan BPK menyebutkan hampir di semua lembaga pemerintah terjadi penyimpangan anggaran yang jumlahnya mencapai milyaran rupiah. Jumlah ini belum termasuk bentuk-bentuk penyimpangan lainnya, mulai dari layanan masyarakat dengan birokrasinya sampai dengan bentuk-bentuk lainnya seperti regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan instansi pemerintah (departemen) yang umumnya terjadi pada tata niaga komoditi tertentu dengan mengabaikan dampaknya seperti ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) yang dapat mempengaruhi daya saing komoditi nasional baik dipasar local maupun di pasar internasional dimana tingkat daya saing produk Indonesia terus merosot dari urutan 49 pada tahun 2001 menjadi peringkat 56 pada tahun 2002.

Ekonomi biaya tinggi ini juga terjadi pada industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sebagai komoditi primadona ekspor non-migas. Industri ini sekarang mulai kehilangan gregetnya dalam menyumbang devisa negara. Akibat ekonomi biaya tinggi ini pula mulai dari kenaikan tarif telepon, BBM, TOL, transportasi, harga

kuota tinggi sampai dengan birokrasi dalam pengurusan dokumen ekspor TPT dsb, maka tidak heran dalam 2 tahun terakhir ini kinerja ekspor TPT terlihat memprihatinkan atau lebih tepatnya terus merosot dari US\$8,3 milyar pada tahun 2000 menjadi US\$7,2 milyar pada tahun 2001 dan US\$ 6,8 milyar pada tahun 2002.

Untungnya ekspor TPT ini masih tertolong dengan adanya fasilitas kuota kenegara tujuan utama ekspor komoditi TPT seperti AS, Uni Eropa dan Kanada, sehingga TPT masih memiliki eksistensinya. Persoalannya, apakah hasil ekspor ini memberikan keuntungan maksimal bagi kalangan eksportir TPT, sehingga eksportir (pengusaha TPT) dapat merestrukturisasi mesin-mesin TPT-nya agar pasca pembebasan kuota dapat bersaing di pasar bebas tahun 2005? Kalau tidak memberikan nilai tambah untuk industri TPT, berarti selama ini pemerintah, dalam hal ini Ditjen Daglu Depperindag, gagal dalam mengemban amanat mengurus manajemen kuota TPT.

Indikator kegagalan tersebut terasa sekali dari sikap pesimistis beberapa pengusaha TPT (eksportir) yang berhasil ditemui. *Indonesia Garment* di wilayah Bogor dan Jakarta. Mereka pesimistis terhadap kelangsungan industri garmennya. Mana mungkin bisa membeli mesin baru, kalau harga kuota TPT di pasar tetap tinggi. Konon tingginya harga kuota ini juga dipicu oleh sulitnya mendapatkan kuota TPT sesuai kategori di Depperindag, tetapi lebih mudah didapat di tangan non-eksportir, padahal banyak eksportir produsen TPT yang membutuhkan kuota untuk memenuhi permintaan buyer.

Fenomena di atas adalah suatu hal yang ironis, sehingga masalah ini selalu dipertanyakan oleh berbagai kalangan, termasuk anggota DPR, seperti Alvin Lie (Fraksi Reformasi) dan Andi Fuad Najmi (Fraksi Kebangkitan Bangsa) yang secara tegas meminta kepada Menperindag untuk menertibkan jual beli kuota. Bahkan Alvin Lie mendukung pembentukan pansus kuota atau membawanya ke Kejaksaan Agung agar manajemen kuota yang amburadul dapat dituntaskan, serta menindak aparat/pejabat yang berlaku tidak amanah (KKN) dalam urusan kuota yang menimbulkan biaya tinggi. Pendapat senada juga disampaikan Aburizal Bakrie, Ketua Umum Kadin Indonesia dan Anton J. Supit dari KPEN agar pemerintah lebih transparan dalam hal manajemen kuota TPT, serta memperhatikan keberadaan produsen TPT yang memiliki prestasi ekspor bagus, tetapi tidak memiliki kuota, dan terpaksa harus membeli kuota dengan harga relatif tinggi. (IG)

# Transparansi

## Manajemen Kuota, Harus!



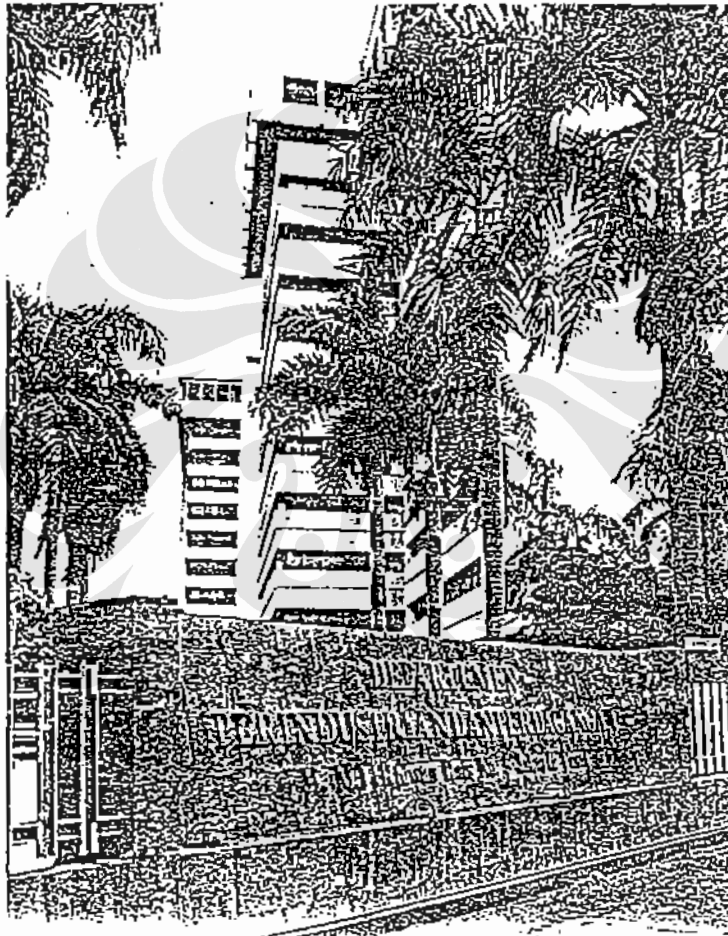
Masalah manajemen kuota kini digugat lagi oleh ber-

bagai kalangan, utamanya DPR dan pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang memiliki perusahaan atau pabrik. Mereka mengingatkan Menteri Perdagangan dan Industri, Rini MS Soewandi agar melakukan pengawasan lebih ketat atas jual beli kuota TPT. Jika jual beli kuota tersebut tidak diawasi, bukan saja merugikan pengusaha TPT, tapi juga devisa dari ekspor TPT jadi terganggu.

Wakil rakyat yang rajin mengingatkan Menperindag soal jual beli ini adalah anggota komisi V DPR Alvin Lie (Fraksi Reformasi) dan Andi Najmi Fu

Kebangkitan Bangsa). Alvin kerap sekali mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Deperindag, agar penanganan kuota ini transparan. Masalah kuota ini, kata Alvin, hendaknya tidak dilihat sebagai persoalan kuota semata yang tidak ada implikasinya. Kuota TPT ini sangat berimplikasi pada daya saing ekspor TPT Indonesia.

Namun, Alvin juga mengakui bahwa timbulnya masalah kuota ini tidak bisa ditekankan dari



tidak berani berterus terang. Tapi di lain pihak, dengan adanya kebijaksanaan kuota, apalagi setelah diperbolehkan untuk jual beli, menimbulkan pengusaha fiktif – pemilik kuota tersebut tidak mempunyai pabrik TPT.

Jual beli kuota ini mestinya segera dituntaskan. Kepada *Indonesia Garment* Alvin menegaskan betapa berbahayanya jual beli kuota ini (Baca: Alvin Lie: Bentuk Pansus Kuota!). Andi Najmi

(*Sinar Harapan*, 26/2/03). Menurut Andi, sebenarnya kuota TPT ini tidak boleh dijualbelikan. Tapi karena banyak faktor, akhirnya muncul jual beli kuota tersebut. Salah satu faktornya adalah karena tidak semua pelaku industri TPT mempunyai kuota sesuai kategori yang diinginkan.

Selama ini, kata Andi, apabila Komisi V rapat dengan Menperindag selalu dibahas masalah kuota. Tapi, jawaban menteri klasik, yakni akan menindaklanjuti soal jual beli kuota TPT ini agar berjalan normal. Nyatanya, masih ada keluhan dari banyak pengusaha TPT.

Untuk mengatasi masalah kuota ini Andi

menyarankan agar mengefektifkan pengawasan, baik dari pemerintah, dalam hal ini Menperindag, maupun dari DPR, sehingga jual beli kuota berjalan normal dan tidak mengganggu ekspor TPT.

Kebijakan kuota itu sebenarnya sudah diatur dalam Kepmen Nomor 311/MPP/KEP/II/2001 dan diterjemahkan dengan juklak Dirjen PLN Nomor 03/DJPLN/KP/II/2001. Namun, dalam tahap implementasinya tidak transparan, sering timbul masalah yang berlarut-larut. (IG)





Natsir Mansyur, SE. :

Pengusaha

# Manajemen Kuota TPT Harus Transparan melalui Verifikasi

## Buku Kuota 1998 - 2003

Situasi industri TPT yang semakin terpuruk disebabkan masalah-masalah klasik yang tidak dapat diselesaikan pemerintah, mulai dari masalah restrukturisasi, revitalisasi, penyelundupan, kenaikan tarif telepon, TDL, penenaan PPN Impor Serat Kapas sampai dengan masalah kuota tekstil. masalah-masalah tersebut sangat mempengaruhi kinerja industri TPT. Hal diatas berdampak pada daya saing, disamping melahirkan kompetisi yang tidak sehat pengusaha juga tidak mampu membeli kuota karena harga kuota TPT tinggi, sehingga banyak pengusaha lebih memilih untuk menutup pabrik dan atau merelokasi pabriknya ke tempat yang lebih kondusif.

Harapan kita kepada Menperindag tentu sangat besar. Tetapi sayang harapan tersebut seperti sulit terlaksana. Buktinya apa yang dilakukan Menperindag dengan membentuk beberapa lembaga, mulai dari lembaga *Indonesia Recovery Fund*, Sekretaris Bersama (Sekber), *Crisis Center* dan terakhir Pusat Solusi Bisnis yang tidak memberikan kontribusi yang signifikan untuk membangkitkan dunia usaha dari keterpurukan. Padahal kita perlu langkah kongkret agar pemerintah menyelamatkan industri bangkit dari keterpurukan, seperti industri TPT yang saat ini kondisinya diperburuk oleh terbakarnya Pasar Tanah Abang - pasar terbesar tekstil dan pakaian jadi dalam negeri. Secara langsung musibah tersebut memukul sentra-sentra industri tekstil, seperti Pekalongan dan Majalaya yang selama ini memasok tekstil dan pakaian jadi ke Pasar Tanah Abang.

Oleh karena itu, agar industri TPT tetap memberikan kontribusi yang nyata, maka pemerintah memerlukan alat penggerak (stimulus) yang salah satunya adalah melalui kuota TPT yang tersisa 1,5 tahun lagi - sebelum memasuki pasar bebas tahun 2005. Stimulus kuota TPT ini dapat digunakan sebagai alat stimulus untuk menggairahkan kembali industri TPT nasional - karena untuk saat ini hanya kuota TPT yang dapat masuk ke sana. Oleh kerennanya tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak memperbaiki Manajemen kuota TPT menjadi lebih transparan, bertanggungjawab dan berkeadilan (*Good Governance*).

Untuk memperbaikinya dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. *Pertama*, Manajemen Kuota TPT harus transparan. *Kedua*, buku kuota tekstil terlebih dulu diverifikasi untuk 5 tahun kebelakang, sehingga tidak ada lagi kecurigaan antara pengusaha dan pemerintah. *Ketiga*, pemerintah harus terbuka terhadap pelaku usaha tentang alokasi kuota TPT itu sendiri, jangan semakin tertutup seperti sekarang ini yang tidak ada buku alokasi KT. Padahal dulu buku alokasi KT selalu dibuka. Tetapi selama periode 2002/2003 tidak ada lagi. Untuk itu harus diklarifikasi terlebih dahulu supaya opini pelaku sektor riil, khususnya TPT tidak negatif terhadap pemerintah. Sebab saat ini banyak kalangan membandingkan Manajemen Kuota TPT saat ini dengan Manajemen Kuota TPT Menperindag sebelumnya yang sentralistik tetapi harga kuota di pasar terkendali, sedangkan saat ini cenderung tinggi. (IG)

**Table 5**

Beberapa contoh harga kuota TPT di pasar pada 2002

CATEGORI	HARGA	JUAL BELI HARGA NORMAL	JUAL BELI HARGA ABNORMAL
Cat. 647	Harga Kuota TPT	US\$ 4	US\$ 8
Cat. 645	Buku Kuota 2003	US\$ 5	US\$ 15
Cat. 347/348		US\$ 5	US\$ 30
Cat. 634/635		US\$ 15	US\$ 110
Cat. 342/642	Untuk Produsen/	US\$ 12	US\$ 50
Cat. 345	Eksportir TPT Gratis	US\$ 5	US\$ 15
Cat. 338/339		US\$ 5	US\$ 8
CAT. 334/335		US\$ 5	US\$ 20
Cat. 638/639		US\$ 5	US\$ 9
Cat. 351/651		US\$ 5	US\$ 10

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**N a m a** : P. Remedy Silalahi

**Tempat/Tgl Lahir** : Pakanbaru, 29 April 1954

**A g a m a** : Kristen – Protestan

**S t a t u s** : Kawin

**A l a m a t** : Jln. Turi Gg Kecapi Rt 014/03 No. 12  
Kel. Lenteng Agung, 12610 – Jaksel  
Tel. 78880586

**Pekerjaan** : Pegawai pada Departemen Perindustrian  
dan Perdagangan, Direktorat Bina  
Pengawasan Barang Beredar dan Jasa  
(Fungsional Penyuluh)  
Jln. M.I. Ridwan Rais, No. 5 – Jakpus  
Tel. 3858189